

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEMANDIRIAN KELOMPOK PADA PROGRAM
PENGENTASAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
DI KELURAHAN KAMPUNG BARU
KECAMATAN MEDAN MAIMUN KOTA MEDAN
PROPINSI SUMATERA UTARA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan
Minat Utama : Manajemen Pengembangan Masyarakat**



**Nurliana Harahap
NIM.S630908007**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

commit to user
2010

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEMANDIRIAN KELOMPOK PADA PROGRAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
DI KELURAHAN KAMPUNG BARU
KECAMATAN MEDAN MAIMUN KOTA MEDAN
PROPINSI SUMATERA UTARA**

Disusun oleh :

Nurliana Harahap

S630908007

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Dewan Pembimbing

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Dr. Sapja Anantanyu, SP, MS NIP. 19681227 199403 1 002
Pembimbing II	Dr. Ir. Kusnandar, MS NIP. 19670703 199203 1 004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Penyuluhan Pembangunan

Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS

NIP. 19470713 198103 1 001

commit to user

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEMANDIRIAN KELOMPOK PADA PROGRAM PENGENTASAN
KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)
DI KELURAHAN KAMPUNG BARU
KECAMATAN MEDAN MAIMUN KOTA MEDAN
PROPINSI SUMATERA UTARA**

Disusun oleh :

Nurliana Harahap

S630908007

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si NIP. 19601226 198601 2001
Sekretaris	Dr. Ir. Prapti Supardi, MP NIP. 19480808 198601 2 001
Anggota Penguji	1. Dr. Sapja Anantanyu, S.P, M.S NIP. 19681227 199403 1002
	2. Dr. Ir. Kusnandar, M.S NIP. 19670703 199203 1 004

Mengetahui

Ketua Program Studi Penyuluhan Pembangunan	Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS NIP. 19470713 198103 1 001
Direktur Program Pasca Sarjana	Prof. Drs. Suranto T., M.Sc., Ph.D NIP. 19570820 198503 1 004

commit to user

PERNYATAAN

Nama : Nurliana Harahap

NIM : S630908007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini yang berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Kelompok pada Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara* adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis ini.

Surakarta, Agustus 2010

Yang membuat pernyataan

Nurliana Harahap

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Desa Hambulo, Kec. Padang Bolak, Kab. Tapanuli Selatan pada tanggal 1 Oktober 1975 sebagai puteri kedua dari Bapak H. Sutan Nabonggal Harahap dan Ibu Hj. Siti Olom Rambe. Pendidikan dasar dan menengah penulis ditempuh di SD Negeri No. 142765 Paolan Kec. Padang Bolak, Kab. Tapanuli Selatan, SMP Swasta Perguruan Abdi Negara Kota Padang Sidempuan, dan SMU Negeri 6 Medan masing-masing lulus pada tahun 1988, 1991, dan 1994.

Penulis menyelesaikan pendidikan S-1 di Program Studi Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, pada tahun 1998.

Penulis merupakan pegawai Badan Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian, dan ditugaskan sebagai dosen di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan (STPP Medan) dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Sejak tahun 2008 penulis mengikuti pendidikan jenjang magister pada Program Studi Penyuluhan Pembangunan, Minat Utama Manajemen Pengembangan Masyarakat, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

PERSEMBAHAN



Karya ini dipersembahkan kepada:

- Orang tuaku tercinta, terima kasih atas do'a dan restu yang selalu menyertaiku.
- Suami dan kedua anakku Endi dan Reza sebagai sumber inspirasi dan menjadi kekuatan bagiku.
- Keluarga besarku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Alhamdulillahirobbil'aalamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala kemurahan dan kebaikan-Nya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Kelompok Pada Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.*

Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Januari sampai dengan Mei 2010 di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan Sumatera Utara. Tesis ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister (S2), pada Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulis sadar bahwa apa yang telah diraih bukan semata-mata keberhasilan pribadi melainkan juga berkat kepedulian, bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi yang telah mengizinkan penulis mengikuti pendidikan jenjang magister pada Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan, Minat Utama Manajemen Pengembangan Masyarakat, Program Pascasarjana UNS.
2. Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Pertanian dan Ketua STPP Medan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang S2.

commit to user

3. Prof. Dr. Ir. Edi Purwanto, M.Sc, yang telah memfasilitasi penulis selama melaksanakan pendidikan di Program Pascasarjana UNS.
4. Dr. Sapja Anantanyu, SP,MP, dan Dr. Ir. Kusnandar, MS, masing-masing sebagai pembimbing pertama dan pembimbing kedua, yang telah membimbing penulis menghasilkan karya ilmiah ini.
5. Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si. dan Dr. Ir. Hj. Suprpti Supardi, MP masing-masing sebagai ketua dan sekretaris tim penguji.
6. Koordinator Kota I Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) PNPM Mandiri Kota Medan Sumatera Utara.
7. Camat Medan Maimun, Lurah Kampung Baru, yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di wilayahnya.
8. Ketua dan Sekretaris BKM Mandiri Sejahtera Kelurahan Kampung Baru yang banyak membantu dan memfasilitasi penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Netty Harjianti, Nurjannah, Yudi Rustandi, Aswin E.S, Achmad Faqih, Dewangga Nikmatullah, , Edy Trianto dan Indah Listiana, dan teman-teman yang telah banyak membantu dan bekerja sama selama penulis mengikuti pendidikan di Program Pascasajana UNS.
10. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Surakarta, Agustus 2010

Penulis

ABSTRAK

Nurliana Harahap, S630908007. 2010. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Kelompok Pada Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dibawah bimbingan Dr. Sapja Anantanyu, SP, MS dan Dr.Ir. Kusnandar, MS*

Penanggulangan kemiskinan khususnya di perkotaan telah dilaksanakan melalui Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) dengan tiga aspek pemberdayaan yang dikenal dengan Tridaya yang mencakup pemberdayaan dibidang ekonomi, sosial dan fisik atau lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan segala kegiatan dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan serta faktor dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholder dan partisipasi kelompok terhadap kemandirian kelompok. Penelitian ini telah dilaksanakan di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, mulai bulan Januari sampai Mei 2010.

Jenis penelitian yaitu penelitian survai. Populasi penelitian adalah kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tergabung dalam badan keswadayaan masyarakat (BKM) yang seluruhnya 216 kelompok. Sampel penelitian ditentukan *proporsionate statified random sampling*. Variabel penelitian meliputi dinamika kelompok (X_1), karakteristik program (X_2), dukungan stakeholder (X_3), partisipasi kelompok (Y_1) dan kemandirian kelompok (Y_2). Pada penelitian digunakan instrumen jenis *rating scale*. Uji validitas dan reliabilitas instrumen telah dilaksanakan terhadap 20 kelompok dan termasuk responden penelitian. Teknik analisis data meliputi analisis statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data penelitian, analisis jalur atau path analisis untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa X_1 , X_2 dan X_3 berpengaruh secara bersama-sama terhadap partisipasi kelompok (Y_1) sebesar 30,6 %, X_1 , X_2 , X_3 dan Y_1 berpengaruh secara bersama-sama terhadap kemandirian kelompok (Y_2) sebesar 60,3 %. Pengaruh langsung ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur untuk X_2 terhadap $Y_1 = 0,413$, dan Y_1 terhadap $Y_2 = 0,715$, yang secara nyata berpengaruh pada $\alpha = 0,05$ dan seluruh variabel penelitian saling berkorelasi positif pada $\alpha = 0,05$

Kata kunci : kemiskinan, partisipasi kelompok, kemandirian kelompok

ABSTRACT

Nurliana Harahap, S630908007. 2010. The Factors Affecting the Level of Autonomy of Group On Urban Poverty Reduction Program (P2KP) in the village of Kampung Baru, the Sub district of Medan Maimun, Medan, North Sumatra Province. Thesis: Post Graduate Program of Sebelas Maret University, Surakarta. Supervisors: Dr. Sapja Anantanyu, SP, MS and Implementation Dr. Ir. Kusnandar, MS.

Poverty reduction especially in cities have been implemented under Urban Poverty Reduction Program (P2KP). There are three aspects of empowerment that is known as Tridaya which includes training in economic, environmental and physical or social spheres.

This study aims to describe all activities of the Urban Poverty Reduction Program and the factor of group dynamics, the characteristics of programs, support and participation of stakeholder groups to the autonomy of group. This research has been conducted in Kampung Baru village, the sub district of Medan Maimun, Medan, North Sumatra Province, from January to May 2010.

The type of research is survey. The populations were community *Kelompok Swadaya Masyarakat* (KSM) which was joined in *Badan Keswadayaan Masyarakat* (BKM) consisted of 216 groups. The research samples were 68 groups of respondents by using proportionate stratified random sampling technique. The research variables included the group dynamics (X_1), the characteristics of programs (X_2), the support of stakeholders (X_3), group participation (Y_1) and the autonomy of group (Y_2). Rating scale was used as the instrument of this research. Validity and reliability tests were performed on 20 groups and included research respondents. Data analysis techniques included descriptive statistics analysis to describe the research data, path analysis to predict the independent variables towards the dependent variable to determine direct and indirect effects among variables.

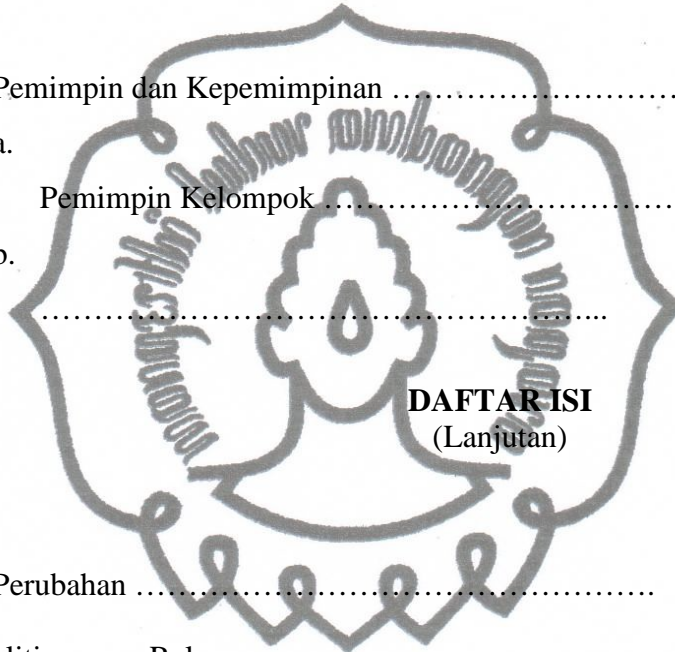
The result showed that X_1 , X_2 and X_3 together influenced the participation of groups (Y_1) at 30.6%, X_1 , X_2 , X_3 , and Y_1 together influenced towards the autonomy of groups (Y_2) at 60.3%. The direct effect was shown by the path coefficient values for X_2 to $Y_1 = 0.413$, and Y_1 to $Y_2 = 0.715$ which was significant at $\alpha = 0.05$ and all research variables were positively correlated each other at $\alpha = 0.05$.

Key word: poverty, group participation and the autonomy of group

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar	Latar
Belakang	1
B. Rumusan	Rumusan
Masalah	5
C. Tujuan	Tujuan
Penelitian	8
D. Manfaat	Manfaat
Penelitian	9
1. Pemerintah dan Pihak Terkait	9
2. Perguruan Tinggi	9
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	10
A. Kajian Teori	10
1. Partisipasi	Partisipasi
.....	10
a. Defenisi	Defenisi
Partisipasi	10
b. Tipe-tipe	Tipe-tipe
Partisipasi	17
c. Lingkup	Lingkup
Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	22
2. Dinamika	Dinamika
kelompok	24

a.		Pengertian
	Dinamika Kelompok	24
b.		Pengertian
	Kelompok	25
c.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Dinamika Kelompok	27
d.		Pembagian
	Kelompok	30
3.		Peran
	Pemimpin dan Kepemimpinan	31
a.		Peranan
	Pemimpin Kelompok	31
b.		Kepemimpinan
	34
4.		Peran Agen
	Perubahan	36
B.	Penelitian yang Relevan	39
C.		Program
	Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).....	42
D.		Pemberday
	aan Masyarakat	50
E.		Kemandiria
	n	60
F.	Kerangka Berpikir	65
G.	Hipotesis	68
BAB III METODE PENELITIAN <i>commit to user</i>		69



DAFTAR ISI
(Lanjutan)

A.	Identifikasi
Variabel dan Definisi Operasional	69
B.	Lokasi dan
Waktu Penelitian	80
C. Desain Penelitian	80
D. Populasi dan Teknik Penarikan Sample	81
1.	Populasi
.....	81
2.	Sampel
Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel	82
E. Data dan Sumber Data	84
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	84
G. Uji Instrumen Penelitian	85
1.	Uji
Validitas Instrumen	85
2.	Uji
Reliabilitas Instrumen	89
H. Teknik Analisis Data	90
1.	Uji Syarat
Analisis	91
a.	Uji Normalitas
.....	91
b.	Uji
Homogenitas	92
c.	Uji Linearitas
.....	94
d.	Uji
Autokorelasi <i>commit to user</i>	95

DAFTAR ISI

(Lanjutan)

2.		Analisis	
	Statistik Deskriptif	97	
3.		Analisis Jalur	
	98	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		101	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	101	
B.	Karakteristik dan Deskripsi Data Responden	116	
C.	Prasyarat Analisis	128	
D.	Uji Analisis Jalur	132	
A.	Pengaruh Dinamika Kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders terhadap partisipasi	132	1.
	1. Pengaruh gabungan Dinamika Kelompok, Karakteristik Program dan dukungan stakeholders terhadap partisipasi kelompok	132	
	2. Pengaruh Partial dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders terhadap partisipasi kelompok	134	
	3. Korelasi antara dinamika kelompok, karakteristik program dukungan stakeholders, dan partisipasi kelompok.....	137	
B.	Pengaruh dinamika kelompok,, karakteristik program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok terhadap kemandirian kelompok	139	2.
	1. Pengaruh gabungan dinamika kelompok, karakteristik Program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok Terhadap kemandirian kelompok	139	

2.	partial dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok terhadap kemandirian kelompok	Pengaruh 141
3.	dinamika kelompok, karakteristik program dukungan stakeholders, partisipasi kelompok terhadap kemandirian kelompok	Korelasi antara 145

DAFTAR ISI
(Lanjutan)

E.	Pembahasan	150
1.	Penilaian Responden Penelitian Terhadap Dinamika Kelompok, Karakteristik Program, Dukungan Stakeholders, Partisipasi Kelompok dan Kemandirian Kelompok	150
2.	Pengaruh Dinamika Kelompok, Karakteristik Program dan Dukungan Stakeholders Terhadap Partisipasi Kelompok	156
3.	Pengaruh Dinamika Kelompok, Karakteristik Program dan Dukungan Stakeholders Terhadap Kemandirian Kelompok	161
4.	Pengaruh Dinamika Kelompok, Karakteristik Program, Dukungan Stakeholders dan Partisipasi Kelompok Terhadap Kemandirian Kelompok	166
BAB V PENUTUP		177
A.	Kesimpulan	177
B.	Implikasi	178
C.	Saran	180
DAFTAR PUSTAKA		181
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1. Distribusi Jumlah KSM di Kelurahan Medan Baru sebagai Sampel dalam Penelitian	82
3.2. Hasil Uji Validitas Butir untuk Variabel Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2), Dukungan Stakeholders (X_3), Partisipasi Kelompok (Y_1) dan Kemandirian Kelompok (Y_2)	88
3.3. Hasil Uji Reliabilitas	90
4.1. Data kependudukan Kelurahan Kampung Baru	102
4.2. Distribusi keluarga miskin penduduk Kelurahan Kampung Baru	102
4.3. Data tingkat pendidikan di Kelurahan Kampung Baru	103
4.4. Data Sarana yang ada di Kelurahan Kampung Baru	103
4.5. Rata-rata, Kategori Skor dan Persentase Responden Penelitian	116
4.6. Distribusi Responen Berdasarkan Skor Terhadap Dinamika Kelompok (X_1)	119
4.7. Distribusi Responen Berdasarkan Skor Terhadap Sub Variabel Dinamika Kelompok (X_1)	120
4.8. Distribusi Responen Berdasarkan Skor Terhadap karakteristik	Program (X_2) 121
4.9. Distribusi Responen Berdasarkan Skor Terhadap Sub Variabel Karakteristik Program (X_2)	122
4.10. Responen Berdasarkan Skor terhadap Dukungan	Distribusi Stakeholders (X_3) 123
4.11. Responen Berdasarkan Skor Terhadap Sub Variabel Dukunga Stakeholders (X_3)	Distribusi 123
4.12. Responen Berdasarkan Skor terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)	Distribusi 124

4.13.	Responen Berdasarkan Skor Terhadap Sub Variabel Partisipasi Kelompok (Y_1)	Distribusi 125
-------	--	-------------------

DAFTAR TABEL
(Lanjutan)

4.14.	Responen Berdasarkan Skor terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)	Distribusi 126
4.15.	Responen Berdasarkan Skor Terhadap Sub Variabel Kemandirian Kelompok (Y_2)	Distribusi 127
4.16.	Perhitungan Uji Normalitas	Daftar Hasil 128
4.17.	Homogenitas	Hasil Uji 129
4.18.	Perhitungan Uji Linearitas	Daftar Hasil 130
4.19.	Perhitungan Uji Autokorelasi	Daftar Hasil 130
4.20.	Perhitungan Uji Linearitas Model 1	Daftar Hasil 133
4.21.	Analisis Jalur Faktor Dinamika kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2) dan Dukungan Stakeholders (X_3) Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)	Hasil Uji 134
4.22.	Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Dinamika Kelompok (X_1), Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)	Hasil Uji 135
4.23.	Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Karakteristik Program (X_2) Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)	Hasil Uji 136
4.24.	Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Karakteristik Program (X_2) Terhadap Partisipasi KelompoK (Y_1)	Hasil Uji 137

4.25.	Korelasi Antar Variabel Model 1	Hasil Uji 138
4.26.	Korelasi Antar Variabel Model 2	Hasil Uji 140
4.27.	Analisis Jalur Faktor Dinamika kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2), Dukungan Stakeholders (X_3) dan Partisipasi Kelompok (Y_1) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)	Hasil Uji 141
4.28.	Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Dinamika Kelompok (X_1), Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)	Hasil Uji 143
4.29.	Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Karakteristik Program (X_2), Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)	Hasil Uji 144
4.30.	Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Dukungan Stakeholders (X_3), Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)	Hasil Uji 144
DAFTAR TABEL (Lanjutan)		
4.31.	Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Partisipasi Kelompok (Y_1) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)	Hasil Uji 145
4.32.	Korelasi Antar Variabel Model 2	Hasil Uji 146
4.33.	Koefisien Jalur dan Koefisien Regresi	Daftar Nilai 147
4.34.	Pengaruh Langsung dibanding Pengaruh Tidak Langsung	Kuatnya 148

DAFTAR GAMBAR

1.		Diagram
	Konsep Kerangka Berpikir	67
2.		Daerah Kritis
	Durbin Watson	96
3.		Diagram
	Analisis	98
4.		Diagram Jalur
	Hasil Analisis Statistik	149
5.		Model
	Pengaruh Faktor Dinamika Kelompok, Karakteristik Program dan Dukungan Stakeholders terhadap Partisipasi Kelompok	157
6.		Model
	Pengaruh Faktor Dinamika Kelompok, Karakteristik Krogram dan Dukungan Stakeholders terhadap Kemandirian Kelompok	162
7.		Model
	Pengaruh Faktor Dinamika Kelompok, Karakteristik Krogram, Dukungan Stakeholders dan Partisipasi Terhadap Kemandirian Kelompok	167

DAFTAR LAMPIRAN

1. Jadwal Penelitian	186
2. Surat Izin Penelitian	188
3. Surat Pengantar Penelitian	189
4. Daftar Nama Responden Uji Instrumen	190
5. Uji Validitas Instrumen	192
6. Uji Reliabilitas Instrumen	205
7. Daftar Nama Responden Penelitian	212
8. Uji Normalitas	216
9. Uji Homogenitas	221
10. Uji Linearitas	223
11. Uji Autokorelasi	227
12. Uji Model 1 SPSS 17	230
13. Uji Model 2 SPSS 17	232
14. Uji Model 3 SPSS 17	234
15. Analisis Regresi dan Korelasi Sub Variabel X_1	236
16. Analisis Regresi dan Korelasi Sub Variabel X_2	240
17. Analisis Regresi dan Korelasi Sub Variabel X_3	243
18. Analisis Regresi dan Korelasi Sub Variabel Y_1	246
19. Analisis Regresi dan Korelasi Sub Variabel Y_2	249

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak timbulnya krisis ekonomi pada bulan Agustus 1997 yang dipicu oleh krisis moneter pertumbuhan ekonomi stagnan bahkan mengalami kemerosotan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya laju inflasi tiap tahun yang berakibat pada menurunnya taraf hidup masyarakat Indonesia yang tajam. Secara faktual kondisi ini mengimbas pada naiknya kuantitas angka kemiskinan baik meliputi pengangguran maupun penduduk miskin itu sendiri.

Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode 1996-2005 berfluktuasi dari tahun ke tahun meskipun terlihat adanya kecenderungan menurun pada periode 2000-2005. Pada periode 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi, yaitu dari 34,01 juta pada tahun 1996 menjadi 47,97 juta pada tahun 1999. Persentase penduduk miskin meningkat dari 17,47 persen menjadi 23,43 persen pada periode yang sama.

Pengamatan menunjukkan bahwa komunitas masyarakat miskin kota pada hakekatnya, berkeinginan untuk mengadakan perubahan-perubahan yang akhirnya dapat membawa perbaikan taraf hidup. Di sinilah peran agen dan pembaharu baik yang bersumber dari pemerintah seperti penyuluh maupun LSM untuk bisa menjembatani pencapaian tujuan dengan berbagai program pemberdayaan sesuai dengan sumberdaya alam, budaya dan tipe interaksi sosial dalam kelompok masyarakat tersebut.

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki

akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standard kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu.

Selain itu permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun pendekatan selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Masalah kemiskinan yang dihadapi, terutama oleh negara-negara yang sedang berkembang memang sangatlah kompleks. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional, yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya (Sumodiningrat, 1998:26). Seringkali pemikiran mengenai kemiskinan lebih banyak menekankan pada segi-segi emosional atau perasaan yang diselimuti oleh aspek moral dan kemanusiaan, ataupun masih bersifat partisan karena bersangkutan paut dengan alokasi sumber daya, sehingga usaha memahami hakekat kemiskinan itu sendiri menjadi kabur.

Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.

Pada kelompok masyarakat kota dicirikan dengan masyarakat yang sudah meninggalkan tradisi dan adat-istiadat, di sisi lain masyarakat miskin kota belum memiliki mobilitas yang tinggi dan masih terbatas akses terhadap berbagai kemajuan industrialisasi, informasi dan teknologi. Seiring dengan kondisi ini perubahan yang terjadi pada masyarakat kota berlangsung secara cepat bila dibandingkan dengan komunitas masyarakat desa. Peran dari *stakeholders* termasuk pemimpin kelompok yang ada dalam masyarakat kota menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh semua pihak maupun agen pembaharu dalam pemberdayaan kelompok swadaya masyarakat miskin kota.

Berbagai program pengentasan kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan karitas dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai *social capital* yang ada di masyarakat (gotong-royong, musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya nilai-nilai *social capital* pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama.

Akibat yang dialami dengan keadaan seperti ini adalah, usaha penanggulangan kemiskinan bersifat parsial, tidak komprehensif, serta hasil yang dicapai dari segala upaya penanggulangan tersebut menjadi tidak tepat sasaran (Suparlan, 1993). Untuk menanggulangi masalah kemiskinan diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor.

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia (Sumodiningrat, 1998).

Program yang dipilih harus berpihak dan memberdayakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan perekonomian rakyat. Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus senantiasa didasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.

Melalui kadar partisipasi dan peran aktif masyarakat yang tinggi, penguatan masyarakat sasaran program dapat terwujud. Menguatnya kemampuan masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya adalah hasil atau dampak dari semua aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Penguatan masyarakat tersebut dapat dilihat dari: (1) dimensi pemberdayaan masyarakat miskin, (2) dimensi terwujudnya kemandirian masyarakat miskin, dan (3) dimensi perekonomian rakyat.

Partisipasi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan perkotaan dapat diatasi melalui berbagai program baik melalui pemerintah, swasta maupun LSM. Salah satu program yang sedang berjalan yaitu program P2KP dimana partisipasi secara kelompok lebih ditonjolkan untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif. Kelompok keswadayaan masyarakat merupakan kelembagaan yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya sendiri. Di samping itu kelompok keswadayaan masyarakat mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama.

Pemberian modal usaha melalui program P2KP guna meningkatkan ekonomi serta memberi bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat miskin di perkotaan adalah dalam bentuk kepedulian pemerintah yang bersifat “memfasilitasi” berjalannya “proses partisipasi masyarakat”.

B. Perumusan Masalah

Dalam kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan dimana jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan bertambah banyak, maka sejak tahun 1999 pemerintah telah meluncurkan P2KP singkatan dari Proyek Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (*Urban Poverty Project*). Program ini masih berada dalam *platform* program jaring pengaman sosial (*social safety net*) dengan menitik beratkan pada upaya pemberdayaan komunitas (*community empowerment*) yang relatif berbeda dengan program JPS lainnya yang diterapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaan pengentasan masyarakat dari kemiskinan, P2KP meletakkan sasaran utamanya kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang tergolong kalangan ekonomi lemah untuk ditumbuhkan kemandiriannya. Sehingga bukan masyarakat miskin secara perseoranganlah yang akan diberdayakan, melainkan sejumlah orang dalam masyarakat yang tergabung dalam suatu wadah KSM yang dikenai tindakan (*treatment*) berupa pemberian bantuan kredit usaha ekonomi produktif.

P2KP yang dilaksanakan sejak tahun 1999 merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan pendekatan partisipatoris (*participatory approach*). Meskipun lahir setelah krisis ekonomi, P2KP tidak dirancang untuk semata-mata mengatasi kemiskinan akibat dampak krisis tersebut, namun P2KP memiliki tujuan jangka panjang untuk mewujudkan *sustainability development*. Hal ini tampak dari konsep P2KP yang menitik beratkan pada proses pemberdayaan (*community empowering*)

melalui pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan serta penguatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu melakukan proses transformasi social menuju tatanan masyarakat madani (*civil society*).

Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai tahun 2007 dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi : Program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan desa tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sector dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga akan diprioritaskan pada desa-desa tertinggal.

Keikutsertaan masyarakat dalam program P2KP untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan melalui Tridaya ini sangat penting untuk membantu masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Program P2KP yang dilaksanakan di beberapa kelompok swadaya masyarakat (KSM) di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun telah berjalan selama dua periode dengan membangkitkan daya sosial agar tercipta masyarakat efektif, membangkitkan daya lingkungan agar tercipta masyarakat pembangunan dan membangkitkan daya ekonomi agar tercipta masyarakat yang produktif, namun setelah pelaksanaan dua periode tersebut timbul keengganan dari beberapa anggota kelompok

swadaya masyarakat untuk melanjutkan program ini sehingga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Dalam usaha mendinamiskan anggota kelompok keswadayaan masyarakat miskin perkotaan di mana peran kelompok dianggap sangat penting, maka ada tuntutan yang harus dijawab : pemimpin yang bagaimana yang ideal bagi peningkatan kedinamisan masyarakat miskin perkotaan berdasarkan faktor dinamika kelompok, faktor karakteristik program, dan faktor dukungan stakeholders yang akan mempengaruhi partisipasi kelompok untuk mencapai kemandirian kelompok dalam Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP). Berpijak dari masalah ini maka pertanyaan penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok dalam mempengaruhi kemandirian kelompok pada program pengentasan kemiskinan di perkotaan (P2KP).
2. Apakah ada hubungan antara tingkat dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok dengan kemandirian kelompok pada program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP)?
3. Sejauh mana pengaruh tingkat dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok terhadap kemandirian kelompok pada program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan tingkat dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok dalam mempengaruhi kemandirian kelompok pada (P2KP).

2. Mengetahui hubungan tingkat dinamika kelompok, karakteristik program, tingkat dukungan stakeholders dan tingkat partisipasi kelompok terhadap kemandirian kelompok pada program P2KP
3. Mengetahui pengaruh tingkat dinamika kelompok, karakteristik program, tingkat dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok terhadap kemandirian kelompok pada program P2KP

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan menambah keterampilan bagi para praktisi yang berkecimpung langsung dalam pemberdayaan masyarakat, lebih khusus diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pemerintah dan pihak terkait

- (a) Memberikan masukan kepada pemerintah dalam usaha pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan dengan tidak mengabaikan partisipasi kelompok dalam pengambilan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan.
- (b) Memberikan kritikan dan saran tentang pergeseran peranan kepemimpinan kelompok pada berbagai kondisi masyarakat bagi pihak-pihak yang berkecimpung langsung sebagai agen pembaharu (pemerintah / LSM) dalam pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang.

2. Penguruan Tinggi

- (a) Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat menambah khasanah keilmuan di bidang penyuluhan pembangunan tentang pentingnya partisipasi kelompok dalam pemberdayaan masyarakat.

- (b) Memberikan kontribusi informasi awal bagi penelitian selanjutnya, dalam usaha mendapatkan model pemberdayaan kelompok yang ideal pada masyarakat miskin perkotaan melalui kajian partisipasi kelompok.
- (c) Bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui program *Community development*



BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Partisipasi

a. Defenisi Partisipasi

Margono Slamet (2003) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil *pembangunan*. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya berarti ikut menyumbangkan sesuatu input ke dalam proses pembangunan, tetapi termasuk ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Tumbuhnya partisipasi dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu: adanya kesempatan untuk membangun kesempatan dalam pembangunan, kedua adanya kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan itu, dan ketiga adanya kemauan untuk berpartisipasi.

Verhangen dalam Mardikanto (1994) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada hakikatnya sangat ditentukan oleh adanya kesadaran warga masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan Slamet (1985) menyatakan bahwa tumbuhnya partisipasi sebagai suatu tindakan yang nyata diperlukan adanya tiga prasyarat yang menyangkut kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi.

a. Kemauan

Secara psikologis kemauan partisipasi muncul oleh adanya motif intrinsik (dari dalam diri sendiri) maupun ekstrinsik (karena rangsangan,

commit to user

dorongan atau tekanan dari luar). Tumbuh dan berkembangnya kemauan partisipasi sedikitnya diperlukan sikap-sikap yang :

- (1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan,
- (2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan pada umumnya,
- (3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri,
- (4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah dan tercapainya tujuan pembangunan, dan
- (5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

b. Kemampuan

Beberapa kemampuan yang dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik, antara lain :

- (1) Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah,
- (2) Kemampuan untuk memahami kesempatan yang dapat dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan
- (3) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan serta sumber daya lain yang dimiliki.

c. Kesempatan

Berbagai kesempatan untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh :

- (1) Kemauan politik dari penguasa atau pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan,
- (2) Kesempatan untuk memperoleh informasi,
- (3) Kesempatan untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber daya,

- (4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi tepat guna, serta
- (5) Kesempatan untuk berorganisasi, termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.

Kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang menuju kualitas hidup itu dapat bermacam-macam bentuknya, antara lain adanya sumber-sumber daya alam yang dapat dikembangkan, adanya pasaran yang terbuka (prospek untuk mengembangkan sesuatu), tersedianya modal (uang, kredit), tersedianya sarana dan prasarana, terbukanya lapangan kerja pembangunan dan lain sebagainya. Sedangkan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang terbuka adalah pengertian, pengetahuan, ketrampilan, sikap mental yang menunjang dan kesehatan tubuh yang memadai, kecuali sumberdaya alam, kesempatan-kesempatan yang lain tentunya harus dapat diusahakan oleh pengelola-pengelola pembangunan yang disediakan atau dikembangkan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang merasa memerlukannya.

Kemampuan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, keterampilan dan juga sikap mental. Pengetahuan dan pengertian tentang pembangunan sesuatu sampai pada seluk-beluk pelaksanaannya sangat perlu bagi masyarakat sehingga mereka dapat cepat tanggap terhadap kesempatan yang ada. Pengetahuan tentang adanya potensi di lingkungannya yang dapat dikembangkan atau dibangun sangat penting artinya. Demikian pula pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sumberdaya alam yang ada

untuk dipadukan dengan berbagai sarana produksi lain sangat penting bagi keberhasilan masyarakat yang membangun.

Dalam melibatkan partisipasi masyarakat perlu menjadikan prinsip pertukaran dasar (*basic exchange principle*) sebagai acuan. Masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan, jika ada insentif (*reinforcement*) yang diperoleh tersebut cenderung negative dan mengakibatkan hukuman dan kerugian, maka kemungkinan besar aktivitas tersebut akan ditinggalkan. Hal ini berarti, partisipasi masyarakat mutlak membutuhkan identifikasi tentang kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat, sehingga hasil pembangunan dapat benar-benar memberikan kemanfaatan bagi mereka (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003).

Selama ini keterlibatan masyarakat dalam pembangunan hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai tenaga kasar untuk mengurangi biaya pembangunan sosial. Dengan kondisi ini peran serta masyarakat terbatas pada implementasi atau penerapan program. Masyarakat tidak dikembangkan dayanya menjadi kreatif dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang diambil dari pihak luar. Partisipasi menjadi bentuk yang pasif (Midgley, 1986).

Menurut FAO (1989) dalam Gitosaputro (2003), partisipasi mempunyai makna :

- a) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b) Partisipasi adalah “kepekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.

commit to user

- c) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- d) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.
- e) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Selanjutnya Mikkelsen (2001), Gitosaputro (2003) menambahkan bahwa ada dua makna partisipasi masyarakat dari pengalamannya melaksanakan proyek pembangunan di Kenya, yaitu partisipasi dibedakan menjadi partisipasi *transformasional* dan partisipasi *instrumental*. Partisipasi transformasional terjadi ketika partisipasi itu dipandang sebagai tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, misalnya menjadikam swadaya dan dapat berkelanjutan. Sedangkan partisipasi instrumental terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu, misalnya partisipasi masyarakat setempat dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh orang luar.

Margono Slamet (2003) mengelompokkan pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diuraikan menjadi 5 jenis, yaitu :

- a) Ikut memberi *input* proses pembangunan, menerima imbalan atas input tersebut dan ikut menikmati hasilnya,
- b) Ikut member *input* dan menikmati hasilnya,
- c) Ikut menikmati *input* dan menerima imbalan tanpa ikut menikmati hasil pembangunan secara langsung,

commit to user

- d) Menikmati/memanfaatkan hasil pembangunan tanpa ikut memberi input, dan
- e) Memberi *input* tanpa menerima imbalan dan tidak menikmati hasilnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu bentuk rasa pertanggungjawaban masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh proses komunikasi dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Oleh sebab itu, faktor penentu partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Madrie (Metylia 2007) sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor dari dalam diri individu masyarakat.

Koentjaraningrat (1980), Harahap dan Subhilhar (1998) menyatakan partisipasi masyarakat terutama masyarakat pedesaan dalam pembangunan itu sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, yaitu :

- a) Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus,
- b) Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan. Partisipasi yang ditekankan disini adalah atas dasar kemauan sendiri berdasarkan kesadaran bahwa jika dia ikut akan mempunyai manfaat.

Dari pendapat Koentjaraningrat tersebut terdapat dua sumber munculnya partisipasi yaitu partisipasi karena ada dorongan (motivasi) dari luar dan partisipasi yang munculnya dari dalam diri manusia itu sendiri. Kedua bentuk partisipasi tersebut mempunyai kekuatan masing-masing yang saling mengisi. Partisipasi dari luar dapat berupa paksaan atau rangsangan berbuat dalam pembangunan. Sedangkan partisipasi yang muncul dari dalam diri manusia itu,

tanpa ada paksaan dan rangsangan dari luar masyarakat melainkan dengan kesadaran sendiri dalam melaksanakan pembangunan.

Ndraha (1987) mengatakan bahwa dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran. Sebagai masukan artinya partisipasi masyarakat dapat berfungsi dalam 6 fase proses pembangunan, yaitu fase penerimaan informasi, fase perencanaan pembangunan, fase pelaksanaan pembangunan, fase penerima kembali hasil pembangunan dan fase penilaian pembangunan. Sedangkan sebagai keluaran artinya partisipasi berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Menurut Ndraha, Harahap dan Subhilhar (1998), partisipasi masyarakat dapat digerakkan melalui :

- a) Proyek pembangunan desa yang dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.
- b) Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- c) Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

b. Tipe-tipe Partisipasi

Ram P Yadop (Gitosaputro, 2003) menggolongkan partisipasi ke dalam 4 (empat) bentuk partisipasi, yaitu :

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan,
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan,
- 3) Partisipasi dalam menilai kemajuan-kemajuan program pembangunan, serta
- 4) Partisipasi dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Cohen dan Uphoff (Effendi, 1994) menyatakan bahwa partisipasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : (1) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, dan (3) partisipasi dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Rogers dan Shoemaker (Prayitno, 2003) mengemukakan bahwa tingkat partisipasi anggota sistem sosial dalam pengambilan keputusan berhubungan positif dengan kepuasan mereka terhadap keputusan inovasi kolektif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, maka semakin besar pula tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Berhasilnya pembangunan Nasional sebagai pengalaman Pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta sikap mental, semangat, ketaatan dan disiplin penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah didukung oleh partisipasi masyarakat dengan menggunakan teknologi yang terpilih, dengan mengacu pada visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah : “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”.

Dusseldorp dalam Slamet (1994) membuat klasifikasi dari berbagai jenis partisipasi. Klasifikasinya didasarkan pada sembilan dasar. Dalam setiap klasifikasi Dusseldorp menunjukkan dua macam partisipasi yang dipilih secara tajam.

a. Penggolongan Partisipasi Berdasarkan pada Derajat kesukarelaan

Ada dua bentuk partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela didalam suatu kegiatan partisipasi

commit to user

tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi ke dalam dua sub kategori, yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau oleh orang lain. Partisipasi terbujuk, yaitu bila seorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela di dalam aktivitas kelompok tertentu.

b. Penggolongan Partisipasi Berdasarkan pada Cara Keterlibatan

Klasifikasi partisipasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung terjadi bila diri orang itu menampilkan kegiatan tertentu di dalam proses partisipasi. Partisipasi tidak langsung terjadi bila seseorang mendelegasikan hak partisipasinya, misalnya dalam pengambilan keputusan kepada orang lain yang berikutnya dapat mewakilinya.

c. Penggolongan Partisipasi Berdasarkan pada Keterlibatan di dalam Berbagai tahap dalam Proses Pembangunan Terencana.

Ada enam langkah menurut penggolongan ini yaitu (1) perumusan tujuan, (2) penelitian, (3) persiapan rencana, (4) penerimaan rencana, (5) pelaksanaan, dan (6) penilaian.

Disebut partisipasi lengkap bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam seluruh enam tahap dari proses pembangunan terencana. Disebut partisipasi sebagian bila seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung tidak terlibat di dalam seluruh enam tahap itu. Dengan

perkataan lain, seseorang tetap dianggap berpartisipasi sebagian sekalipun dia terlibat dalam lima tahap, lebih-lebih bila kurang dari itu.

d. Penggolongan Partisipasi Berdasarkan pada Tingkatan Organisasi

Dusseldorp membedakan dua macam partisipasi menurut klasifikasi ini yaitu partisipasi yang terorganisasi dan partisipasi yang tidak terorganisasi. Partisipasi yang terorganisasi terjadi bila suatu struktur organisasi dan seperangkat tata kerja dikembangkan atau sedang dalam proses penyiapan. Organisasi yang demikian ini banyak kita temukan di pedesaan yang umumnya mengurus bidang-bidang kebutuhan dasar seperti misalnya kebutuhan air untuk irigasi (Organisasi Petani Pemakai Air/OPPA) di Daerah Istimewa Yogyakarta, Darma Tirta di Jawa Tengah, Mitra Cai di Jawa Barat, subak di Bali).

Partisipasi yang tidak terorganisasi terjadi bila orang-orang berpartisipasi hanya dalam tempo yang kadang-kadang saja yang umumnya karena keadaan yang gawat seperti misalnya terjadi kebakaran, gempa, banjir, atau bencana alam yang lain, namun bukan hanya untuk peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, tetapi juga untuk peristiwa-peristiwa yang menggembirakan yang membutuhkan perayaan seperti ulang tahun kemerdekaan, perayaan hari ibu dan sebagainya.

e. Penggolongan Partisipasi Berdasarkan pada Intensitas dan Frekuensi Kegiatan

Partisipasi intensif terjadi bila disitu ada frekuensi aktivitas partisipasi yang tinggi. Menurut Muller hal ini diukur melalui dimensi kuantitatif dari partisipasi. Partisipasi Ekstensif terjadi bila pertemuan-pertemuan diselenggarakan secara tidak teratur dan kegiatan-kegiatan atau kejadian-
commit to user

kejadian (events) yang membutuhkan partisipasi dalam interval waktu yang panjang.

f. Penggolongan Partisipasi Berdasarkan pada Lingkup Liputan Kegiatan

Penggolongannya ada dua. Pertama partisipasi tak terbatas yaitu bila seluruh kekuatan yang mempengaruhi komunitas tertentu diawasi oleh dan dijadikan sasaran kegiatan yang membutuhkan partisipasi anggota komunitas itu. Kedua adalah partisipasi terbatas, yang terjadi bila hanya sebagian kegiatan sosial, politik, administrative dan lingkungan fisik yang dapat dipengaruhi melalui kegiatan partisipasi.

g. Penggolongan Partisipasi Berdasarkan pada Efektifitas

Secara ekstrim berdasarkan pada tingkat efektifitasnya, partisipasi dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi efektif dan partisipasi tidak efektif. Partisipasi efektif yaitu kegiatan-kegiatan partisipasi yang telah menghasilkan perwujudan seluruh tujuan yang mengusahakan aktivitas partisipasi. Partisipasi tidak efektif, terjadi bila tidak satupun atau sejumlah kecil saja dari tujuan-tujuan aktivitas partisipasi yang dicanangkan terwujud.

h. Penggolongan Partisipasi Berdasarkan pada Siapa yang Terlibat

Orang-orang yang dapat berpartisipasi dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Anggota masyarakat setempat : Penduduk setempat dan pemimpin setempat
- b. Pegawai pemerintah : Penduduk dalam masyarakat dan bukan penduduk
- c. Orang-orang luar : Penduduk dalam masyarakat dan bukan penduduk
- d. Wakil-wakil masyarakat yang terpilih

i. Penggolongan Berdasarkan pada Gaya Partisipasi

Rootman membedakan tiga model praktek organisasi masyarakat. Di dalam setiap model itu terdapat perbedaan tujuan-tujuan yang dikejar dan perbedaan dalam gaya partisipasi.

- a. Pembangunan lokalitas : Model praktek organisasi masyarakat ini sama dengan pembangunan masyarakat dan maksudnya adalah melibatkan orang-orang di dalam pembangunan mereka sendiri dengan cara ini menumbuhkan energi sosial yang dapat mengarah pada kegiatan menolong diri sendiri.
- b. Perencanaan sosial: Pemerintah telah merumuskan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang berkenaan dengan perumahan, kesehatan fisik dan lain sebagainya.
- c. Aksi sosial (*sosial action*) : Tujuan utama dari tipe partisipasi ini ialah memindahkan hubungan-hubungan kekuasaan dan pencapaian terhadap sumber-sumber.

c. Lingkup Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Yadav (UNADPI, 1980) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat

dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati (tanpa penurunan kualitasnya) dalam jangka panjang.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang

masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

2. Dinamika Kelompok

a. Pengertian Dinamika Kelompok

Dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Jadi, dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota yang lain secara timbal balik dan antar anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok (*group spirit*) terus menerus berada dalam kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dinamika kelompok berarti suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologi secara jelas antar anggota yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, antar anggota kelompok mempunyai hubungan psikologi yang berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersama-sama (Santosa. 2006)

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Dinamika juga berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Keadaan ini dapat terjadi karena selama ada kelompok, semangat kelompok (*group spirit*) terus-menerus ada dalam kelompok itu, oleh karena itu kelompok tersebut bersifat dinamis, artinya setiap saat kelompok yang bersangkutan dapat berubah.

b. Pengertian kelompok

Iver dan Page (1961) mengemukakan bahwa, kelompok adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling pengaruh mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong. Pengertian serupa juga dikemukakan oleh Sherif (Gerungan, 1978) yang mengemukakan bahwa kelompok merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua atau lebih orang-orang yang mengadakan interaksi secara intensif dan teratur, sehingga di antara mereka terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan tersebut.

Karena itu, "kelompok" berbeda dengan "kerumunan" orang-orang, yang meskipun secara fisik kelihatannya bersatu, tetapi antar individu yang berada dalam kerumunan itu sebenarnya tidak ada hubungan atau interaksi apapun juga. Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Salah satu ciri terpenting dari kelompok adalah, yang menurut (Tomosoa, 1978) dikatakan sebagai suatu kesatuan sosial yang memiliki kepentingan bersama dan tujuan bersama. Tujuan tersebut dicapai melalui pola interaksi yang mantab dan masing-

masing (individu yang menjadi anggotanya) memiliki perannya sendiri-sendiri (Dahama dan Bhatnagar, 1980). Karena itu, kelompok dapat diartikan sebagai himpunan yang terdiri dari dua atau lebih individu (manusia) yang memiliki ciri-ciri:

- (a) memiliki ikatan yang nyata,
- (b) memiliki interaksi dan interrelasi sesama anggotanya,
- (c) memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas,
- (d) memiliki kaidah-kaidah atau norma tertentu yang disepakati bersama, dan
- (e) memiliki keinginan dan tujuan bersama.

Menurut W.H.Y. Sprott dalam Margono (2003) mendefinisikan kelompok sebagai beberapa orang yang bergaul satu dengan yang lain. Kurt Lewin berpendapat *"the essence of a group is not the similarity or dissimilarity of its members but their interdependence"*. H. Smith menguraikan bahwa kelompok adalah suatu unit yang terdapat beberapa individu, yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dengan kesatuannya dengan cara dan dasar kesatuan persepsi. Interaksi antar anggota kelompok dapat menimbulkan kerja sama apabila masing-masing anggota kelompok:

- (1) Mengerti akan tujuan yang dibebankan di dalam kelompok tersebut,
- (2) Adanya saling menghormati di antara anggota-anggotanya,
- (3) Adanya saling menghargai pendapat anggota lain, dan
- (4) Adanya saling keterbukaan, toleransi dan kejujuran di antara anggota kelompok.

Menurut Reitz (1977) kelompok mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- (1) Terdiri dari dua orang atau lebih, (2) Berinteraksi satu sama lain, (3) Saling *commit to user*

membagi beberapa tujuan yang sama, dan (4) Melihat dirinya sebagai suatu kelompok.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Dinamika Kelompok

1. Tujuan Kelompok

Tujuan kelompok adalah sesuatu keadaan akhir yang ingin dicapai kelompok dan kegiatan kelompok diarahkan untuk mencapainya. Tujuan kelompok merupakan unsur dinamika yang penting karena erat kaitannya dengan motivasi anggota. Tujuan yang jelas mencerminkan kebutuhan anggota akan meningkatkan motivasi para anggota dalam interaksinya dan dengan demikian meningkatkan efektifitas organisasi. Tujuan yang tidak jelas menyebabkan keaburan bagi anggota dan tidak termotivasi kegiatannya berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.

2. Struktur Kelompok

Struktur kelompok adalah pola yang sudah tetap mengenai interaksi dan koordinasi dari teknologi kerja dalam satu kelompok. Struktur kelompok mengacu pada standar perilaku yang diterapkan oleh organisasi, sistem komunikasi, imbalan dan sanksi dari organisasi. Struktur organisasi dicirikan oleh adanya jenjang-jenjang yang diberlakukan dalam organisasi, menggambarkan bagaimana organisasi mengatur dirinya sendiri, (membagi tugas), mengatur hubungan antara orang dan antar kelompok. Struktur organisasi adalah unik untuk setiap organisasi, ditetapkan oleh organisasi berdasarkan

situasi., kondisi dan kebutuhan organisasi. Struktur organisasi menyangkut otoritas atau kekuasaan dan pengaruhnya yang terkait dengan banyak hal.

3. Fungsi Tugas Kelompok

Fungsi tugas organisasi yaitu apa yang seharusnya dilakukan dalam satu organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pada dasarnya setiap organisasi perlu melakukan usaha-usaha tertentu untuk mencapai keadaan tertentu yaitu perhal tugas : memuaskan anggota, menyampaikan informasi baru, koordinasi, inisiasi, disminasi dan pemberian penjelasan kepada anggota.

4. Pemeliharaan Kelompok

Pemeliharaan kelompok merupakan salah satu faktor penentu dari kedinamisan organisasi, merupakan upaya menjaga agar organisasi tetap eksis-tetap hidup yaitu orientasi kepada (kesinambungan) kehidupan organisasi yang meliputi : partisipasi anggota, penyediaan dan pemanfaatan fasilitas, aktivitas, koordinasi, komunikasi, norma dan standar, sosialisasi dan mendapatkan anggota baru.

5. Kekompakan Kelompok

Kekompakan kelompok adalah kesatuan organisasi dipengaruhi oleh besarnya tanggungjawab (*commitment*) dari para anggotanya. Kekompakan organisasi tercipta dengan adanya rasa keterikatan yang kuat diantara para anggotanya terhadap organisasi. Kekompakan organisasi ditentukan oleh beberapa faktor seperti kepemimpinan, keanggotaan, nilai tujuan, homogenitas, integrasi, kerjasama dan besarnya organisasi.

6. Iklim Kelompok

Iklm organisasi atau suasana organisasi adalah keadaan moral, sikap dan perasaan-perasaan yang umumnya terdapat dalam satu organisasi. Hal ini terlihat pada para anggota, apakah mereka bersemangat atau apatis terhadap kegiatan dan kehidupan organisasinya. Apabila para anggota bersemangat, organisasi akan menjadi dinamis. Iklm organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor tegangan (*tension*), keramahmatan, kelonggaran (*permissiveness*) dan lingkungan fisik yang baik.

7. Tekanan pada Kelompok

Tekanan (*pressure*) pada organisasi adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketegangan dalam organisasi. Adanya ketegangan dibutuhkan untuk kedinamisan organisasi. Namun demikian ketegangan yang terlalu tinggi atau ketegangan yang terlalu rendah dapat mematikan dinamika organisasi. Tekanan perlu sedemikian rupa untuk meningkatkan motivasi dalam melakukan aktivitas sehingga aktivitas dan dinamika organisasi naik. Tekanan dapat bersumber dari dalam organisasi sendiri dan juga dari luar organisasi.

8. Efektifitas Kelompok

Efektifitas kelompok dapat diukur dari tercapainya tujuan organisasi dan besarnya kepuasan anggota setelah tujuan tercapai. Semakin sempurna tujuan organisasi tercapai, dapat dikatakan organisasi semakin efektif dan dinamikanya semakin tinggi.

9. Agenda Terselubung

Agenda terselubung atau maksud terselubung adalah tujuan yang dirumuskan oleh pengurus atau anggota namun tidak tertulis tetapi diharapkan

akan tercapai. Agenda terselubung penting artinya bagi organisasi dan dinamika organisasi, mengabaikan tidak akan menolong.

d. Pembagian Kelompok

Dilihat dari tujuan bersama yang ingin dicapai, dikenal adanya dua macam kelompok, yaitu kelompok sosial (*sosial group*) dan kelompok tugas (*task group*). Tentang hal ini, Bertrand mengemukakan bahwa kelompok sosial lebih menekankan kepada tujuan pemenuhan fungsi-fungsi sosial seperti: keagamaan, hobby, gotong-royong, kesenian, dll. Sedang kelompok tugas lebih menekankan kepada pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang harus diselesaikan dengan baik selama jangka waktu tertentu, seperti: kepanitiaan, kelompok SAR, Tim Perumus, kelompok formatur, dan lain-lain (Miles, 1959).

Ciri lain yang membedakan antara kelompok sosial dan kelompok tugas adalah: kelompok sosial akan tetap bertahan keberadaannya, meskipun ada salah satu tugas yang telah terselesaikan; sedang kelompok tugas, seringkali segera bubar/dibubarkan jika tugas tunggal yang dibebankan itu telah terselesaikan. Sehingga, keterikatan anggota dalam kelompok tugas hanya terbatas pada adanya tugas khusus yang harus diselesaikan, sedang pada kelompok sosial, keterikatan kepada kelompok itu seringkali berlangsung sumur hidup, kecuali jika memang merasa sudah tidak ada persesuaian dalam hubungan sosialnya (Mardikanto, 2009).

3. Peran Pemimpin dan Kepemimpinan

a. Peranan Pemimpin kelompok

Seorang pemimpin harus dapat melakukan sesuatu bagi anggotanya sesuai dengan jenis kelompok yang dipimpinnya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemimpin untuk dapat mendinamiskan kelompok yaitu: (1) mengidentifikasi dan menganalisis kelompok beserta tujuannya, (2) membangun struktur kelompok, (3) inisiatif, (4) usaha pencapaian tujuan, (5) mempermudah komunikasi dalam kelompok, (6) mempersatukan anggota kelompok, dan (6) mengimplementasikan filosofi (Slamet, 2002).

Robinson dalam (Ginting 1999) Para ahli mengemukakan bahwa peranan yang perlu ditampilkan pemimpin adalah: (1) mencetuskan ide atau sebagai seorang kepala, (2) memberi informasi, (3) sebagai seorang perencana, (4) memberi sugesti, (5) mengaktifkan anggota, (6) mengawasi kegiatan, (7) memberi semangat untuk mencapai tujuan, (8) sebagai katalisator, (9) mewakili kelompok, (10) member tanggung jawab, (11) menciptakan rasa aman dan (12) sebagai ahli dalam bidang yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin kelompok, seseorang harus berperan mendorong anggota beraktivitas sambil memberi sugesti dan semangat agar tujuan dapat tercapai. Segala masukan yang datang dari luar, baik berupa ide atau gagasan, tekanan-tekanan, maupun berupa materi, semuanya harus diproses di bawah koordinasi pemimpin. Untuk ini, pemimpin perlu berperan: (1) sebagai penggerak (aktivator), (2) sebagai pengawas, (3) sebagai martir, (4) sebagai pemberi semangat/kegembiraan, dan (5) sebagai pemberi tanggung jawab kepada anggota.

Menurut Covey dalam (Kris Yuliani H 2002: 6) ada tiga peranan pemimpin dalam kelompok/organisasi antara lain

1. *Pathfinding* (pencarian alur), mengandung sistem nilai dan visi dengan kebutuhan pelanggan melalui suatu perencanaan strategis yang disebut *the strategic pathway* (jalur strategi).
2. *Aligning* (penyelarasan), upaya memastikan bahwa struktur, sistem dan operasional organisasi memberi dukungan pada pencapaian visi dan misi dalam memenuhi kebutuhan - pelanggan dan pemegang saham lain yang terlibat.
3. *Empowerment* (pemberdayaan), suatu semangat yang digerakkan dalam diri orang-orang yang mengungkapkan bakat, kecerdikan dan kreativitas laten, untuk mampu mengerjakan apapun dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang disepakati untuk mencapai nilai, visi dan misi bersama dalam melayani kebutuhan pelanggan dan pemegang saham lain yang terlibat.

Peranan pemimpin kelompok yang sangat perlu dilaksanakan oleh seorang pemimpin kelompok, yaitu: (1) Membantu kelompok dalam mencapai tujuannya, (2) Memungkinkan para anggota memenuhi kebutuhan, (3) Mewujudkan nilai kelompok, (4) Merupakan pilihan para anggota kelompok untuk mewakili pendapat mereka dalam interaksi dengan pemimpin kelompok lain, (5) Merupakan seorang fasilitator yang dapat menyelesaikan konflik kelompok dengan pihak-pihak di luar organisasi, (6) pimpinan selaku komunikator yang efektif, (6) Mediator yang handal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani situasi konflik, (7) pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral (Sulaksana 2002: 7).

Pada hakekatnya peranan pemimpin perlu disesuaikan dengan ciri khas dari kelompok atau komunitas. Peranan pemimpin pada kelompok swadaya
commit to user

masyarakat miskin kota yaitu dilihat dari: (1) peranan pemimpin dalam memotivasi anggotadalam berusaha, (2) peranan pemimpin sebagai penghubung dengan pihak P2KP, (3) peranan pemimpin dalam membantu mengembangkan ketrampilan anggota, (4) peranan pemimpin dalam menjaga kekompakan kelompok, (5) peranan pemimpin dalam mengembangkan wawasan anggota, (6) peranan pemimpin dalam membantu anggota memasarkan hasil produksi, (7) peranan pemimpin sebagai penghubung dengn pihak lain untuk kelancaran usaha, dan (8) peranan pemimpindalam menjabarkan ide-ide pengembangan usaha.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan telah didefenisikan dalam kaitannya dengan cirri-ciri individual, perilaku, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan peran, tempatnya pada suatu posisi administrative, serta persepsi oleh orang lain mengenai keabsahan dan pengaruh.

Gary Yulk 1994, mengungkapkan beberapa defenisi yang dapat dianggap cukup mewakili selama seperempat abad adalah sebagai berikut :

- a. Kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama (*shared good*).
- b. Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, serta diarahkan melalui proses komunikasi, kearah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu.

Slamet (2002) menyebutkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi pada umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya
commit to user

dikemukakan oleh Slamet (2002: 30) bahwa kepemimpinan penting dalam kehidupan bersama dan kepemimpinan itu hanya melekat pada orang dan kepemimpinan itu harus mengena kepada orang yang dipimpinnya. Hal ini berarti harus diakui secara timbal balik, misalnya sasaran yang dipimpin harus mengakui bahwa orang tersebut adalah pemimpinnya.

Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mempengaruhi pengikut bukan dengan paksaan untuk memotivasi orang mencapai tujuan tertentu. Kemampuan mempengaruhi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dari para anggotanya (Gibson, 1986)

Hubungan pemimpin dengan anggota berkaitan dengan derajat kualitas emosi dari hubungan tersebut, yang mencakup tingkat keakraban dan penerimaan anggota terhadap pemimpinnya. Semakin yakin dan percaya anggota kepada pemimpinnya, semakin efektif kelompok dalam mencapai tujuannya. Dalam hubungan pemimpin dengan anggotanya perlu diperhatikan antisipasi kepuasan anggota dan harus dipadukan dengan tujuan kelompok, motivasi anggota dipertahankan tinggi, kematangan anggota dalam pengambilan keputusan dan adanya tekad yang kuat dalam mencapai tujuan (Slamet, 2002).

Faktor-faktor penting yang terdapat dalam pengertian kepemimpinan: (1) pendayagunaan pengaruh, (2) hubungan antar manusia, (3) proses komunikasi dan (4) pencapaian suatu tujuan. Kepemimpinan tergantung pada kuatnya pengaruh yang diberi serta intensitas hubungan antara pemimpin dengan pengikut (Ginting, 1999)

Siagian S (1999) ada tiga macam gaya kepemimpinan, yaitu:

- a. *Demokratis*, yaitu gaya kepemimpinan yang mengarah kepada pengambilan keputusan sebagai keputusan bersama dari seluruh anggota sistem sosial yang bersangkutan.
- b. *Otokrasi* yaitu gaya kepemimpinan yang mengarah kepada pengambilan keputusan tergantung kepada pemimpinnya sendiri.
- c. *Laissez faire*, yaitu gaya kepemimpinan yang menyerahkan pengambilan keputusan kepada masing-masing anggota sistem sosial itu sendiri.

Gaya kepemimpinan yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat tergantung pada situasi yang terdapat pada kelompok/ masyarakat tersebut. Dalam situasi yang sangat menguntungkan atau sangat tidak menguntungkan cenderung gaya kepemimpinannya bersifat otoriter. Pada situasi dimana hubungan antara anggota dengan pemimpinnya sedang-sedang saja atau anggota kelompok sangat dipentingkan maka gaya kepemimpinan lebih diarahkan pada gaya kepemimpinan demokratis.

4. Peran Agen Perubahan

Nasution (1995) mengemukakan bahwa peranan agen perubahan dapat dilihat pada tiga perspektif, yaitu :

1. Sebagai penggerak, peranan agen-agen perubahan meliputi fungsi-fungsi :
 - a. Fasilitator, fasilitator adalah seseorang yang membangkitkan motivasi dengan memprakarsai pengenalan hal-hal baru yang berkembang dan keinginan masyarakat, agar masyarakat bergerak serta mempengaruhi mereka melalui advis dan petunjuk-petunjuk.

- b. Penganalisa, sebagai penganalisa ia melakukan identifikasi atas alternative-alternatif yang dikemukakan oleh masyarakat atau pemberi masukan (input) bagi tenaga ahli dalam menganalisa.
 - c. Pengembang kepemimpinan, seorang agen perubahan berfungsi melakukan identifikasi, melatih, mengorganisir, serta meningkatkan kemampuan pemimpin-pemimpin setempat, mengokohkan status mereka di tengah masyarakat, sebagai suatu usaha untuk membina kesinambungan dalam proses pembangunan.
2. Sebagai perantara meliputi fungsi-fungsi :
- a. Pemberi informasi, fungsi pemberi informasi dilakukan dalam bentuk : memperkenalkan fakta-fakta, menghubungkan klien dengan nara sumber, menyiapkan bahan dan peralatan pendidikan, melaksanakan studi dan mendatangkan teknis (*technical know*) bagi masyarakat setempat pada saat yang sama.
 - b. Penghubung, fungsi penghubung dimaksudkan untuk menjembatani masyarakat setempat dengan tenaga ahli atau spesialis, system kemsyarakatan, para perumus kebijakan, dan pihak-pihak lain.
3. Sebagai pencapai hasil, meliputi fungsi-fungsi :
- a. Pengorganisir, fungsi organisir dilaksanakan agar kegiatan dapat dilaksanakan, mengadakan perbaikan, dan menjaga agar kegiatan tetap dalam konteks pembangunan yang direncanakan.
 - b. Pengevaluasi, fungsi pengevaluasi dilaksanakan dengan mempersiapkan basis untuk mengevaluasi alternative-alternatif melalui pengetahuan yang lebih luas, berbarengan dengan evaluasi terhadap proses yang berlangsung nyata,
commit to user

berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat dan hasil yang telah dicapai.

- c. Yang memantapkan hasil, dalam peranannya sebagai yang memantapkan hasil yang dicapai dimaksudkan untuk member “imbalan” terhadap penampilan hasil yang telah ada.

Peran pendamping sangat penting dalam memperlancar proses dialog antara individu dalam kelompok karena proses pemberdayaan mementingkan pematihan dari relasi subjek dan objek., maka pendamping tidak berfungsi sebagai orang yang mengajari, atau menggurui individu dalam kelompok, tetapi ikut berfungsi sebagai stimulator atau pemicu diskusi. Ia harus bersikap netral dan tidak berhak mencampuri keputusan dari hasil diskusi (Moeljarto dalam Priyono dan Pranaka, 1996).

Apabila peran serta masyarakat meningkat efektifitasnya, maka hal itu berarti upaya pemberdayaan masyarakat telah dijalankan. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan produktifitas melalui pengembangan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Upaya ini memerlukan adanya kerjasama yang sinergis dari berbagai kekuatan pembangunan yang ada.

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat sebagai berikut :

- a. Belajar dari masyarakat. Prinsip yang paling mendasar adalah pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang berasal dari, oleh dan untuk masyarakat. Ini berarti, pemberdayaan dibangun atas pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi

pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya.

- b. Pendamping sebagai fasilitator, masyarakat sebagai pelaku. Konsekuensi dari prinsip pertama adalah pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta kesediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan.
- c. Saling belajar, saling berbagi pengalaman. Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa selamanya masyarakat benar dan dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah yang berkembang (Karsidi dalam Slamet, 2003)

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan desa yang dilaksanakan di Desa Pandem Kecamatan Junrejo Kabupaten Malang (Eny Rachyuningsih, 2001) menyimpulkan bahwa masyarakat desa Pandem ditinjau dari aspek sosial ekonomi sebagai masyarakat berada di tahapan kelompok prasejahtera dan kelompok sejahtera I. Berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang ternyata banyak menciptakan masalah bagi masyarakat lokal walaupun demikian ternyata sebagian masyarakat masih mengharapkan peran

pemerintah utamanya dalam kebijakan-kebijakan makro yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat pedesaan.

Haidir, 2006 meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di kawasan Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar menyimpulkan bahwa kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan pada masyarakat untuk merencanakan pembangunan desa secara partisipatif akan membawa masyarakat mandiri dalam menyelesaikan berbagai pokok permasalahan yang ada disekitarnya. Melalui proses perencanaan yang dilakukan secara partisipatif telah meningkatkan tingkat efektifitas pembangunan masyarakat yang bermanfaat dan berhasilguna. Kesempatan yang telah diberikan pada perempuan untuk berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan desa, telah memberikan hak dan kesempatan yang sama pada perempuan dalam meningkatkan keberhasilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Perempuan telah berpartisipasi aktif dalam pemetaan sosial, menggali gagasan, menentukan prioritas usulan dalam musyawarah pembangunan desa, menginformasikan hasil keputusan musyawarah dan pengadministrasian.

Ramli, 2007 meneliti tentang proses partisipasi masyarakat dalam proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan di Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo menyimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam merencanakan P2KP dalam bidang fisik, ekonomi, dan monitoring telah diwujudkan dalam kegiatan yang nyata berupa ikut sertanya warga dalam menyusun rencana-rencana kerja membuat refleksi kemiskinan dan ikut menentukan kondisi masyarakat yang ada dengan melalui rapat-rapat yang dilakukan oleh BKM dan partisipasi lainnya dalam proses perencanaan dalam menentukan program yang harus dikembangkan. Partisipasi lain juga aktif dalam pelaksanaan program dimana unit pengelola

commit to user

lingkungan telah mampu melaksanakan pembangunan dibidang lingkungan fisik, ekonomi, dan juga pembangunan dibidang sosial. Selain dalam perencanaan dan pelaksanaan masyarakat Langenharjo juga aktif berpartisipasi dalam melakukan evaluasi terhadap P2KP secara nyata telah diwujudkan oleh warga masyarakat dalam menyusun pelaporan, yang mana dalam menyusun laporan hasil pelaksanaan proyek masyarakat selalu ikut terlibat, sehingga secara langsung warga masyarakat dapat mengawasi jalannya pengawasan pelaksanaan proyek.

Berbagai studi dan penelitian tentang kemiskinan diketahui bahwa kemiskinan bukanlah semata-mata karena kurangnya pendapatan seseorang/keluarga dalam mencukupi kebutuhannya, tapi berkait membentuk siklus yang dikenal sebagai lingkaran perangkap kemiskinan. Lingkaran kemiskinan itu memberikan gambaran bahwa upaya pengentasan kemiskinan memang perlu upaya yang simultan dan komprehensif. Berbagai studi dan penelitian tentang kemiskinan diketahui bahwa kemiskinan bukanlah semata-mata karena kurangnya pendapatan seseorang/keluarga dalam mencukupi kebutuhannya, tapi berkait membentuk siklus yang dikenal sebagai lingkaran perangkap kemiskinan. Lingkaran kemiskinan itu memberikan gambaran bahwa upaya pengentasan kemiskinan memang perlu upaya yang simultan dan komprehensif. Sebagaimana terlihat bahwa pendapatan yang rendah akan mengakibatkan tingkat pendidikan yang mampu diraih juga rendah. Akibatnya pemahaman akan pola hidup sehat juga kurang, sehingga tingkat kesehatannya pun juga rendah.

C. Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya malas bekerja keras. Keseluruhan situasi yang menyebabkan seseorang tidak dapat
commit to user

melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan. Faktor-faktor kemiskinan adalah gabungan antara faktor internal dan faktor eksternal. Kebijakan pembangunan yang keliru termasuk dalam faktor eksternal. Korupsi yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk suatu kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk faktor eksternal.

Keterbatasan wawasan, kurangnya ketrampilan, kesehatan yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya merupakan faktor internal. Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal juga. Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat. Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya, rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) adalah akibat dari kurangnya pendidikan. Hal yang terakhir ini juga pada gilirannya merupakan akibat dari kurangnya pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari keterbatasan lapangan kerja dan seterusnya berputar-putar dalam proses saling terkait

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan merupakan prakarsa dari pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan di perkotaan, yang dirancang dengan pengertian bahwa untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan diperlukan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu upaya-upaya tertentu yang harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, terutama di tingkat kelurahan. Upaya tersebut meliputi pula penyediaan dan penyiapan sumberdaya yang cukup, memindahkan pembuatan keputusan dan tanggungjawab ke tangan masyarakat sendiri sekaligus untuk meningkatkan dan meningkatkan kepercayaan dan transparansi.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*sosial capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

P2KP menekankan pada pemberdayaan komunitas dalam jangka panjang melalui perbaikan peran dan tanggungjawab dalam menemukan tuntutan kebutuhan merumuskan langkah-langkah penanganannya dan melaksanakannya. Selain itu juga memberi bantuan modal usaha bagi peningkatan ekonomi dan bantuan sarana dan prasana dasar bagi kelompok masyarakat miskin di perkotaan. Dalam konteks ini, peran pemerintah lebih ditekankan pada upaya fasilitas proses dengan memberikan bantuan penyediaan sumberdaya yang memadai (dana dan bantuan teknik) agar terbentuk suatu situasi yang kondusif.

Bentuk dari pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bantuan teknik berupa pendampingan kepada masyarakat dalam rangka membantu pembentukan kelembagaan masyarakat dan melakukan upaya bagi peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan ekonomi, perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia,

sehingga dapat melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap berbagai penyebab permasalahan kemiskinan yang dihadapi.

- b. Memberikan bantuan dana kepada masyarakat miskin yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, baik yang bersifat bergulir maupun yang sifatnya hibah.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan memiliki sifat dan konsep dasar yang berbeda dengan program lainnya. P2KP adalah program yang mengutamakan pada penguatan kelembagaan masyarakat agar menjamin peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif.

Melalui partisipasi aktif tersebut, masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi objek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling sesuai bagi mereka dalam memutuskan, menjalankan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan program. Dengan demikian, apakah program ini akan terus berlanjut atau terhenti, akan sangat ditentukan oleh tekad dan komitmen masyarakat sendiri.

Mencermati substansi pokok pemikiran tersebut di atas, perlu diperhatikan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dipahami betul sebagai “nafas” dari P2KP yang terdiri dari nilai-nilai dasar P2KP serta Visi-Misi P2KP. Keseluruhan hal tersebut melandasi tersusunnya rumusan “tujuan umum dan tujuan pokok P2KP serta operasionalisasi konsep pelaksanaannya dalam bentuk penetapan sasaran kegiatan P2KP.

Visi P2KP adalah mewujudkan masyarakat yang mampu menanggulangi kemiskinan yang mereka alami secara mandiri dan berkelanjutan. Ciri-ciri masyarakat sedemikian adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan alam mengidentifikasi persoalan yang dihadapi bersama, baik yang sudah terlibat maupun yang diperkirakan akan terjadi, serta merumuskan siasat penanggulangan secara bersama;
- b. Mempunyai kemampuan mengkoordinasikan diri, sebagai salah satu cara dalam menanggulangi persoalan bersama;
- c. Mempunyai kemampuan mengembangkan aturan main merumuskan alternative jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sedangkan misi P2KP adalah memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam menanggulangi kemiskinannya, sehingga melalui pelaksanaan program ini diharapkan akan dapat dicapai masyarakat yang mampu melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, merumuskan serta menetapkan prioritas;
- b. Mampu merumuskan alternatif jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- c. Mampu mengorganisasikan diri, sebagai salah satu cara penggulangan permasalahan secara bersama.
- d. Mampu mengembangkan aturan main, nilai, norma yang disusun, disepakati serta dipatuhi bersama.
- e. Mampu memperluas kerja sama serta mampu menjalin kemitraan yang setara.

Tujuan program penanggulangan kemiskinan melalui program P2KP adalah mengakomodasi kebutuhan masyarakat menyangkut berbagi permasalahan berkenaan

dengan penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan dalam program tridaya (pemberdayaan sarana dan prasarana/ fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi).

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representative dan dipercaya tersebut (secara generik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai potensi modal sosial (*social capital*) kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip yang Melandasi P2KP

Sejalan dengan substansi konsep Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bahwa persoalan kemiskinan dapat ditanggulangi dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang melandasi nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan yang bersifat universal dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka rumusan nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut :

Nilai-nilai Universal Kemanusiaan (Gerakan Moral)

Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP (baik masyarakat, konsultan, maupun pemerintah) dalam melaksanakan P2KP adalah:

- a. **Jujur;** dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana serta pelaksanaan kegiatan P2KP harus dilakukan dengan jujur, sehingga tidak dibenarkan adanya upaya-upaya untuk mereayasa, memanipulasi maupun menutup-nutupi sesuatu, yang dapat merugikan masyarakat miskin serta menyimpang dari visi, misi dan tujuan P2KP.

- b. **Dapat dipercaya;** semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan P2KP harus benar-benar dapat menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat maupun pemerintah untuk menerapkan aturan main P2KP ditingkat masyarakat pun, harus menghasilkan figure-figur yang benar-benar dipercaya masyarakat sendiri, bukan semata mempertimbangkan status sosial, pengalaman serta jabatan.
- c. **Ikhlas/kerelawanan;** dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan P2KP benar-benar berdasarkan niat ikhlas untuk turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada diwilayahnya, dan tidak mengharapkan imbalan materi, jasa, maupun mengutamakan kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya.
- d. **Adil;** dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan P2KP harus menekankan azas keadilan (*fairness*), kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin. Kedilan dalam hal ini tidak berarti sekedar pemerataan.
- e. **Kesetaraan;** dalam pelibatan masyarakat pada pelaksanaan dan pemanfaatan P2KP, tidak membeda-bedakan latar belakang, asal usul, agama, status, maupun jenis kelamin dan lain-lainnya. Semua pihak diberi kesempatan yang sama untuk terlibat dan/ atau menerima manfaat P2KP termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
- f. **Kesatuan dalam keragaman;** dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dioptimalkan gerakan masyarakat, melalui kebersamaan dan kesatuan masyarakat, sehingga kemiskinan benar-benar menjadi urusan semua warga masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, agama, mata pencaharian, budaya, pendidikan dan sebagainya dan bukan hanya menjadi urusan dari masyarakat miskin atau pelaku P2KP atau sekelompok elit saja.

Prinsip-prinsip Universal Kemasyarakatan (*Good Governance*)

Prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (*Good Governance*) yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP (baik masyarakat, konsultan, maupun pemerintah) dalam melaksanakan P2KP adalah :

- a. **Demokrasi**; dalam setiap proses pengambilan keputusan apapun, musyawarah harus menjadi alat terkuat dan pilar utama dalam menjalankan suatu proses demokrasi terlebih lagi apabila dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, maka mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan demokratis, dengan mengutamakan musyawarah.
- b. **Partisipasi**; dalam tiap langkah kegiatan P2KP harus dilakukan secara partisipatif sehingga mampu membangun rasa kepedulian dan kepemilikan serta proses belajar melalui bekerja sama. Partisipasi dibangun dengan menekankan proses pengambilan keputusan oleh warga, mulai dari tataran ide/gagasan, perencanaan, pengorganisasian, pemupukan sumberdaya, pelaksanaan hingga evaluasi dan pemeliharaan.
- c. **Transparansi dan Akuntabilitas**; dalam proses manajemen program maupun manajemen organisasi masyarakat harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggungjawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya.
- d. **Desentralisasi**; dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut kehidupan masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaat atau

diserahkan pada masyarakat sendiri, sehingga keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi karena sasaran utamanya adalah kemandirian masyarakat. Hikmat (2006) mengemukakan bahwa orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Conny R. Semiawan dan Soedijarto (1991) mengutip telaah Kantor Menteri Negara KLH bahwa kemandirian memiliki lima komponen utama, yaitu:

- a. Bebas, yakni tumbuhnya tindakan atas kehendak sendiri dan bukan karena orang lain, bahkan tidak bergantung pada orang lain,
- b. Progresif dan ulet, seperti tampak pada usaha mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan, dan mewujudkan harapan-harapan,
- c. Berinisiatif, yakni mampu berpikir dan bertindak secara orisinal, kreatif, dan penuh inisiatif,
- d. Pengendalian diri dari dalam (*internal locus of control*), yakni kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakannya serta kemampuan memengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri, dan
- e. Kemantapan diri (*self esteem, self confidence*), mencakup aspek percaya kepada diri sendiri dan memperoleh kepuasan atas usaha sendiri.

D. Pemberdayaan Masyarakat

commit to user

Defenisi pemberdayaan menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Agnes Sunartiningsih, (2004) mengungkapkan bahwa kata empower mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority* atau bisa diartikan sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Pengertian ke dua *to give ability to or enable* diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan dan keberdayaan. Dalam pembangunan ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan, pendekatan kesamaan, pendekatan anti kemiskinan, pendekatan efisiensi dan yang terakhir yang lahir dari ketidakpuasan terhadap pendekatan-pendekatan sebelumnya adalah pendekatan pemberdayaan.

Menurut Karwur, (2007) pengembangan masyarakat dapat ditinjau dari sisi proses, metode, program, gerakan, sistem dan bidang studi. Pengembangan masyarakat (PM) adalah pendekatan yang sangat peduli terhadap pendamping dan pengembangan manusia dengan menggunakan secara efektif baik inisiatif maupun energy lokal dalam rangka memperkembangkan produktivitas dan standard kehidupan menjadi lebih baik. Jadi pengembangan masyarakat adalah kegiatan/aksi sosial untuk menempatkan manusia/masyarakat sehingga dapat :

1. Mengorganisir untuk dapat merencanakan dan berkegiatan,
2. Mendefenisikan/merumuskan kebutuhan dari problem individual dan umum,
3. Membentuk kelompok dan perencanaan sendiri sehingga mampu menjawab kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang ada,
4. Mengoptimalisasikan kemampuan, inisiatif dan energy yang dimiliki, dan
5. Menjalani kerjasama dengan kelompok lain.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses kapasitas atau pengembangan sumberdaya manusia. Dengan kapasitas maka seseorang akan memiliki kekuatan (daya) atau kewenangan yang diakui secara legal sehingga orang tersebut tidak termarginalisasi. Dengan kapasitas seseorang dapat memiliki kemandirian, menghilangkan sikap ketergantungan, menghilangkan perasaan terpinggirkan, membutuhkan sikap proaktif, dinamis, terbuka dan bertanggungjawab dalam mengatasi semua masalah dan menjawab semua tantangan dalam mencapai kemajuan (Patmowiharjo Soedijanto, 1996).

Menurut Paul (1987) pemberdayaan ialah merupakan proses yang aktif dan kreatif dengan melihat keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi. Menurut Moeljanto dalam Prijono dan Pranaka (1996) pemberdayaan merupakan proses pematihan atau breakdown dari hubungan atau relasi antara subjek dengan objek. Proses ini mementingkan adanya pengakuan subjek atau kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya dari subjek ke objek. Pemberian kuasa, kebebasan dan pengakuan dari subjek ke objek dengan memberinya kesempatan untuk meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada merupakan salah satu manifestasi mengalirnya daya tersebut. Pada akhirnya kemampuan individu miskin untuk mewujudkan harapannya dengan diberinya pengakuan oleh subjek merupakan bukti bahwa individu tersebut mempunyai daya. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek yang baru, sehingga relasi sosial yang ada nantinya akan dicirikan dengan relasi antar subjek yang lain. Proses pemberdayaan mengubah pola relasi lama subjek menjadi objek.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Indonesia yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, dari sudut pandang kita pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dan kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan teknologi pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta ketrampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi rumusan-rumusan kegiatan yang nyata (Wrihatnolo dan Dwijowijoto, 2007)

Margono Slamet (2000) menegaskan bahwa *pemberdayaan masyarakat, merupakan ungkapan lain dari tujuan penyuluhan pembangunan, yaitu untuk mengembangkan masyarakat (petani) menjadi sumber daya manusia yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, tidak tergantung pada “belas kasih” pihak lain. Melalui penyuluhan, masyarakat penerima manfaatnya mendapatkan alternatif dan mampu serta memiliki kebebasan untuk memilih alternatif yang terbaik bagi dirinya. Penyuluhan sebagai proses pemberdayaan, akan menghasilkan masyarakat yang dinamis dan progresif secara berkelanjutan, sebab didasari oleh adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam diri mereka.*

Keberdayaan masyarakat, adalah unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat mampu bertahan (*survive*) dan (dalam pengertian yang dinamis) mampu *commit to user*

mengembangkan diri untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu, memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk (terus menerus) meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat “bawah” yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah *meningkatkan kemampuan dan meningka-kan kemandirian* masyarakat. Sejalan dengan itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan masyarakat (miskin) untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengendalikan kelembagaan masyarakatnya secara bertanggungjawab (*accountable*) demi perbaikan kehidupannya (Mardikanto, 2009).

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menguraikan bahwa pemberdayaan diterjemahkan dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang juga bermakna “pemberian kekuasaan” karena *power* bukan sekadar “daya” tetapi juga “kekuasaan”, sehingga kata “daya” tidak saja bermakna ‘mampu’ tetapi juga “mempunyai kuasa”. Zubaedi (2007) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Selanjutnya Zubaedi (2007) mengutip pernyataan Eddy Ch Papilaya mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah “proses menjadi” bukan “proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan: penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.

Empowerment atau pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin)

untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) alternatif perbaikan kehidupan yang terbaik . Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana guna meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan. Dasar pemikiran suatu obyek atau target group perlu diberdayakan karena obyek tersebut mempunyai keterbatasan, ketidakberdayaan, keterbelakangan dan kebodohan dari berbagai aspek. Oleh karenanya guna mengupayakan kesetaraan serta untuk mengurangi kesenjangan diperlukan upaya merevitalisasi untuk mengoptimalkan utilitas melalui penambahan nilai.

Penambahan nilai ini dapat mencakup pada ruang bidang aspek sosial, ekonomi, kesehatan, politik dan budaya. Tentang hal ini, World Bank (2001) memberikan beberapa alternatif dalam fasilitasi pemberdayaan (*facilitating empowerment*) yang dapat dilakukan pemerintah, melalui:

- 1) Basis politik dan hukum yang transparan, serta memberikan ruang gerak bagai demokratisasi dan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan, dan pemantauan implementasi kegiatan,
- 2) Peningkatan pertumbuhan dan pemerataan administrasi publik yang bertanggung-gugat (*accountability*) dan responsif terhadap penggunaanya,
- 3) Menggerakkan desentralisasi dan pengembangan-masyarakat yang memberikan kesempatan kepada “kelompok miskin” untuk melakukan kontrol terhadap semua bentuk layanan yang dilaksanakan. Desentralisasi itu sendiri harus mampu bekerjasama dengan mekanisme lain untuk menggerakkan partisipasi serta pemantauan lembaga pemerintah oleh setiap warga negara,

- 4) Menggerakkan kesetaraan gender, baik dalam kegiatan ekonomi maupun dalam kelembagaan politik,
- 5) Memerangi hambatan-sosial (*sosial barrier*), terutama yang menyangkut bias-bias etnis, rasial, dan gender dalam penegakan hukum, dan
- 6) Mendukung *modal-sosial* yang dimiliki kelompok-miskin, terutama dukungan terciptanya jejaring agar mereka keluar dari kemiskinannya.

Dalam hubungan ini, lembaga pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas kelompok miskin terhadap: organisasi-perantara, pasar global, dan lembaga-lembaga publik.

Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) atau penanggulangan kemiskinan (*poverty reduction*). Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (*income generating*).

Pemahaman seperti itu tidaklah salah, tetapi belum cukup. Sebab hakekat dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat (setempat) untuk dengan atau tanpa dukungan pihak luar mengembangkan *kemandiriannya* demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik dan mental) secara berkelanjutan. Mandiri di sini bukan berarti menolak bantuan "pihak luar" tetapi kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, yaitu :

- 1) keadaan sumberdaya yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan,

commit to user

- 2) penguasaan dan kemampuan pengetahuan teknis untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- 3) sikap kewirausahaan dan ketrampilan manajerial yang dikuasai, dan
- 4) kesesuaian sosial-budaya dan kearifan tradisional yang diwariskan serta dilestarikan secara turun-temurun

Untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan tersebut banyak upaya yang dapat dilakukan. Tetapi untuk mewujudkan ide menjadi aksi mutlak diperlukan adanya legitimasi, baik dari jajaran birokrasi maupun tokoh-tokoh masyarakat (Beals and Bohlen, 1955). Sayangnya, dalam kehidupan masyarakat sering dijumpai ketidak-konsistenan dan ketidakpastian kebijakan yang lain (*inconsistency and uncertainty policy*), baik karena perubahan-perubahan tekanan ekonomi. maupun perubahan kondisi sosial-politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya terbatas pada pening-katan pendapatan (*income generating*). Tetapi juga diperlukan advokasi hukum/kebijakan, bahkan pendidikan politik yang cukup untuk penguatan daya-tawar politis, kaitannya dengan pemberian legitimasi inovasi dan atau ide-ide perubahan yang akan ditawarkan melalui kegiatan penyuluhan.

Terkait dengan tugas penyuluhan/pemberdayaan masyarakat tersebut, harus diakui bahwa masyarakat lapisan bawah pada umumnya, sepanjang perjalanan sejarah selalu menjadi "sub-ordinat" dari aparat birokrasi yang didukung dan atau memperoleh tekanan dari para politikus dan pelaku bisnis (Mardikanto, 2009).

Pemberdayaan adalah salah satu kajian penting dari *community development*. Menurut Taruna (2000), yang dikaji dalam *community development* meliputi: (a) perubahan sosial (*sosial change*); (b) organisasi masyarakat (*community organization*); (c) penyuluhan masyarakat (*extension education*); (d) pengembangan *commit to user*

perdesaan (*rural development*); dan (e) pemberdayaan masyarakat (*community empowering*).

Konsep pemberdayaan menjadi basis utama dalam pembangunan masyarakat (*community development*). Pemberdayaan atau *empowerment* memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Suyatno, 2003). Menurut Hikmat (2006), konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan.

Pemberdayaan secara singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat untuk mampu dan berani bersuara, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih alternative perbaikan kehidupan yang terbaik (Mardikanto, 2007). Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Hikmat, 2006). Dalam Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007), dikatakan para pakar teori pemberdayaan menyatakan bahwa konsep pemberdayaan berlaku tidak hanya bagi individu sebagai kelompok, organisasi, dan masyarakat, namun juga bagi individu itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah mengupayakan pengembangan terhadap klien (individu, kelompok atau masyarakat umum) dari kondisi yang tidak berdaya menjadi kondisi yang berdaya untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik (Tiyanto dkk., 2006). Pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua aspek yaitu *to give or authority to* dan *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna member kekuasaan, mengalihkan kekuasaan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, *commit to user*

pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan (Suparjan dan Suyatno, 2003). Menurut Tiyanto dkk. (2006), pemberdayaan yang komprehensif, meliputi :

- a. Pemberdayaan politik, yaitu untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, sehingga dapat lebih tanggap terhadap persoalan ataupun kebijakan yang sebenarnya merugikan mereka, melalui proses demokratisasi,
- b. Pemberdayaan ekonomi, yaitu pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis masyarakat haruslah dijadikan agenda penting dalam kebijakan ekonomi,
- c. Pemberdayaan sosial, perlindungan masyarakat dari dampak negative neoliberalisme, melalui keterlibatan negara, seperti perlindungan dan jaminan sosial terhadap buruh. Memperkuat modal sosial seperti solidaritas sosial dan gotong royong.
- d. Pemberdayaan budaya, melalui perlindungan, pelestarian, dan penghargaan terhadap kultur lokal, kultur asli, komunitas asli, multikulturisme dan kultur partisipasi.

E. Kemandirian

Konsep kemandirian menjadi faktor sangat penting dalam pembangunan. Konsep ini tidak hanya mencakup pengertian kecukupan diri (*self-sufficiency*) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi faktor manusia secara pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur penemuan diri (*self-discovery*) berdasarkan kepercayaan diri (*self-confidence*).

Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan (Ismawan, 2003)

Beberapa pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat (Karsidi dalam Margono, 2003) menuju kemandirian petani dan nelayan kecil, dapat ditempuh dengan berbagai upaya sebagai berikut :

- a. Memulai dengan tindakan mikro dan lokal. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro dan lokal, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro-makro harus terus-menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi *policy input* dan *policy reform* sehingga memiliki dampak yang lebih luas. Petugas pemberdayaan/pendamping masyarakat tani dan nelayan seyogyanya diberikan kebebasan untuk mengembangkan pendekatan dan cara yang sesuai dengan ruusan tuntutan kebutuhan setempat/lokal di wilayah tugasnya masing-masing,
- b. Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah). Mengingat masing-masing daerah potensinya berbeda, maka kebijakan yang akan diberlakukan di masing-masing daerah juga berbeda,
- c. Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala besar dan akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar kawasan yang lebih produktif,
- d. Membangun kembali kelembagaan masyarakat. Peran serta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat jika dibarengi munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri,

- e. Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggeser ilmu pengetahuan dan teknologi local, menciptakan ketergantungan masyarakat pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius,
- f. Mengembangkan kesadaran pelaku ekonomi. Pemberdayaan yang diperlukan adalah tindakan berbasis pada kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi,
- g. Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan strategis akan berfungsi mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya, dan
- h. Kontrol kebijakan. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol.

Interaksi unsur-unsur dalam kemandirian menjadi efektif dan perkembangan ke arah *selfish* bisa dihindari, perkembangan pribadi individu yang positif bisa dibangun. Lewat KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dibentuk dan diselenggarakan secara wajar dan bertahap. Dalam kelompok semacam inilah proses belajar-mengajar berlangsung, di mana kesenjangan antara penerima pelajaran dan pengajar yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang sosial-ekonomi, bisa dihindari. Dengan demikian, kecenderungan ke arah *selfish* akan terkikis dan diganti oleh empati yang akan menumbuhkan rasa kebersamaan. Bila kemampuan individu yang bertindak sebagai murid dari proses perkembangan golongan miskin. Proses ini menuntut komitmen, dedikasi, dan pandangan hidup yang baik dari pendamping. Artinya, mereka harus memperhatikan proses kemandirian yang terjadi dalam KSM seperti yang terjadi pada dirinya sendiri (Daniel, 2003).

Barnadib (1982) meliputi “Perilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi masalah/hambatan, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain”. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Kartini dan Dali yang mengatakan bahwa “Kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri”. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung pengertian suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya. Dengan demikian akan berperilaku yang :

- a. mampu menganbil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi,
- b. memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya,
- c. bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.

Menurut Robert Havighurst (1972) bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu :

- a. Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang lain,
- b. Ekonomi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain,
- c. Intelektual, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan kemampuan mengembangkan daya kreasi dan inovasi.
- d. Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak menunggu aksi dari orang lain.

Memperhatikan beberapa aspek di atas, berarti kemandirian merupakan suatu sikap yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangan hidupnya dimana suatu bangsa akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi yang

dihadapinya. Dengan kemandiriannya, suatu bangsa dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat berkembang lebih baik dan lebih mantap.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi karena sasaran utamanya adalah kemandirian masyarakat. Hikmat (2006:3) mengemukakan bahwa orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Conny R. Semiawan dan Soedijarto (1991) mengutip telaah Kantor Menteri Negara KLH bahwa kemandirian memiliki lima komponen utama, yaitu:

- a. Bebas, yakni tumbuhnya tindakan atas kehendak sendiri dan bukan karena orang lain, bahkan tidak bergantung pada orang lain,
- b. Progresif *dan* ulet, seperti tampak pada usaha mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan, dan mewujudkan harapan-harapan,
- c. Berinisiatif, yakni mampu berpikir dan bertindak secara orisinal, kreatif, dan penuh inisiatif,
- d. Pengendalian diri dari dalam (*internal locus of control*), yakni kemampuan mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengendalikan tindakannya serta kemampuan memengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri, dan
- e. Kemantapan diri (*self esteem, self confidence*), mencakup aspek percaya kepada diri sendiri dan memperoleh kepuasan atas usaha sendiri.

Selanjutnya mengenai kemandirian, Departemen Pekerjaan Umum (2007) melalui Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bahwa

commit to user

tahap kemandirian adalah proses pendalaman atau intensifikasi dari tahap internalisasi. Tahap ini dimulai di lokasi-lokasi di mana masyarakat sudah pernah melaksanakan program pemberdayaan melalui proses berikut: (1) pelebagaan pengelolaan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan, (2) pelebagaan pengelolaan pendanaan mikro yang berbasis masyarakat untuk melayani masyarakat miskin dan (3) peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

F. Kerangka Berpikir

Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang sangat kompleks, baik ditinjau dari sisi manusianya, dari segi kondisi lingkungan, maupun sarana dan prasarana lingkungan serta perumahan yang layak huni. Untuk itu dibutuhkan kepedulian dan keterlibatan semua pihak untuk memecahkan persoalan ini. Semua pihak yang dimaksud adalah pemerintah, lembaga-lembaga, kelompok peduli dan masyarakat sendiri.

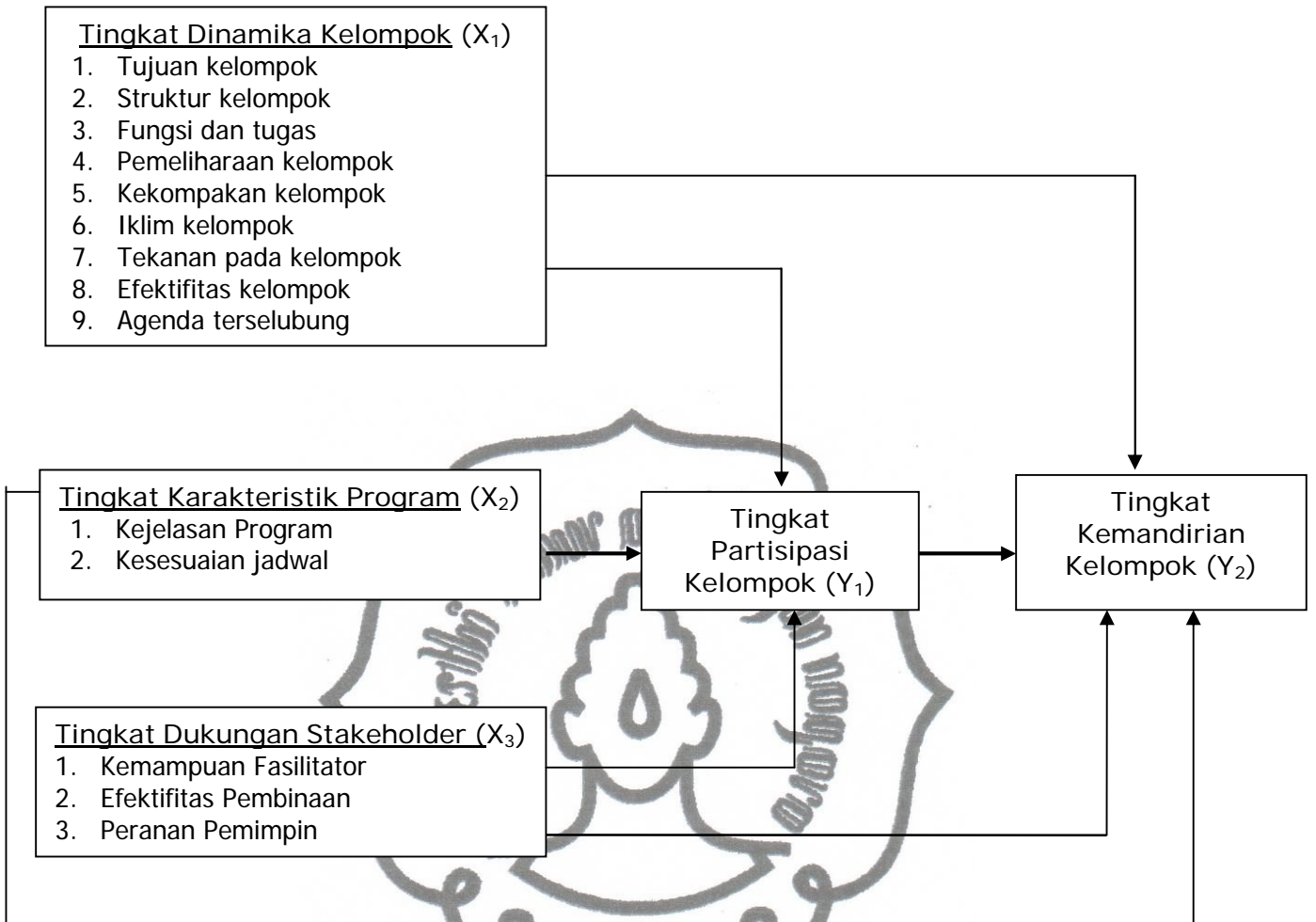
Secara umum banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk ikut dan mau bergabung dalam suatu kelompok, sehingga mereka memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Semua anggota kelompok bekerja secara partisipatif demi kemajuan kelompoknya dimana anggota kelompok memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola (merencanakan, melaksanakan serta melakukan penilaian kerja) kelompok. Untuk menjadikan suatu kelompok menjadi kelompok yang dinamis maka harus didukung oleh unsur-unsur dinamika kelompok yang jelas dan transparan sehingga anggota kelompok merasa aman dan lebih terdorong untuk bergabung dalam kelompoknya. Faktor tersebut yaitu adanya kejelasan tujuan kelompok, maka baik anggota maupun pengurus akan lebih mudah

commit to user

berdiskusi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi segala kegiatan kelompok tersebut. Selain itu juga dengan kejelasan tujuan ini akan mempermudah dalam membagi tugas dan pekerjaan kelompok, memilih tugas anggota disesuaikan dengan tujuan dan kemampuan mereka. Begitu juga dengan struktur kelompok, fungsi dan tugas, pemeliharaan kelompok, kekompakan kelompok, iklim kelompok, tekanan kelompok dan agenda terselubung.

Selaras dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan melalui pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif dengan pemanfaatan bantuan modal usaha yang dikucurkan dari program ini, namun kegiatannya harus dikelola secara kelompok. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dituntut adanya kejelasan dari aspek program itu sendiri misalnya bagaimana kemanfaatan program itu bagi kelompok, tingkat efektifitas program dan pendekatan yang digunakan dalam menjalankan program tersebut. Selain itu juga harus ada pembagian peran yang jelas antar pelaku P2KP atau dukungan dari stakeholder, baik yang langsung tergabung dalam organisasi program maupun pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, para pemeduli, kelompok-kelompok masyarakat dan lain-lain, dari tingkat pusat sampai tingkat komunitas.

Untuk mewujudkan kemandirian kelompok sangat dibutuhkan adanya partisipasi dari anggota kelompok swadaya masyarakat. Kelompok diharapkan mandiri dari berbagai segi yaitu mandiri dari sektor ekonomi, sosial dan juga lingkungan. Partisipasi anggota dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan baik partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan.

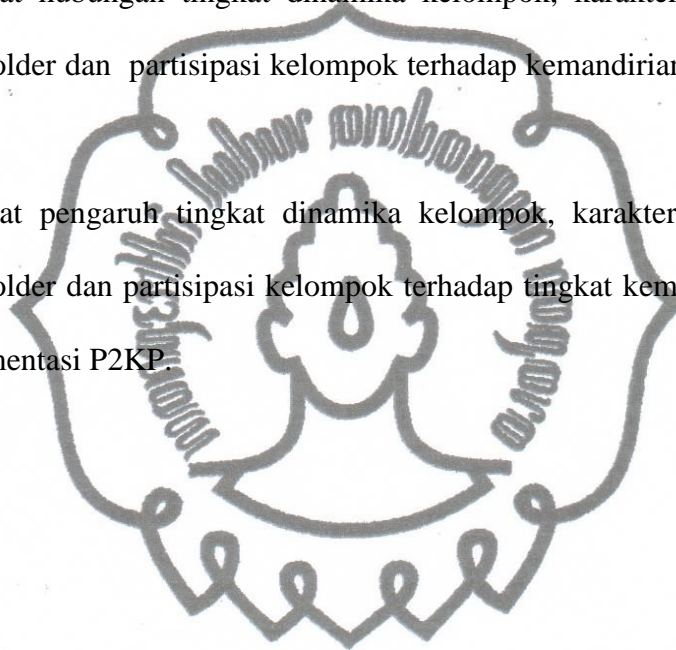


Gambar 1 Diagram Konsep Kerangka Berpikir

G. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Diduga tingkat dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholder dan partisipasi kelompok akan mempengaruhi kemandirian kelompok pada Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
2. Terdapat hubungan tingkat dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholder dan partisipasi kelompok terhadap kemandirian kelompok pada program P2KP
3. Terdapat pengaruh tingkat dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholder dan partisipasi kelompok terhadap tingkat kemandirian kelompok dalam implementasi P2KP.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional

Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diuraikan beberapa batasan, ukuran, dan klasifikasi dari variabel X, dan variabel Y.

1. Tingkat Dinamika Kelompok (X1)

Tingkat Dinamika Kelompok adalah merupakan tingkah laku anggota kelompok yang secara langsung mempengaruhi anggota kelompok lainnya secara timbal balik, dengan kata lain bahwa dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Dinamika kelompok dalam penelitian ini dapat dilihat dari berbagai faktor yang akan mempengaruhi langsung terhadap dinamika kelompok. Variabel X_1 yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sub variabel adalah sebagai berikut :

- (1) Tujuan Kelompok ($X_{1.1}$) : Hasil akhir dari keadan yang diinginkan oleh semua anggota kelompok. Tujuan kelompok diukur dalam skala ordinal dengan indikator-indikator yang meliputi (1) kejelasan tujuan kelompok, (2) tercapai tidaknya tujuan pribadi memasuki kelompok swadaya masyarakat (KSM), (3) tujuan kelompok relevan dengan tujuan anggota kelompok lain, (4) apakah tujuan formil atau tidak, (5) kemampuan anggota untuk menjelaskan apa tujuan kelompok, (6) tujuan mengikuti kelompok swadaya masyarakat, (7) dari mana tujuan kelompok diketahui, (8) berapa persen tujuan kelompok diketahui anggota, (9) kesesuaian tujuan kelompok dengan tujuan anggota secara pribadi, (10) besar

kecilnya tujuan yang telah dicapai, (11) ada tidaknya musyawarah dalam upaya pencapaian tujuan, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria 1- 4.

(2) Struktur kelompok ($X_{1.2}$): Merupakan pola yang sudah tetap mengenai interaksi dan koordinasi dari teknologi kerja dalam suatu kelompok. Struktur kelompok dalam KSM adalah bagaimana cara-cara KSM mengatur dirinya untuk mencapai tujuan. Sudah mantapkah : (1) struktur kewenangan-pembagian wewenang pengambilan keputusan, (2) struktur tugas-pengaturan hak dan kewajiban pengurus dan anggota kelompok, (3) struktur komunikasi-penyampaian informasi ke dalam dan keluar kelompok. Struktur kelompok diukur dengan skala ordinal berdasarkan indikator-indikator, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria antara 1- 4.

(3) Fungsi tugas kelompok ($X_{1.3}$) yaitu apa yang seharusnya dilakukan di dalam suatu kelompok sehingga tujuan kelompok dapat tercapai. Apakah kelompok telah melaksanakan tugas untuk : (1) memberikan kepuasan kepada anggota, (2) aktif mencari informasi baru, (3) melaksanakan pengkoordinasian dengan baik, (4) penuh inisiatif memotivasi anggota, (5) menyampaikan ide-ide kepada anggota untuk giat berpartisipasi, dan (6) memberi penjelasan atas persoalan yang sepatutnya diketahui oleh anggota dengan baik? Fungsi tugas kelompok diukur diukur dengan skala ordinal berdasarkan indikator-indikator, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria antara 1- 4.

(4) Pemeliharaan kelompok ($X_{1.4}$) merupakan upaya agar kelompok tetap eksis, tetap hidup yaitu orientasi kepada (kesinambungan) kehidupan organisasi yang meliputi (1) peningkatan partisipasi anggota, (2) pemanfaatan fasilitas kelompok, (3) peningkatan aktivitas anggota, (4) meningkatnya koordinasi, (5) terlaksananya

komunikasi vertikal, (6) terlaksananya komunikasi horizontal, (7) penetapan standar mutu tertentu, (8) sosialisasi, dan (9) upaya mendapatkan anggota baru. Pemeliharaan kelompok diukur diukur dengan skala ordinal berdasarkan indikator-indikator, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria antara 1- 4.

(5) Kekompakan kelompok ($X_{1.5}$) adalah kesatuan organisasi dipengaruhi oleh besarnya tanggungjawab (*commitment*) dari para anggotanya yang tercipta dengan adanya rasa keterikatan para anggota kelompok. Sehubungan ini, apakah pimpinan kelompok telah memahami tujuan kelompok dengan baik dan apakah anggota kelompok : (1) telah merasa terikat dengan kelompoknya, (2) menilai tujuan kelompok bernilai tinggi, (3) homogen dalam pandangan dan visi, (4) terintegrasi baik, (5) memiliki sifat kerjasama dan, (6) apakah besarnya kelompok KSM telah pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kekompakan kelompok diukur diukur dengan skala ordinal berdasarkan indikator-indikator, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria antara 1- 4.

(6) Iklim kelompok ($X_{1.6}$) adalah suasana kelompok yaitu keadaan moral sikap, dan perasaan-perasaan yang umumnya terdapat dalam satu organisasi. Apakah telah tercapai iklim kelompok yang diharapkan yaitu apakah : (1) suasana dalam keadaan tegang atau tenang saja, (2) keramahtamahan terjadi di antara anggota, (3) suasana dalam kelompok “longgar” atau ada control yang “ketat”, (4) lingkungan fisik, fasilitas, sarana dalam kelompok baik, yang mempengaruhi suasana kelompok yang baik? Iklim kelompok diukur diukur dengan skala ordinal berdasarkan indikator-indikator, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria antara 1- 4.

- (7) Tekanan pada kelompok ($X_{1.7}$) yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan ketegangan dalam kelompok. Permasalahan dalam kelompok adalah apakah tekanan yang ada telah menimbulkan kedinamisan kelompok: (1) tekanan dari dalam kelompok berdasarkan tuntutan anggota, praktek pelaksanaan penghargaan dan hukuman, (2) tekanan yang berasal dari luar kelompok, tuntutan dan penghargaan dari pihak luar : kritikan, sanksi, juga penghargaan dan hukuman. Tekanan kelompok diukur diukur dengan skala ordinal berdasarkan indikator-indikator, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria antara 1- 4.
- (8) Efektifitas kelompok ($X_{1.8}$) adalah tingkatan tercapainya tujuan kelompok dan kepuasan kelompok. Hal-hal tersebut mencakup bagaimanakah : (1) produktivitas kelompok, (2) moral : semangat dan sikap anggota, apakah bangga dan bahagia, (3) kepuasan anggota-apakah tercapai tujuannya? Efektifitas kelompok diukur diukur dengan skala ordinal berdasarkan indikator-indikator, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria antara 1- 4.
- (9) Agenda terselubung ($X_{1.9}$) atau maksud terselubung adalah tujuan yang dirumuskan oleh pengurus atau anggota namun tidak tertulis tetapi diharapkan akan tercapai. Agenda terselubung diidentifikasi apakah ada agenda terselubung dari kelompok yang tidak tertulis dalam Anggaran Rumah Tangga Kelompok. : (1) adakah agenda terselubung dari pengurus kelompok, (2) adakah agenda terselubung anggota kelompok. Agenda terselubung diukur diukur dengan skala ordinal berdasarkan indikator-indikator, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria antara 1- 4.

2. Tingkat Karakteristik Program (X_2)

Yang dimaksud dengan *commit to user* adalah merupakan suatu perencanaan

kegiatan yang telah disusun dan didesain secara terstruktur dan sistematis guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan segala aspek dan memberdayakan segala sumberdaya yang ada secara maksimal. Variabel X_2 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Kejelasan program ($X_{2,1}$) merupakan tingkat kejelasan atau transparansi dari pelaksanaan program P2KP dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin kota. Kejelasan program dilihat berdasarkan indikator-indikator yaitu (1) kejelasan program P2KP, (2) kejelasan syarat peserta, (3) kejelasan syarat peminjaman modal usaha dan (4) kejelasan kemanfaatan program. Kejelasan program diukur dengan skala ordinal berdasarkan indikator-indikator, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria antara 1- 4.
- (2) Kesesuaian Jadwal ($X_{2,2}$) : merupakan ketepatan waktu yang menyangkut program P2KP baik yang terkait dengan ketepatan sistim aturan birokrasi maupun persyaratan yang harus dipenuhi kelompok untuk mendapatkan bantuan yang diterima dari P2KP maupun ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Kesesuaian jadwal dalam penelitian ini dilihat berdasarkan indikator-indikator yang terkait dengan (1) persiapan kegiatan, (2) kesesuaian dana yang diterima oleh kelompok, (3) kegiatan penyuluhan dan pembinaan. Kesesuaian jadwal diukur diukur dengan skala ordinal berdasarkan indikator-indikator, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria antara 1- 4.

3. Tingkat Dukungan Stakeholder (X_3)

Tingkat dukungan stakeholder adalah seberapa besar peranan maupun dukungan pihak-pihak yang terkait dalam program ini ataupun pihak-pihak yang melakukan kerjasama dengan kelompok baik dalam kerjasama baik teknis maupun

berupa sumbangan modal guna peningkatan kegiatan kelompok. Variabel X_3 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Kualitas Fasilitator ($X_{3.1}$) adalah merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh fasisilitator guna menjalankan tugasnya untuk menyampaikan informasi dan aturan-aturan pelaksanaan program P2KP dan juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Kualitas fasilitator dilihat berdasarkan indikator-indikator meliputi (1) penguasaan materi, (2) ketrampilan berkomunikasi, dan (3) kemampuan membangun relasi social. Kualitas fasilitator ini diukur diukur dengan skala ordinal berdasarkan indikator-indikator, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria antara 1- 4.
- (2) Efektifitas pembinaan ($X_{3.2}$) merupakan tingkat kemanfaatan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP) baik yang dilakukan pemerintah, BKM maupun instansi atau lembaga terkait yang melakukan pembinaan dan koodinasi dengan masyarakat yang bertujuan untuk merubah perilaku (pengetahuan, sikap dan ketrampilan) responden dalam usaha meningkatkan kedinamisan responden, sehingga kelompok dapat mengambil manfaatnya. Efektifitas pembinaan dinyatakan berdasarkan indikator-indiator (1) frekuensi pembinaan, (2) kualitas pembinaan dan (3) sasaran (penerima manfaat). Efektifitas pembinaan diukur diukur dengan skala ordinal berdasarkan indikator-indikator, kemudian diklasifikasikan dengan kriteria antara 1- 4.
- (3) Peranan Pemimpin ($X_{3.3}$) : Merupakan serangkaian perilaku atau kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu untuk melaksanakan apa saja yang bisa dilakukan guna memajukan kelompok. Peran pemimpin merupakan kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka berusaha mencapai tujuan
commit to user

kelompok. Peran pemimpin ini diukur dari indikator-indikator yaitu (1) memotivasi anggota dalam berusaha, (2) penghubung berinteraksi dengan dunia luar, (3) mengembangkan wawasan dan ketrampilan anggota, (4) menjaga kekompakan kelompok, (5) mengembangkan wawasan anggota dalam berusaha, (6) membantu memasarkan hasil-hasil produksi, (7) penghubung dengan pihak-pihak lain untuk kelancaran usaha. Peran pemimpin ini diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor antara 1- 4.

4. Tingkat Partisipasi Kelompok dalam program P2KP (Y_1)

Tingkat Partisipasi kelompok dalam penelitian ini adalah apa saja yang sudah dilakukan oleh kelompok atau sejauhmana keikutsertaan kelompok dalam melakukan suatu kegiatan sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat. Variabel Y_1 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Derajat kesukarelaan ($Y_{1.1}$) : Merupakan tingkat kemauan dan kesukarelaan untuk ikut berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan kelompok. Derajat kesukarelaan dinyatakan seberapa besar kemauan atau hal-hal yang mendorong anggota kelompok untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan peran apa yang dilaksanakan untuk memajukan kelompok. Derajat kesukarelaan ini diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor antara 1- 4.
- (2) Lingkup keterlibatan dalam kegiatan kelompok ($Y_{1.2}$) adalah merupakan hal-hal yang dilakukan anggota dalam kegiatan kelompok, menyangkut peran dalam kegiatan kelompok apakah berperan secara aktif atau aktif. Lingkup keterlibatan

dalam kegiatan kelompok ini diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor antara 1- 4.

- (3) Frekuensi dalam kehadiran ($Y_{1,3}$) : adalah merupakan kuantitas kehadiran anggota kelompok dalam mengikuti segala kegiatan kelompok, baik kehadiran dalam menghadiri pertemuan-pertemuan kelompok maupun dalam melaksanakan kegiatan kegiatan kelompok. Frekuensi dalam kehadiran ini diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor antara 1- 4.
- (4) Bentuk kontribusi ($Y_{1,4}$) adalah partisipasi anggota kelompok dalam memberikan sumbangan baik secara materi maupun non materi. Bentuk kontribusi diukur dalam skala ordinal dengan skor 1 – 4 dengan indikator kontribusi pendapat /ide, kontribusi pembiayaan dan kontribusi tenaga kerja.
- (5) Kualitas partisipasi ($Y_{1,5}$) adalah merupakan manfaat yang dapat diberikan dengan adanya partisipasi, baik terhadap kelompok maupun terhadap pribadi. Kualitas partisipasi dapat dilihat indikator sikap dalam menikmati hasil kegiatan, keikutsertaan dalam menjaga atau memelihara kegiatan kelompok. Tingkat partisipasi ini diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor antara 1- 4.

5. Tingkat Kemandirian Kelompok Terhadap Program P2KP (Y_2)

Tingkat kemandirian kelompok dalam penelitian ini adalah keadaan dimana kelompok swadaya masyarakat mampu berinisiatif, mampu mengatasi masalah/hambatan, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Mandiri bukan berarti kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri atau menolak bantuan dari luar. Kemandirian tetap membutuhkan dan membuka diri terhadap bantuan pihak luar yang benar-benar diyakini akan

memberikan manfaat. Tetapi dengan kemandirian juga harus berani menolak intervensi pihak luar yang akan merugikan kelompok atau menuntut korbanan lebih besar dibanding manfaat yang akan diterima. Dalam penelitian ini kemandirian merupakan kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Variabel Y_2 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- (1) Tingkat rutinitas pertemuan/rapat ($Y_{2.1}$) adalah merupakan rutinitas pertemuan diadakan di kelompok baik rapat pengurus maupun rapat anggota. Tingkat rutinitas pertemuan dilihat dari kuantitas pertemuan yang dilaksanakan secara terjadwal maupun tidak dan proses pelaksanaan pertemuan. Tingkat rutinitas pertemuan/rapat diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor antara 1- 4.
- (2) Tingkat kebersamaan dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kelompok ($Y_{2.2}$) adalah merupakan kebersamaan dalam menyusun program atau rencana kerja, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan, melihat siapa saja yang terlibat dalam setiap bagian kegiatan apakah secara bersama atau secara partial. Tingkat kebersamaan dalam menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kelompok diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor antara 1- 4.
- (3) Tingkat kepemilikan kelompok terhadap aturan/norma ($Y_{2.3}$) adalah merupakan tingkat kepemilikan anggota terhadap norma-norma atau aturan yang disepakati serta bagaimana anggota mentaati dan melaksanakan norma tersebut secara bersama. Tingkat kepemilikan terhadap aturan/norma diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor antara 1- 4.

- (4) Tingkat kelompok terhadap pencatatan/administrasi ($Y_{2.4}$) adalah merupakan kelengkapan catatan/ adminitrasi yang dimiliki oleh kelompok. Kepemilikan dalam administrasi juga dilihat tingkat transparansi atas administrasi di antara anggota kelompok dan pengurus apakah tertutup atau terbuka antara sesama pengurus dan juga anggota. Tingkat kelompok terhadap pencatatan/administrasi diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor antara 1- 4.
- (5) Tingkat fasilitasi kelompok terhadap usaha anggota ($Y_{2.5}$) adalah merupakan seberapa besar peran kelompok dalam memfasilitasi usaha anggota. Peran kelompok dalam memfasilitasi usaha anggota dilihat dari bentuk bantuan apa saja yang diberikan oleh kelompok, baik bantuan modal maupun teknis dalam menjalankan usaha. Tingkat fasilitasi kelompok terhadap usaha anggota diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor 1- 4.
- (6) Tingkat fasilitasi kelompok dalam pelayanan informasi ($Y_{2.6}$) : kemampuan kelompok dan hal apa saja yang dilakukan oleh kelompok dalam memberikan layanan informasi terhadap anggota kelompok. Pemberian layanan informasi kepada anggota bisa dalam bentuk pengumuman atau melalui langganan surat kabar dan bagaimana cara menyebarkan informasi tersebut kepada anggota. Tingkat fasilitasi kelompok dalam pelayanan informasi diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor antara 1- 4.
- (7) Tingkat jalinan kerjasam dengan pihak luar ($Y_{2.7}$) adalah merupakan tingkat jaringan kerjasama yang sudah terbina antara kelompok dengan pihak luar atau stakeholder. Dalam menjalin kerjasama dengan pihak luar dilihat siapa saja yang sudah bermitra dengan masyarakat melalui perwakilan BKM dan apa yang akan

diberikan kepada kelompok dalam membantu mengatasi permasalahan kelompok. Tingkat jalinan kerjasama dengan pihak luar diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor antara 1- 4.

- (8) Tingkat pemupukan modal dalam kelompok ($Y_{2,8}$) adalah merupakan usaha kelompok dalam upaya meningkatkan atau memupuk modal usaha yang ada di kelompok. Pemupukan modal kelompok dinilai dari bagaimana cara memupuk modal, seberapa besar yang harus disisihkan dari keuntungan usaha yang dijalankan anggota dan rencana alokasi modal yang ada dikelompok. Tingkat pemupukan modal dalam kelompok diukur berdasarkan pertanyaan dan jawaban atas setiap pertanyaan diberi skor 1- 4.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Daerah penelitian dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa di kecamatan tersebut merupakan daerah yang tergolong berhasil dan terbaik di Kota Medan dalam merealisasikan program P2KP dimana kelompok di wilayah ini telah memiliki kemandirian dan telah berhasil menjalin kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun BUMN, seperti : PT. Pertamina, Departemen Sosial, dan Perusahaan Real Estate Cemara Asri.

C. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan angket atau kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian survey menitikberatkan pada penelitian relasional yakni mempelajari hubungan variabel-variabel, sehingga secara langsung atau tidak hipotesis penelitian dipertanyakan

(Singarimbun dan Efendi, 1995).

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris untuk menjawab apakah suatu variabel berhubungan dengan variabel yang lain. Maksud dari penelitian ini ialah untuk menguji hipotesis. Sedangkan menurut metode utamanya, penelitian ini merupakan penelitian survei yang mengambil data terhadap sejumlah individu yang representatif mewakili populasinya untuk memperoleh sejumlah nilai-nilai tertentu atas sejumlah variabel (Slamet, 2006).

Menurut sifatnya penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang memusatkan pada pengumpulan data kuantitatif yang berupa angka-angka untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistika (Mardikanto, 2006). Suatu konsekuensi metode ini diperlukan operasionalisasi variabel-variabel yang lebih mendasar kepada indikator-indikatornya (ciri-cirinya). Indikator-indikator itu menunjuk kepada keragaman data dan informasi, sedemikian rupa sehingga dapat dirancang model uji hipotesis.

D. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) miskin kota di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun yang berada di bawah pelaksanaan Program P2KP. Jumlah kelompok yang menjadi responden pada penelitian ini telah ditentukan sebanyak 68 kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang tersebar di 20 lingkungan di kelurahan tersebut dan keseluruhannya menjadi responden dalam penelitian ini.

Dalam hubungan populasi dan sampel Sutrisno Hadi dalam Narbuko C, (2007) menjelaskan bahwa sampel atau contoh adalah sebagian individu yang

diselidiki dari keseluruhan individu penelitian. Supaya lebih obyektif istilah individu sebaiknya diganti istilah subyek dan atau obyek. Sampel yang baik yaitu sampel yang memiliki populasi atau yang representatif artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal tetapi walaupun mewakili sampel bukan merupakan duplikat dari populasi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan pada pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) tepatnya pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pengumpulan data dilaksanakan selama 4 (empat) bulan mulai Januari sampai bulan April 2010.

Tabel 3.1. Distribusi Jumlah KSM di Kelurahan Kampung Baru sebagai Sampel dalam Penelitian

NO	Nama Lingkungan	Jumlah Populasi KSM	Sampel KSM
1	I	6	1
2	II	8	1
3	III	22	6
4	IV	10	4
5	V	9	3
6	VI	5	1
7	VII	12	3
8	VIII	1	2
9	IX	18	7
10	X	35	8
11	XI	5	2
12	XII	8	1
13	XIII	8	5
14	XIV	2	1
15	XV	-	-
16	XVI	19	6
17	XVII	20	3
18	XVIII	20	7
19	XIX	13	2
20	XX	4	1
21	XXI	<i>commit to user</i>	1

2. Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling adalah suatu teknik atau cara dalam mengambil sampel yang representatif dari populasi. Dalam penelitian sosial dan ekonomi sebagaimana penelitian dibidang lainnya, terdapat beberapa teknik sampling. Pada dasarnya ada dua macam metode pengambilan sampel, yakni (1) pengambilan sampel secara acak (random) atau disebut random sampling atau probability sampling dan (2) pengambilan sampel yang bersifat tidak acak, dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini digunakan Proportionate Stratified Randon Sampling yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional, dilakukan sampling apabila anggota populasinya heterogen (tidak sejenis). Lokasi penelitian ini terdiri dari 21 lingkungan dimana semua lingkungan mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel, di semua lingkungan tersebar KSM berjumlah 216 kelompok swadaya masyarakat (KSM), sehingga diterapkan random sampling sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara objektif. Terpilihnya unit satuan elementer ke dalam sampel itu harus benar-benar tidak berdasarkan faktor kebetulan (*chace*), bebas dari subjektifitas si peneliti atau subjektifitas orang lain.

Penentuan sampel merujuk pada teori Slovin dalam Drajat, (2002) dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(di)^2 + 1}$$

Keterangan :

n = jumlah sampel *commit to user*

N = jumlah populasi

d_i = nilai presisi (ketelitian) sebesar 95 %

$$n = \frac{216}{216(0,1)^2 + 1} = 68,35$$

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 responden atau 30 % dari jumlah populasi populasi kelompok di setiap lingkungan.

E. Data dan sumber data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui pengumpulan data yang menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder merupakan data mengenai monografi wilayah, dokumen dan foto kondisi wilayah dan gabungan kelompok swadaya masyarakat yang sebelumnya sudah tersedia yang mendukung kegiatan penelitian. Sumber data primer adalah responden yang menjadi sample dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari kantor lurah, BKM, kelompok swadaya masyarakat dan lembaga/dinas terkait.

Adapun informan kunci yang dipandang sesuai dengan fokus penelitian dimaksud adalah Ketua BKM Mandiri Sejahtera Kelurahan Kampung Baru, beberapa Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tokoh masyarakat dalam hal ini ketua lingkungan tempat di mana KSM berada. Selain dari keterangan dari informan tersebut, peneliti memperoleh data atau informasi yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang dipandang cocok dan bermanfaat untuk mengungkap permasalahan atau fokus penelitian. Demikian juga dokumen-dokumen yang berfungsi memperjelas hakekat dan substansi dari permasalahan penelitian dijadikan sumber data berikutnya.

commit to user

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Data primer diambil melalui kuesioner yang disebar oleh peneliti kepada responden penelitian.
2. Data sekunder diambil dengan cara mencatat, mengcopy, memotretnya secara visual.

Pengumpulan data primer dilakukan secara observasi dan diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah disiapkan. Data sekunder diperoleh dari lembaga- lembaga dan instansi terkait serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Proporsional sampling yaitu teknik pengambilan sampel yaitu tiap-tiap populasi dengan sub-sub populasi tersebut. Cara ini dapat memberi landasan generalisasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dari pada apabila tanpa memperhitungkan besar kecilnya sub populasi dan tiap-tiap sub populasi.

G. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian meliputi uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Uji instrumen penelitian dilakukan terhadap 20 kelompok responden yang merupakan bagian dari populasi yang diteliti. Responden uji instrumen penelitian termasuk kedalam sampel penelitian. Lokasi dilakukannya uji instrumen adalah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.

Uji validitas dan reliabilitas instrumen dilaksanakan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian yang digunakan memenuhi persyaratan valid dan reliabel atau tidak. Instrumen yang valid berarti instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang reliabel berarti instrument bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2008).

1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas instrumen penelitian dilakukan melalui pengujian validitas konstruk (*construct validity*) dan validitas isi (*content validity*). Pada pengujian validitas dengan *construct validity*, instrumen disusun dengan cara menjabarkan konsep teori, variabel penelitian beserta indikator-indikator dan deskriptornya, serta butir-butir pernyataan. Dalam hal ini, variabel penelitian beserta indikator-indikator dan deskriptornya dijabarkan berdasarkan konsep teori yang sesuai, dan butir-butir pernyataan dijabarkan dari indikator-indikator yang telah ditentukan.

Konsep validitas logis/validitas konstruksi ini berpangkal pada konstruksi teoritis mengenai faktor-faktor yang akan diukur. Dari konstruksi teoritis (teori) tersebut lahirlah defenisi atau hukum-hukum, yang dipakai sebagai pangkal kerja dan sebagai standar bagi valid atau tidaknya suatu alat pengukur. Apabila konstruksi tentang ciri-ciri gejala sosial telah melahirkan defenisi yang jelas dan logis, maka orang lalu akan membuat item-item yang conform sesuai dengan defenisi. Validitas alat pengukur lalu ditinjau keserasiannya dengan teori yang dipakai sebagai fundamen kerja. Dengan fundamen teoritis tersebut orang membuat item-itemnya. Apabila itemnya sudah serasi secara logis dengan defenisi, maka tersebut dianggap valid. Apabila suatu teori itu betul-betul dianggap benar, maka hasil-hasil dari pengukuran

commit to user

dengan alat pengukur yang berdasarkan teori tersebut dapat dianggap valid (Raianse Usman, 2008).

Selanjutnya, pada pengujian validitas dengan *content validity*, instrumen yang telah disusun dikonsultasikan dengan ahli untuk dinilai kesesuaian antara variabel, indikator dan deskriptor dengan konsep teorinya, dan juga kesesuaian antara butir-butir pernyataan dalam instrumen dengan indikator dari setiap variabel penelitian.

Pada penelitian ini, ahli adalah kedua dosen pembimbing peneliti. Untuk mempermudah pengujian *construct validity* dan *content validity* instrumen, maka dibuat kisi-kisi instrumen. Instrumen penelitian terdiri dari butir-butir pernyataan. Untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah diuji dengan *construct validity* dan *content validity*, instrumen selanjutnya diujicobakan dan hasilnya dianalisis dengan metode analisis korelasi butir dengan total (Purwanto, 2007). Perhitungan korelasi butir dengan total tersebut dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS.

Uji validitas butir instrumen masing-masing variabel dalam mencari nilai korelasi *product moment* menggunakan program SPSS dilanjutkan dengan perhitungan t hitung dan membandingkan t hitung dengan t tabel.

Hipotesis analisis validitas instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Skor butir berkorelasi positif dengan skor total pernyataan variabel (X_1, X_2, X_3, Y_1 dan Y_2)

H_0 : Skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor total pernyataan variabel (X_1, X_2, X_3, Y_1 dan Y_2)

$H_1 : r \neq 0$ $H_0 : r = 0$,

Besarnya nilai t tabel untuk uji validitas butir pernyataan adalah 1,701 (N = 20 sehingga dk = 18, dengan tingkat signifikansi sebesar 5%). Selanjutnya hasil uji menggunakan SPSS terhadap butir pernyataan (r hitung) yang dilanjutkan dengan perhitungan t hitung serta membandingkan t hitung tersebut dengan t tabel dan keputusannya tertera pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Butir untuk Variabel Dinamika Kelompok (X₁), Karakteristik Program (X₂), Dukungan Stakeholder (X₃), Partisipasi Kelompok (Y₁) dan Kemandirian Kelompok (Y₂).

No.	Pernyataan	Nilai korelasi (Pearson Corelation)	Probabilitas Korelasi (Sig. (2-tailed))	Keputusan
1.	Sub variabel X _{1,1}	0,858	0,000	Valid
2.	Sub variabel X _{1,2}	0,914	0,000	Valid
3.	Sub variabel X _{1,3}	0,888	0,000	Valid
4.	Sub variabel X _{1,4}	0,873	0,000	Valid
5.	Sub variabel X _{1,5}	0,907	0,000	Valid
6.	Sub variabel X _{1,6}	0,873	0,000	Valid
7.	Sub variabel X _{1,7}	0,515	0,020	Valid
8.	Sub variabel X _{1,8}	0,836	0,001	Valid
9.	Sub variabel X _{1,9}	0,382	0,096	Tidak Valid
10.	Sub variabel X _{2,1}	0,895	0,000	Valid
11.	Sub variabel X _{2,2}	0,823	0,000	Valid
12.	Sub variabel X _{3,1}	0,864	0,000	Valid
13.	Sub variabel X _{3,2}	0,863	0,000	Valid
14.	Sub variabel X _{3,3}	0,967	0,000	Valid
15.	Sub variabel Y _{1,1}	0,805	0,000	Valid
16.	Sub variabel Y _{1,2}	0,921	0,000	Valid
17.	Sub variabel Y _{1,3}	0,928	0,000	Valid
18.	Sub variabel Y _{1,4}	0,791	0,000	Valid
19.	Sub variabel Y _{1,5}	0,787	0,000	Valid
20.	Sub variabel Y _{2,1}	0,492	0,028	Valid
21.	Sub variabel Y _{2,2}	0,637	0,003	Valid
22.	Sub variabel Y _{2,3}	0,484	0,030	Valid
23.	Sub variabel Y _{2,4}	0,155	0,515	Tidak valid
24.	Sub variabel Y _{2,5}	0,790	0,000	Valid
25.	Sub variabel Y _{2,6}	0,461	0,041	Valid
26.	Sub variabel Y _{2,7}	0,821	0,000	Valid
27.	Sub variabel Y _{2,8}	-0,220	0,352	Tidak valid

Sumber: Hasil analisis statistik pada Lampiran 6

Berdasarkan Tabel 3.2 dari seluruh sub variabel terdapat 24 sub variabel dinyatakan valid dan 3 pernyataan tidak valid (Perhitungan selengkapnya tertera pada Lampiran 6).

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas instrumen penelitian dilakukan secara internal (*internal consistency*) dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach*, dengan rumus sebagai berikut (Purwanto, 2007).

$$r_{11} = \left(\frac{n}{n-1} \right) \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{\sum s_t^2} \right)$$

Keterangan:

n = jumlah butir

s_i^2 = variansi butir

s_t^2 = variansi total

Nilai koefisien reliabilitas ini dapat dibandingkan dengan nilai r_{table} pada $\alpha = 1\%$ atau $\alpha = 5\%$ dan db tertentu ($db = N-1$), yang tujuannya untuk mengetahui apakah item pertanyaan reliabel untuk digunakan sebagai alat pengukur dengan kriteria keputusan :

- (1) Jika $r_{11} \leq r_{table}(\alpha, db)$ r_{tabel} Product Moment, maka alat ukur tidak reliabel
- (2) Jika $r_{11} \geq r_{table}(\alpha, db)$ r_{tabel} Product Moment, maka alat ukur reliabel

Untuk menentukan item-item mana yang valid dapat dilakukan dengan beberapa langkah :

1. Tentukan df, $df = N - 2$.
2. Cari nilai r dengan taraf signifikansi 5 % dengan sesuaikan dengan df pada table Nilai r Product Moment.
3. Lihat nilai corrected item total correlation pada hasil. Jika nilainya lebih besar dari r_{table} maka item valid dan jika nilainya lebih kecil r_{table} maka tidak valid.

Selanjutnya hasil uji perhitungan statistik *Alpha Cronbach* untuk uji reliabilitas instrument penelitian dilakukan dengan menggunakan alat bantu program SPSS 17 dan keputusannya tertera pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Pernyataan	Cronbach's Alpha	N of Items	r 11	Keputusan
1.	Variabel X ₁	0,908	9	0,707	Reliabel
2.	Variabel X ₂	0,638	2	0,576	Reliabel
3.	Variabel X ₃	0,728	3	0,553	Reliabel
4.	Variabel Y ₁	0,886	5	0,950	Reliabel
5.	Variabel Y ₂	0,829	8	0,754	Reliabel

Sumber: Hasil analisis statistik pada Lampiran 7.

Berdasarkan table 3.3 hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 17 disimpulkan bahwa semua alat ukur yang digunakan untuk mengukur data yang seharusnya diukur, nilai Cronbach's Alpha diperoleh semua variabel 3.3.

H. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan instrumen penelitian harus mengetahui jenis skala pengukuran yang digunakan agar tipe instrumen bisa diukur sesuai dengan apa yang hendak diukur dan bisa dipercaya serta reliabel terhadap permasalahan instrumen penelitian. Maksud dari skala pengukuran ini untuk mengklasifikasian variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya, maka dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal yang memungkinkan peneliti untuk mengurutkan respondennya dari tingkatan paling rendah ke tingkatan paling tinggi atau sebaliknya menurut atribut tertentu. Tingkat pengukuran ordinal banyak digunakan dalam penelitian sosial dan ekonomi terutama untuk mengukur kepentingan, sikap atau persepsi. Melalui ukuran ini peneliti dapat membagi respondennya ke dalam urutan rangking atas dasar sikapnya pada objek atau tindakan tertentu.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif dan analisis jalur. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis jalur menurut Sarwono (2006) dan Sudjana (2003) adalah (1) semua variabelnya berskala interval, (2) pola hubungan antar variabel bersifat linear, (3) variabel-variabel residualnya tidak berkorelasi dengan variabel sebelumnya dan tidak berkorelasi satu dengan yang lainnya (tidak terjadi autokorelasi) dan (4) model hanya bersifat searah. Selanjutnya Purbayu Budi Santosa dan Ashari (2005) dan Sugiyono (2006) menyatakan bahwa untuk uji parametrik, syarat yang harus dipenuhi adalah data harus berdistribusi normal dan homogen. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka sebelum uji analisis jalur, akan terlebih dahulu dilakukan uji syarat analisis yaitu: (1) uji normalitas, (2) uji homogenitas, (3) uji linearitas, dan (4) uji autokorelasi.

1. Uji Syarat Analisis

a. Uji normalitas

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Dilakukannya uji normalitas karena pada analisis parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut berdistribusi normal. Untuk mengetahui bentuk distribusi data, dapat dilakukan dengan analisis statistik (Purbayu Budi Santosa dan Ashari, 2005). Pada penelitian ini, urutan langkah uji normalitas data sebagai berikut.

1) Formula hipotesis (Bambang Suharjo, 2008).

H_1 : X_i berdistribusi normal

H_0 : X_i tidak berdistribusi normal

2) Mencari nilai Kolmogorov-Smirnov

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS dengan metode Kolmogorov-Sminov didasarkan pada Cornelius Trihendradi (2005). Adapun proses perhitungannya adalah (1) Analyze, (2) Statistic Descriptive, (3) Explore, (4) Memasukkan variabel yang akan di uji ke dalam Dependent List, (5) Pada menu Plots, tandai item Normality Plots with test, (6) Continue dan Ok. Pada hasil uji akan ditemukan nilai Kolmogorov-Smirnov dan nilai sign.

3) Menentukan kriteria pengujian dengan $\alpha = 0,05$

Penentuan kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Singgih Santosa, 2008:175 dan Cornelius Trihendradi, 2005):

- Distribusi data normal bila nilai sign $\leq \alpha$
- Distribusi data adalah tidak normal bila nilai sign $> \alpha$

4) Membuat kesimpulan

Menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H_1 sesuai kriteria pengujian.

b. Uji homogenitas

Uji homogenitas data dilakukan untuk menganalisis variansi, untuk mengetahui bahwa sampel yang diteliti berasal dari populasi dengan variansi homogen (Soegeng, 2006). Berikut ini adalah langkah-langkah pengujian homogenitas.

1) Hipotesis

H_1 : Data diantara variabel memiliki variansi yang sama atau homogen

H_0 : Data diantara variabel memiliki variansi yang tidak sama atau tidak homogen

$$H_1 : S_1^2 \neq S_2^2 \neq S_3^2 \neq S_4^2$$

$$H_0 : S_1^2 = S_2^2 = S_3^2 = S_4^2 \text{ *commit to user*}$$

2) Menghitung nilai F_{hitung}

Pengujian homogenitas variansi data menggunakan uji F yaitu membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2006).

$$F_{hitung} = \frac{\text{Variansi terbesar}}{\text{Variansi terkecil}}$$

3) Menentukan taraf nyata (α) dan kriteria pengujian

$$\alpha : 0,05$$

Kriteria pengujian :

H_1 diterima atau data diantara variabel memiliki variansi yang sama atau homogen jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan H_1 ditolak atau data diantara variabel memiliki variansi yang tidak sama atau tidak homogen jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$.

4) Mencari F_{tabel}

F_{tabel} ditentukan dengan derajat bebas pembilang dan penyebut.

$$\text{Derajat pembilang } (df_1) = n - 1$$

$$\text{Derajat penyebut } (df_2) = n - 1$$

Selanjutnya F_{tabel} adalah $F_{\alpha(df_1;df_2)}$ yang nilainya diperoleh berdasarkan Tabel F.

5) Membuat kesimpulan

Menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H_1 sesuai kriteria pengujian.

c. Uji linearitas

Menurut Sudjana (2003), pengujian linieritas adalah pengujian hipotesis nol bahwa regresi linear melawan hipotesis tandingan bahwa regresi non-linier. Uji

linearitas garis regresi dilakukan dengan menghitung nilai F hitung. Pada penelitian ini, urutan langkah uji linearitas sebagai berikut.

1) Formula hipotesis

H_1 : Terdapat hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel terikat.

H_0 : Tidak terdapat hubungan linier antara variabel bebas dengan variabel terikat.

2) Mencari nilai F hitung

Uji linearitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS. Adapun proses perhitungan nilai F adalah (1) Analyze, (2) Regression, (3) Linier, (4) Memasukkan variabel yang akan di uji kedalam kotak Dependent untuk variabel terikat dan kedalam kotak Independent(s) untuk variabel bebas, (5) Pada menu Options, tandai item Use probability of F, (6) Continue dan Ok. Pada hasil uji akan ditemukan nilai F dan nilai sign.

3) Menentukan kriteria pengujian dengan $\alpha = 0,05$

Penentuan kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Singgih Santosa, 2008):

- Terdapat hubungan linier bila nilai sign $\leq \alpha$
- Tidak terdapat hubungan linier bila nilai sign $> \alpha$

4) Membuat kesimpulan

Menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H_0 sesuai kriteria pengujian.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu korelasi antara nilai variabel dengan nilai variabel sebelumnya (Bambang Suharjo, 2008). Konsekuensi dari adanya autokorelasi menurut Algifari (1997) adalah varians sampel tidak dapat menggambarkan varians

populasinya. Lebih jauh lagi, model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu.

Menurut Purbayu Budi Santosa dan Ashari (2005) untuk mendeteksi adanya autokorelasi, dapat digunakan uji Durbin-Watson (DW). Uji ini menghasilkan nilai DW hitung (d) dan nilai DW tabel (d_L dan d_U). Berikut ini adalah prosedur uji Durbin-Watson (DW) berdasarkan Iqbal Hasan (2003).

1) Menentukan formula hipotesis

H_1 : ada autokorelasi

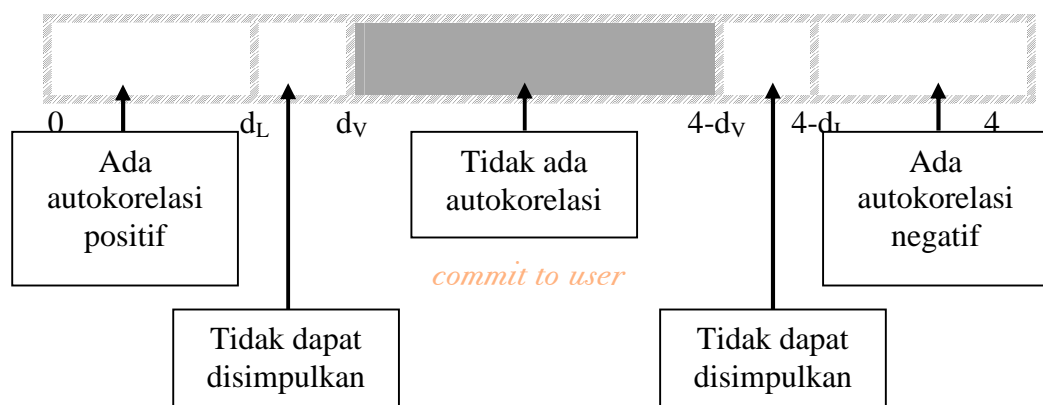
H_0 : tidak ada autokorelasi

2) Menentukan nilai α dan nilai d tabel

Nilai d tabel terdiri atas d_L dan d_U ditentukan dengan n dan k tertentu.

3) Menentukan kriteria pengujian

Bambang Suharjo (2008) menjelaskan jika d berada didalam selang batas atas (d_U) dengan batas bawah (d_L) atau nilai d berada dalam selang $4-d_U$ dengan $4-d_L$, maka tidak dapat disimpulkan apa-apa. Selanjutnya, jika nilai d lebih besar dari 0 (enol) dan lebih kecil dari d_L dikatakan ada autokorelasi positif. Kemudian bila nilai d berada $4-d_L < d < 4$ disebutkan ada autokorelasi negatif. Hasil uji dinyatakan tidak ada autokorelasi jika d berada pada d_U sampai $4-d_L$ atau $d_U < d < 4-d_L$. Daerah kritis Durbin Watson secara grafikal disajikan pada gambar berikut ini.



Gambar 2 Daerah Kritis Durbin Watson (Bambang Suharjo, 2008)

- 4) Menentukan nilai uji statistik

$$d = \frac{\sum (e_n - e_{n-1})^2}{\sum e_n^2}$$

Rumus berdasarkan Bambang Suharjo (2008) dan Iqbal Hasan (2003). Pada penelitian ini, nilai d akan dihitung menggunakan program SPSS. Purbayu Budi Santosa dan Ashari (2005) menjelaskan proses perhitungan nilai Durbin-Watson menggunakan SPSS sebagai berikut: (1) Analyze, (2) Regression, (3) Pada menu statistics, pilih Durbin-Watson, (4) Continue dan OK. Pada hasil uji akan ditemukan nilai Durbin-Watson.

- 5) Membuat kesimpulan

Menyimpulkan tentang penerimaan atau penolakan H_0 sesuai kriteria pengujian.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2006). Data pada penelitian ini meliputi variabel Tingkat Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2), Tingkat Dukungan Stakeholder (X_3), Tingkat Partisipasi kelompok (Y_1) dan Tingkat Kemandirian Kelompok (Y_2) ditabulasi dan dikelompokkan berdasarkan kriteria. Hasil analisis statistik deskriptif penelitian ini ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Upaya penyajian ini dimaksudkan mengungkapkan informasi penting yang

terdapat dalam data kedalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana yang pada akhirnya mengarah pada keperluan adanya penjelasan dan penafsiran.

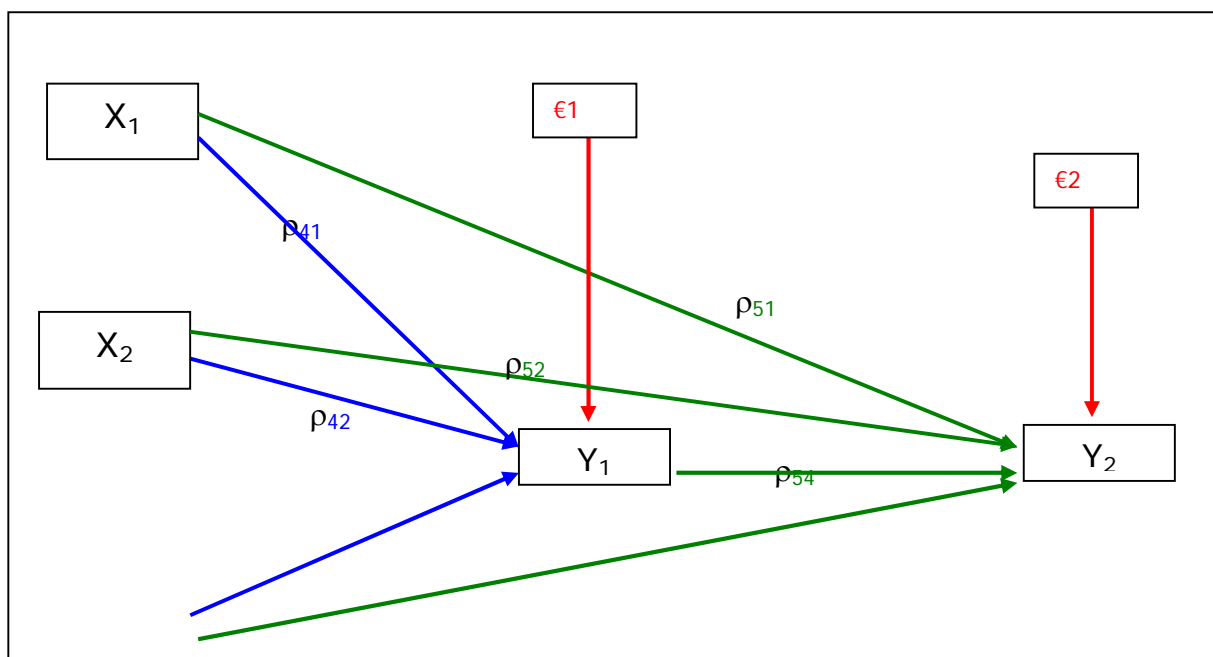
Analisis statistik deskriptif dilaksanakan melalui beberapa tahapan:

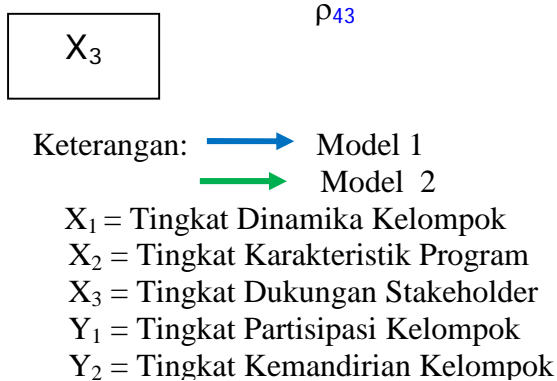
- Penyajian data variabel X_1 , X_2 , X_3 , Y_1 dan Y_2 dengan metode tabulasi
- Penentuan kecenderungan nilai responden untuk masing-masing variabel yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) kelas kriteria masing-masing adalah: (1) sangat rendah, (2) rendah, (3) tinggi dan (4) sangat tinggi. Interval kelas ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ordinal Kelas} = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{Klasifikasi}}$$

3. Analisis Jalur

Data hasil penelitian ini dianalisis menggunakan analisis jalur untuk menjawab hipotesis (Sudjana, 2003). Berikut ini adalah diagram analisis jalur variabel Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2), Dukungan Stakeholder (X_3), Partisipasi Kelompok (Y_1) dan Kemandirian Kelompok (Y_2).





Gambar 3. Diagram Analisis

Beberapa tahapan analisis jalur pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung koefisien determinasi (R^2) dan uji signifikansinya

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan pengaruh gabungan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) model analisis jalur. Oleh karenanya diperoleh 2 (dua) koefisien determinasi (R^2) masing-masing untuk model 1 dan model 2. Untuk mengetahui apakah besarnya nilai R^2 dapat diterima secara statistik, dilakukan pengujian linearitas melalui uji F. Pengujian linearitas dilakukan menggunakan program SPSS yang menghasilkan nilai F_{hitung} dan nilai sign. Pengujian dilakukan pada taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria pengujian:

- H_1 diterima atau terdapat hubungan linier jika nilai $sign \leq \alpha$
- H_1 ditolak atau tidak terdapat hubungan linier jika nilai $sign > \alpha$

- b. Menghitung besarnya koefisien jalur (ρ) antar variabel dan uji signifikansinya

Besarnya koefisien jalur (ρ) dihitung menggunakan SPSS dan pengujian dilakukan melalui uji t. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

$$H_1 : \rho > 0 \quad H_0 : \rho = 0$$

Pengujian dilakukan dengan statistik uji t menggunakan program SPSS yang menghasilkan nilai ρ , t_{hitung} dan nilai sign. Pengujian dilakukan pada taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria pengujian:

- H_1 diterima jika nilai sign $\leq \alpha$
- H_1 ditolak jika nilai sign $> \alpha$

c. Menghitung koefisien korelasi (r) antar variabel dan signifikansinya

Koefisien korelasi (r) menunjukkan besarnya hubungan antar variabel. Besarnya nilai r pada penelitian ini dihitung menggunakan program SPSS. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

- H_1 : Terdapat korelasi antara variabel
- H_0 : Tidak terdapat korelasi antara variabel
- $H_1 : r \neq 0 \quad H_0 : r = 0$

Pengujian dilakukan dengan statistik menggunakan program SPSS yang menghasilkan nilai r dan nilai sign. Pengujian dilakukan pada taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria pengujian:

- H_1 diterima jika nilai sign $< \alpha$
- H_1 ditolak jika nilai sign $\geq \alpha$

d. Menentukan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel

Untuk menentukan besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung didasarkan pada keterkaitan koefisien korelasi (r) dan koefisien jalur (ρ) (Sudjana, 2003). Beberapa persamaan berdasarkan pada diagram analisis (Gambar 2) dan penentuan pengaruh langsung serta pengaruh tidak langsungnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak dan Keadaan Geografis Kecamatan Medan Maimun

Wilayah Kelurahan Kampung Baru memiliki luas 1,27 km² yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) lingkungan. Secara geografis kelurahan Kampung Baru berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sei Mati
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Titi Kuning
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Siti Rejo II
- Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Suka Dame

Wilayah ini juga memiliki curah hujan 3000 mm, jumlah bulan hujan 9 bulan, suhu rata-rata 27⁰ C dan tinggi dari permukaan laut 20 m dpl.

b. Luas Wilayah

Secara administratif Kelurahan Kampung Baru tercakup dalam Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 93 Ha, jarak Kelurahan Kampung Baru ke ibu kota kecamatan sekitar 1 km, ke kantor walikota sekitar 5 km, dan ke ibu kota provinsi sekitar 4 km.

c. Peta Keluarga Miskin

Profil data kependudukan Kelurahan Kampung Baru ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4.1. Data kependudukan Kelurahan Kampung Baru

No	Uraian	Jumlah (jiwa)
----	--------	---------------

1	Jumlah KK miskin yang tidak produktif	1250
2	Jumlah anak KK Miskin yang putus sekolah	350
	a. SD	99
	b. SMP	97
	c. SMA	157
3	Jumlah KK miskin yang perlu mendapat santunan	257
4	Jumlah penduduk buta huruf	-
	1. Laki-laki	-
	2. Perempuan	-
5	Jumlah remaja putus sekolah	198

Sumber : Laporan Tahunan Kantor Kelurahan, 2009

Berdasarkan daftar penerima BLT diketahui jumlah kepala keluarga miskin sebanyak 661 KK di Kelurahan Kampung Baru yang tersebar di setiap lingkungan.

Tabel 4.2. Distribusi Keluarga Miskin Penduduk Kelurahan Kampung Baru Tahun 2009

No	Lingkungan	Jumlah KK miskin
1	I	34
2	II	44
3	III	38
4	IV	17
5	V	27
6	VI	35
7	VII	33
8	VIII	8
9	IX	29
10	X	17
11	XI	11
12	XII	20
13	XIII	27
14	XIV	5
15	XV	124
16	XVI	75
17	XVII	28
18	XVIII	50
19	XIX	12
20	XX	25
	Jumlah	661

Sumber data : Laporan kegiatan tahunan Kelurahan Medan Baru, 2009.

Profil data tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Kampung Baru sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3. Data Tingkat Pendidikan Penduduk di Kelurahan Kampung Baru

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	SD	5282
2	SLTP	6200
3	SMU/SLTA	5535
4	D3/S1/S2	2240

Sumber : Kantor Lurah Kampung Baru, 2009

Tabel 4.4. Data Sarana yang ada di Kelurahan Kampung Baru

No	Sarana	Jumlah
1	Perusahaan / Industri	83
2	Home industry	10
3	Lembaga Perbankan	8

Sumber : Kantor Lurah Kampung Baru, 2009

Berdasarkan hasil kegiatan pemetaan swadaya yang menggambarkan kondisi jumlah KK miskin di wilayah / lingkungan di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan diperoleh data bahwa kemiskinan di wilayah Kelurahan Kampung Baru disebabkan oleh pendidikan yang rendah, pendapatan yang tidak tetap, pengangguran serta sulitnya lapangan pekerjaan. Pekerjaan penduduk miskin di wilayah ini secara umum sangat bervariasi seperti buruh bangunan, dagang kecil/pedagang asongan, tukang cuci pakaian di rumah tangga, tukang beca dayung, montir jahit dan penjahit, dimana semua pekerja tersebut mempunyai upah kerja yang sangat rendah. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang serba kekurangan masyarakat ini sering meminjam melalui rentenir dengan bunga yang tinggi.

Dari data hasil pemetaan swadaya ditemukan beberapa masalah yang selama ini dihadapi, antara lain :

1. Aspek sarana dan prasarana lingkungan
 - a. Jalan yang sebagian masih belum bagus

- b. Drainase yang tidak memadai
 - c. Posyandu tidak ada
 - d. Tempat sampah belum memadai
2. Aspek ekonomi dan peningkatan sumber daya
- a. Kurangnya modal usaha
 - b. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan
3. Aspek Sosial
- a. Bantuan sosial produktif ternak lele serta pelatihan santunan untuk anak yatim piatu.
 - b. Bantuan gizi posyandu santunan bagi anak miskin putus sekolah
 - c. Bantuan sosial produktif ternak ayam
 - d. Beasiswa
 - e. Pelatihan karangan bunga
 - f. Bantuan gizi posyandu
 - g. Bantuan pedagang kecil berupa transport
 - h. Usaha kelompok home industri
- d. Visi, Misi dan Tujuan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Mengingat bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PNPM P2KP) adalah landasan dan pemicu tumbuhnya gerakan pembangunan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Maka diperlukan rumusan visi, misi dan tujuan program penanggulangan kemiskinan yang jelas sehingga dapat dipakai sebagai acuan dan arahan bagi perilaku dan arahan bagi semua perilaku PNPM P2KP maupun bagi para

pihak stakeholders dalam mengembangkan program-program kemiskinan di wilayahnya.

Visi : *“Tercipta Masyarakat Yang Mandiri Dibidang, Ekonomi, Pendidikan Dan Sosial”.*

BKM Mandiri Sejahtera mendorong terwujudnya kemandirian warga “Masyarakat Kelurahan Kampung Baru secara bersama-sama mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami secara mandiri, efektif, dan berkelanjutan serta dapat mewujudkan masyarakat madani yang maju, mandiri dan sejahtera”.

Misi :

BKM Mandiri sejahtera bersama-sama dengan warga masyarakat membangun kebersamaan dalam upaya: “Mensejahterakan masyarakat, sehingga masyarakat Kelurahan Kampung Baru dapat terlepas dari masalah hidup yang serba kekurangan, khususnya masyarakat miskin. Dalam penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kapasitas, penyediaan sumber daya dan membudayakan kemitraan sinergis antara masyarakat dengan pelaku-pelaku pembangunan lokasi lainnya dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat dan lestari”. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut antara lain :

1. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana fisik lingkungan

Kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana fisik yaitu pembangunan sarana umum seperti pembangunan gang-gang, pembuatan dan perbaikan saluran air/roil, pembuatan benteng/terasering sungai deli yang berbatasan langsung dengan wilayah ini,

juga pembangunan sarana peribadatan mesjid dan juga musholla. Kondisi lingkungan fisik di wilayah ini selama ini tergolong buruk karena banyaknya kawasan kumuh yang menjadikan lingkungan di wilayah ini tidak sehat, begitu juga dengan sarana dan prasarana umum lainnya banyak dalam kondisi rusak atau tidak bagus seperti mesjid atau musholla yang kondisi bangunan sudah rusak dan perlu perbaikan yang cukup serius. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di wilayah ini sering menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat karena sering terjadinya banjir yang melanda pemukiman penduduk akibat saluran air yang tidak lancar dan keberadaan Sungai Deli yang berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk, sehingga kalau curah hujan sangat tinggi beteng sungai tidak mampu menampung debit air akibatnya menimbulkan banjir di pemukiman penduduk.

2. Peningkatan kualitas SDM masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia di Kelurahan Kampung Baru khususnya masyarakat miskin sebagai penerima manfaat P2KP telah banyak langkah dan kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti pemberian latihan kursus computer bagi anak-anak putus sekolah, pemberian latihan / kursus tata boga seperti menjahit dan memasak bagi kelompok ibu-ibu, sehingga diharapkan dari pembekalan keterampilan mampu menjadikan modal untuk membuka usaha mandiri. Peningkatan mutu SDM juga diterapkan bagi anak-anak masa usia dini dengan menyelenggarakan pendidikan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang dikelola langsung oleh BKM Mandiri Sejahtera dengan memanfaatkan sarana yang tersedia di kantor lurah Kampung Baru.

Dalam rangka peningkatan keterampilan bagi masyarakat miskin Kelurahan Kampung Baru melalui P2KP ini BKM Mandiri Sejahtera telah melakukan kerja sama dengan mitra yaitu Tricom dalam hal pemberian pelatihan computer bagi anak-anak putus sekolah sehingga mampu meningkatkan keterampilan mereka dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan lowongan kerja, sedangkan bagi kaum ibu diatasi dengan pelatihan kursus menjahit dan kursus tata boga, sehingga dengan keterampilan yang mereka miliki mampu membuka usaha baru sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki.

Kegiatan kerjasama yang sudah terjalin antara BKM Mandiri Sejahtera dengan pihak stakeholders dalam hal mengatasi kemiskinan perkotaan dengan cara peningkatan keterampilan dengan memberikan kursus bengkel latih bagi anak-anak putus sekolah terutama dari keluarga miskin sehingga diharapkan dengan keterampilan yang dimiliki akan melahirkan kemandirian dengan membuka usaha baru sesuai keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

3. Peningkatan kualitas taraf hidup masyarakat.

Rendahnya kualitas hidup dari keluarga miskin di Kelurahan Kampung Baru ini dapat dilihat dari banyaknya angka jumlah keluarga miskin yang taraf hidupnya serba kekurangan, pendidikan yang rendah, pekerjaan yang tidak layak karena upah kerja yang diperoleh sangat rendah. Untuk mengatasi berbagai masalah ini banyak langkah yang sudah dilaksanakan seperti program perbaikan gizi balita yang disalurkan melalui posyandu yang ada di wilayah ini. *commit to user* sedangkan dalam hal upaya peningkatan mutu kesehatan

masyarakat di kelurahan ini BKM Mandiri Sejahtera telah bermitra dengan Pertamina (Persero) dalam hal perbaikan gizi bagi balita melalui Posyandu di setiap lingkungan. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PT. Pertamina dan BKM Mandiri Sejahtera.

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu sektor dari pemberdayaan dalam P2KP ini yaitu pemberdayaan dibidang ekonomi. Langkah atau kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat miskin yaitu memberikan pinjaman modal dengan sistim pinjaman bergulir yang disalurkan melalui KSM. Anggota kelompok diberikan pinjaman modal mulai dari taraf Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai pada saat penelitian ini dilaksanakan. Besarnya pinjaman modal usaha disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BKM dan untuk peminjaman berikutnya tergantung dari kelancaran pengembalian modal dari anggota kelompok. Pinjaman modal ini diberikan untuk membangkitkan kegiatan ekonomi produktif dengan jenis usaha yang berbagai macam usaha mulai dari pedagang kecil seperti kedai sampah, warung makanan kecil, temple sepatu dan temple ban, kerajinan tangan, souvenir sederhana dan juga jenis usaha yang lain.

Pemberian dana pinjaman ini telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Baru sebab dapat menambah penghasilan keluarga melalui usaha produktif yang dikelola terutama bagi kaum ibu dana ini sangat membantu dalam menopang ekonomi keluarga, karena selama ini pekerjaan kaum ibu dari golongan keluarga miskin ini hanya sebagai pekerja rumah

tangga atau tukang cuci di rumah tangga dengan upah kerja atau penghasilan yang relative murah, hal ini sudah tentu tidak akan mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, maka dengan adanya dana dari Program P2KP ini mereka bisa beralih pekerjaan atau usaha menjadi pedagang kecil, warung makan, penjahit dan lain sebagainya dan keluarga yang sudah memiliki usaha bisa mengembangkan usahanya menjadi semakin besar dengan adanya pinjaman dana dari P2KP ini.

5. Peningkatan kepedulian sosial masyarakat.

Sektor sosial merupakan bagian dari Tridaya pemberdayaan pada P2KP. Guna mengatasi masalah sosial di wilayah ini banyak hal yang telah dilakukan mulai dari peningkatan keterampilan, kesehatan, ketahanan pangan dan juga tempat tinggal. Pemberdayaan di bidang sosial berupa bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin seperti pemberian santunan pada anak yatim, orang tua jompo, sakit menahun. Pemberian bantuan dapat berupa biaya berobat, biaya hidup dan perlengkapan seragam sekolah bagi anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu bantuan sosial lain yang diberikan melalui P2KP yaitu bantuan rehab rumah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per KK bagi rumah yang tidak layak huni, juga pemberian bantuan sosial beras miskin (raskin) sebanyak 10 - 20 kg beras per KK disesuaikan dengan besarnya jumlah tanggungan.

Selain itu juga dilakukan untuk penanganan masalah sosial antara lain pemberian dana hibah untuk rehab rumah bagi keluarga miskin yang memiliki tempat tinggal tidak layak huni, memberikan santunan biaya hidup

bagi orang tua jompo dan sakit menahun, memberikan perlengkapan sekolah bagi anak-anak dari keluarga miskin dan juga anak yatim.

Tujuan P2KP

Tujuan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Kampung Baru adalah untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat menyangkut berbagai permasalahan berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan dalam program tridaya (pemberdayaan sarana dan prasarana/fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi) seperti :

1. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan yang aspiratif, refresentatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/suara masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayahnya. Melalui kemitraan sinergis ketiga pilar pembangunan lokal, diharapkan dapat terbangun proses pelembagaan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan dunia usaha, serta dunia nirlaba lainnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan berbagai program/proyek di daerah secara umum dan khususnya dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin ke pelayanan sosial, sarana dan prasarana dasar lingkungan serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan yang sinergi ke berbagai pihak yang terkait atau pihak peduli lainnya. Kemitraan yang sinergi tersebut dapat member peluang

bagi masyarakat yang mampu mengakses dan memanfaatkan berbagai program-program atau sumberdaya yang ada di luar P2KP yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan nirlaba lainnya, termasuk membuka akses penyaluran (*channeling*) bagi keberlanjutan program-program di masyarakat dan penerapan tridaya di lapangan.

3. Membangun hubungan kemitraan dengan pihak pemerintah kota/kotamadya agar berperan lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin. Tujuan ini dicapai dengan terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak atau mitra dari luar yang berhasil membantu masyarakat miskin di wilayah ini seperti Departemen Sosial, PT.Pertamina, PTPN II, Perusahaan Real Estate Cemara Asri dan PT. Tricom.

Tujuan diadakannya PJM Pronangkis adalah agar tercipta kesadaran masyarakat terhadap masalah kemiskinan yang harus segera ditanggulangi oleh seluruh lapisan masyarakat dan pelaku pembangunan di Kelurahan dengan tujuan meningkatkan rasa solidaritas, senasib dan sepenanggungan yang berdampak pada efektifitas implementasi (kemudahan pelaksanaan) PJM Pronangkis.

e. Rumusan Strategi dan Sasaran Kegiatan

Untuk dapat menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Kampung Baru, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam menanggulangi kemiskinan sehingga dengan demikian masyarakat akan menyadari akar permasalahan kemiskinan yang selama ini ada di desanya. Dalam hal ini semua masyarakat melalui perwakilan dari setiap kelompok swadaya masyarakat

(KSM) di kelurahan ini ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program P2KP mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi sehingga rumusan yang dihasilkan benar-benar menjadi prioritas masalah yang dialami mereka, dengan dilibatkannya mereka dalam kegiatan sehingga mereka merasa menjadi bagian yang penting dari kegiatan ini sehingga program ini berkelanjutan.

2. Bersama-sama menilai potensi diri dan potensi alam yang ada disekitarnya untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Pengurus BKM bersama-sama dengan unit-unit pelaksana (lingkungan, ekonomi dan sosial) dan berkoordinasi dengan Faskel dan Koordinator Kota P2KP melakukan pemetaan swadaya terhadap potensi diri dan juga potensi alam, sehingga langkah-langkah yang diambil dalam pengentasan kemiskinan merupakan langkah yang tepat dan strategis.
3. Melakukan pendataan terhadap masyarakat terutama masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang telah disepakati masyarakat setempat sehingga bantuan yang diberikan akan tepat pada sasarannya dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari program P2KP ini.
4. Hasil dari penggalian potensi dan pendataan yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga data yang diperoleh menjadi bahan bagi masyarakat untuk menyusun dan merencanakan secara partisipatif PJM Pronangkis dan Rencana Tahunan selama 3 (tiga) tahun.

Sasaran yang ingin dicapai dari program P2KP di Kelurahan Kampung Baru dapat dibagi menjadi sasaran umum dan sasaran khusus. Sasaran secara umumnya adalah bahwa segala bentuk bantuan yang disediakan oleh P2KP hanya ditujukan kepada keluarga miskin yang berdomisili di Kelurahan Kampung Baru.

Sedangkan secara khususnya adalah bahwa penerima bantuan P2KP hanya kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang terbentuk dari sekumpulan orang perorangan yang berasal dari keluarga miskin guna secara bersama meningkatkan diri untuk menerima, mengelola, bertanggungjawab terhadap bantuan dana yang telah diterimanya.

Berdasarkan dari hasil pemetaan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat diketahui bahwa lemahnya ekonomi dan rendahnya sumber daya manusia dipengaruhi oleh kurangnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan potensi alam di sekitarnya selain itu juga dipengaruhi oleh kurangnya sarana prasarana lingkungan, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Kampung Baru serta sasaran kegiatan adalah :

1. Aspek sarana dan prasarana lingkungan

- a. Rehabilitasi gang - gang
- b. Pembuatan gorong-gorong
- c. Rehabilitasi saluran drainase

2. Aspek Ekonomi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

- a. Pelatihan keterampilan untuk menambah pengetahuan dan kemampuan dalam berusaha
- b. Pinjaman modal usaha / dana bergulir

3. Aspek Sosial

1. Bantuan sosial produktif ternak lele serta pelatihan santunan untuk anak yatim piatu.
2. Bantuan gizi posyandu, santunan bagi anak miskin putus sekolah

3. Bantuan sosial produktif ternak ayam
4. Beasiswa
5. Pelatihan karangan bunga
6. Bantuan gizi posyandu
7. Bantuan pedagang kecil berupa transport
8. Usaha kelompok home industri

Untuk mengantisipasi dan menanggulangi kemiskinan yang ada di wilayah ini dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga perlu adanya tindakan nyata dari berbagai pihak yang peduli dalam masalah ini, termasuk merumuskan strategi dalam penanggulangan kemiskinan. Berkaitan dengan maksud tersebut, maka berikut adalah rumusan strategi dalam penanggulangan kemiskinan Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

Selain saasaran yang diuraikan di atas, berikut ini adalah kegiatan pokok agar program dapat berjalan dengan baik dalam penanggulangan kemiskinan :

- a. Penguatan kelembagaan masyarakat yang dibentuk sesuai dengan kesepakatan dan didukung oleh warga masyarakat dengan berdasarkan pada nilai-nilai universal dan kemasyarakatan.
- b. Peningkatan kapasitas untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan sebagai pendukung dalam melakukan aktivitas warga yang melibatkan semua komponen masyarakat baik laki-laki maupun perempuan

- d. Pemberdayaan masyarakat lewat pemberian bantuan/tambahan modal untuk usaha-usaha produktif
- e. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, baik pusat maupun lokal dan lembaga lain yang memiliki komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan
- f. Memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sosial dan bantuan teknis.

B. Karakteristik dan Deskripsi Data Responden

Data Penelitian berhasil dikumpulkan dari 68 kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai responden yang berada di Kelurahan Kampung Baru tersebar didua puluh satu lingkungan mulai dari lingkungan I sampai XXI, kecuali lingkungan XV tidak menjadi lokasi penelitian karena masyarakat di lingkungan ini merupakan komplek Perumahan PPKS dan penduduknya tidak ada yang tergolong keluarga miskin. Rata-rata dari masing-masing variabel tersaji pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Rata-rata, Kategori Skor dan Persentase Responden Penelitian

No	Variabel Penelitian	Interval Skor	Kategori Skor	Rata-rata
1	Dinamika Kelompok (X ₁)	47 – 82 82,5 – 117 117,5 - 152 152,5 - 188	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	148,13 (T)
2	Karakteristik Program (X ₂)	15 - 26 26,5 - 38 38,5 - 50 50,5 - 60	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	50,63 (ST)
No	Variabel Penelitian	Interval Skor	Kategori Skor	Rata-rata
3	Dukungan Stakeholders (Y ₃)	32 - 59 59,5 - 83 83,5 - 107 107,5-128	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	86,7 (T)
4	Partisipasi Kelompok (Y ₁)	15 - 26 26,5 - 38 38,5 - 50	Sangat rendah Rendah Tinggi	42,16 (T)

		50,5 -60	Sangat tinggi	
5	Kemandirian Kelompok (Y ₂)	18 - 29,5 30 - 41,5 42 - 53,5 54 - 64	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	51,77 (T)

Sumber : Analisis Data

Keterangan : ST = sangat tinggi

T = tinggi

R = rendah

SR = sangat rendah

Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata untuk variabel dinamika kelompok, dukungan stakeholders, partisipasi kelompok dan kemandirian kelompok masuk dalam kategori tinggi sedangkan karakteristik program untuk rata-rata skornya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung berpendapat atau menilai tinggi terhadap karakteristik program dan kemandirian yang selama ini telah dilaksanakan. Berkaitan dengan ini, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam P2KP selama kurun waktu 3 tahun ini dinilai masyarakat sangat bagus dan berbeda dengan program-program pemberdayaan masyarakat sejenis lainnya yang pernah diterima oleh masyarakat Kelurahan Kampung Baru baik dari pemerintah, swasta, BUMN maupun LSM. Masyarakat lebih banyak dilibatkan secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. Masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dalam menganalisis potensi wilayahnya, menyusun rencana kegiatan dan mengajukan kebutuhan mereka, sehingga masyarakat benar-benar merasakan menjadi bagian yang penting dari kegiatan dan bukan hanya sebagai objek proyek seperti pengalaman mereka sebelumnya sehingga apa yang telah dilaksanakan tepat pada sasarannya dan masih berkelanjutan. *commit to user*

2. Bantuan yang diterima oleh masyarakat melalui P2KP ini baik bantuan sosial yang berupa hibah maupun bantuan modal usaha memberikan manfaat yang sangat besar bagi perbaikan kehidupan mereka. Melalui bantuan modal usaha yang digulirkan diharapkan dapat membangkitkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif sehingga mampu mengatasi kesulitan yang dialami mereka terutama didukung dengan adanya pembekalan berbagai keterampilan yang diberikan melalui program P2KP tersebut. Selain itu bantuan sarana dan prasana fisik/ lingkungan juga mendukung kelancaran kegiatan ekonomi.
3. Selain itu dukungan dari stakeholders seperti PT.Pertamina, Departemen Sosial, PT. Tricom, PT. Cemara Asri Real Estate yang secara sinergi antara BKM dan juga masyarakat ikut membantu dalam program pengentasan kemiskinan di wilayah ini melalui bantuan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat yang telah bergabung dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM), karena prinsip pemberdayaan masyarakat pada program P2KP ini bukan pemberdayaan secara perorangan tetapi secara kelompok. Kondisi seperti ini yang membuat masyarakat lebih mandiri, karena mereka yang telah mendapatkan bantuan sudah merasakan manfaat yang besar karena dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelumnya.
 - a. Tingkat Dinamika Kelompok (X_1)

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, diperoleh data penilaian responden terhadap dinamika kelompok (X_1). Sebaran data, deskripsi data penelitian variabel faktor dinamika kelompok (X_1) secara lengkap tertera pada Tabel 4.5.

Tabel 4.6. Distribusi Responen Berdasarkan Skor Dinamika Kelompok (X_1)

No.	Kriteria	Interval Skor	Banyaknya Responden	Persentase (%)
1.	Sangat rendah	47 -82	2	2,9

2.	Rendah	82,5 -117	3	4,4
3.	Tinggi	117,5 – 152	27	39,7
4.	Sangat Tinggi	152,5 - 180	36	54,41
Jumlah			68	100
Rata-rata			148,13	

Sumber: Analisis data

Pada Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa responden lebih banyak memberikan penilaian terhadap dinamika kelompok (X_1) pada kriteria sangat tinggi yaitu sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dari 68 (enam puluh delapan) orang atau sebesar 54,41 %. Rata-rata tingkat dinamika kelompok (X_1) berada pada 148,133 termasuk dalam kriteria tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menilai tinggi terhadap dinamika kelompok yang selama ini telah dilaksanakan.

Untuk melihat penilaian responden terhadap masing-masing sub variabel X_1 dapat dilihat pada Tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4.7. Distribusi Responen Berdasarkan Skor Sub Variabel Dinamika Kelompok (X_1)

No	Sub Variabel Penelitian	Interval Skor	Kriteria	Rata-rata
1	Tujuan ($X_{1.1}$)	11 -18,9 19 – 27,9 28 – 36,9 37 - 44	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	36,39 (ST)
2	Struktur Kelompok ($X_{1.2}$)	4 – 6,9 7 – 9,9 10 – 12,9 13 – 16	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	9,91 (T)
3	Fungsi dan Tugas ($X_{1.3}$)	4 -8,9 9 – 13,9 14 -18,9 19 – 24	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	20,13 (ST)
4	Pemeliharaan Kelompok ($X_{1.4}$)	9 -15,9 16 -22,9 23 – 28,9 29 -36	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi	28,41 (T)
5	Kekompakan	4 -89	Sangat rendah	

	Kelompok ($X_{1,5}$)	9 – 13,9 14 -18,9 19 – 24	Rendah Tinggi Sangat Tinggi	20,52 (ST)
6	Iklim Kelompok ($X_{1,6}$)	4 – 6,9 7 – 9,9 10 – 12,9 13 – 16	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	14,05 (ST)
7	Tekanan pada Kelompok ($X_{1,7}$)	2 -3,9 4 – 5,9 6 – 7,9 8 – 10	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	5,49 (R)
8	Efektifitas Kelompok ($X_{1,8}$)	4- 5,9 6 – 7,9 8 - 9,9 10 - 16	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	10,52 (ST)
9	Agenda Terselubung ($X_{1,9}$)	2 -3,9 4 – 5,9 6 – 7,9 8 – 10	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	2,98 (SR)

Sumber : Analisis Data

Keterangan : ST = sangat tinggi
T = tinggi
R = rendah
SR = sangat rendah

Pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa responden lebih banyak memberikan penilaian terhadap sub variabel tujuan kelompok ($X_{1,1}$) pada kriteria sangat tinggi yaitu sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dari 68 (enam puluh delapan) orang atau sebesar 70,58 %. Demikian dengan rata-rata sub variabel faktor tujuan kelompok ($X_{1,1}$), seperti tercantum pada Lampiran 15, berada pada 36,39 termasuk dalam kriteria tinggi dan terendah terdapat pada sub variabel agenda terselubung ($X_{1,9}$). Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menilai tinggi terhadap tujuan kelompok yang selama ini telah dilaksanakan.

b. Tingkat Karakteristik Program (X_2)

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, diperoleh data penilaian responden terhadap karakteristik program (X_2). Adapun deskripsi data berdasarkan kriteria, tersaji pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Distribusi Responden Berdasarkan Skor Terhadap Karakteristik Program (X_2)

No.	Kriteria	Interval Skor	Banyaknya Responden	Persentase (%)
1.	Sangat rendah	15 -26	0	0
2.	Rendah	26,5 - 38	1	1,47
3.	Tinggi	38,5 – 50	33	48,52
4.	Sangat Tinggi	50,5 – 60	34	50
Jumlah			68	100
Rata-rata				50,63

Sumber: Analisis data

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa responden lebih banyak memberikan penilaian terhadap karakteristik program (X_2) pada kriteria sangat tinggi yaitu sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dari 68 (enam puluh delapan) orang atau sebesar 50 %. Demikian dengan rata-rata variabel faktor karakteristik program (X_2), seperti tercantum pada Lampiran 16, berada pada kisaran skor 50,63 termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung berpendapat atau menilai sangat tinggi terhadap kegiatan karakteristik program (X_2) yang selama ini telah dilaksanakan.

Untuk melihat penilaian responden terhadap masing-masing sub variabel X_1 dapat dilihat pada Tabel 4.9 di bawah ini :

Tabel 4.9. Distribusi Responden Berdasarkan Skor Sub Variabel Karakteristik Program (X_2)

No	Sub Variabel Penelitian	Interval Skor	Kriteria	Rata-rata
1	Kejelasan Program ($X_{2.1}$)	10 -17,9 18 -25,9 26 – 33,9 34 -40	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	38,83 (ST)
2	Kesesuaian Jadwal ($X_{2.2}$)	5 – 8,9 9 – 12,9 13 -16,9 17 - 20	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	15,79 (T)

Sumber : Analisis Data *commit to user*

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa responden lebih banyak memberikan penilaian terhadap sub variabel kejelasan program (X_{21}) pada kriteria sangat tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 38,83, sedangkan sub variabel kesesuaian jadwal ($X_{2,2}$) dengan rata-rata 15,79 berada pada kriteria tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menilai tinggi terhadap kejelasan program yang selama ini telah dilaksanakan.

c. Tingkat Dukungan Stakeholders (X_3)

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, diperoleh data dukungan stakeholders (X_3). Adapun deskripsi data berdasarkan kriteria, tersaji pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Distribusi Responden Berdasarkan Skor Dukungan Stakeholders (X_3)

No.	Kriteria	Interval Skor	Banyaknya Responden	Persentase (%)
1.	Sangat rendah	32 – 59	-	0
2.	Rendah	59,5 -83	39	57,35
3.	Tinggi	83,5 - 107	16	23,52
4.	Sangat Tinggi	107,5 - 130	13	19,11
Jumlah			68	100
Rata-rata				86,7

Sumber : Analisis data

Pada Tabel 4.10. dapat dilihat bahwa sebesar 57,35 %, responden memberikan nilai variabel dukungan stakeholders (X_3) pada kriteria rendah. Demikian pula dengan rata-rata variabel faktor dukungan stakeholders (X_3), seperti tercantum pada Lampiran 17 berada pada kisaran nilai 86,7 termasuk dalam kriteria tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung berpendapat atau menilai bahwa dukungan stakeholders yang telah dilaksanakan adalah rendah.

Untuk melihat penilaian responden terhadap masing-masing sub variabel X_1 dapat dilihat pada Tabel 4.11 di bawah ini :

Tabel 4.11. Distribusi Responden Berdasarkan Skor Sub Variabel Dukungan Stakeholders (X_3)

No	Sub Variabel Penelitian	Interval Skor	Kriteria	Rata-rata
1	Kemampuan Fasilitator ($X_{3.1}$)	9 – 15,9 16 - 22,9 23 – 29,9 30 - 36	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	26,19 (T)
2	Efektifitas Pembinaan ($X_{3.2}$)	6 – 8,9 9 – 13,9 14 - 18,9 19 - 24	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	16,78 (T)
3	Peranan Pemimpin ($X_{1.3}$)	17 – 29,9 30 – 42,9 43 – 55,9 60 - 68	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	43,74 (T)

Sumber : Analisis Data

Pada Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa responden cenderung memberikan penilaian tinggi terhadap semua sub variabel baik terhadap sub variabel kemampuan fasilitator ($X_{3.1}$) dengan nilai rata-rata 26,19, efektifitas pembinaan ($X_{3.2}$) dengan nilai rata-rata sebesar 16,18 dan peranan pemimpin nilai rata-rata sebesar 43,74. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menilai tinggi terhadap dukungan stakeholder yang selama ini telah ikut melaksanakan program.

d. Tingkat Partisipasi Kelompok (Y_1)

Data Partisipasi kelompok (Y_1) telah diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan tersebut, diperoleh deskripsi data penelitian variabel partisipasi kelompok (Y_1) yang secara lengkap tertera pada Tabel 4.12 dan Tabel 4.13

Tabel 4.12. Distribusi Responden Berdasarkan Skor Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)

No.	Kriteria	Interval Skor	Banyaknya Responden	Persentase (%)
1.	Sangat rendah	15 - 26	3	0
2.	Rendah	26,5 – 38	23	1,47
3.	Tinggi	38,5 - 50	31	48,52
4.	Sangat Tinggi	50,5 - 60	11	50
Jumlah			68	100
Rata-rata				42,16

Sumber: Analisis data

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa sebesar 50 %, responden memberikan nilai variabel partisipasi kelompok (Y_1) pada kriteria sangat tinggi. Demikian pula dengan rata-rata variabel faktor partisipasi kelompok (Y_1), seperti tercantum pada Lampiran 18, yaitu berada pada kisaran 42,16 termasuk dalam kriteria tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung berpendapat atau menilai bahwa partisipasi kelompok yang selama ini telah dilaksanakan adalah tinggi.

Tabel 4.13. Distribusi Responden Berdasarkan Skor Sub Variabel Partisipasi Kelompok (Y_1)

No	Sub Variabel Penelitian	Interval Skor	Kriteria	Rata-rata
1	Derajat Kesukarelaan ($Y_{1.1}$)	2 - 3,9 4 - 5,9 6 - 7,9 8 - 10	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	6,57 (T)
2	Lingkup Keterlibatan ($Y_{1.2}$)	4- 5,5 6 - 7,5 8 - 9,5 10 - 12	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	11,04 (ST)
3	Frekuensi Kehadiran ($Y_{1.3}$)	3 - 4,9 5 - 6,9 7 - 8,9 9 - 12	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	8,25 (R)
4	Bentuk Kontribusi ($Y_{1.4}$)	3 - 4,9 5 - 6,9 7 - 8,9 9 - 12	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	8,26 (T)
5	Kualitas Partisipasi ($Y_{1.5}$)	3 - 4,9 5 - 6,9	Sangat rendah Rendah	8,01

		7 – 8,9 9 - 12	Tinggi Sangat Tinggi	(T)
--	--	-------------------	-------------------------	-----

Sumber : Analisis Data

Pada Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa responden memberikan penilaian terhadap sub variabel derajat kesukarelaan ($Y_{1.1}$) dengan rata-rata 6,57 berada pada dalam kriteria tinggi, rata-rata sub variabel lingkup keterlibatan ($Y_{1.2}$) 11,04 termasuk kriteria sangat tinggi, rata-rata sub variabel bentuk kontribusi ($Y_{1.4}$) 8,26 juga rata-rata sub variabel kualitas partisipasi ($Y_{1.5}$) 8,01 keduanya berada pada kriteria tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menilai bahwa partisipasi kelompok yang sudah terlaksana sudah tinggi.

e. Tingkat Kemandirian Kelompok (Y_2)

Data kemandirian kelompok (Y_2) telah diperoleh melalui pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan tersebut, diperoleh deskripsi data penelitian variabel kemandirian kelompok (Y_2) yang secara lengkap tersaji pada Tabel 4.14.

Untuk melihat penilaian responden terhadap masing-masing sub variabel X_1 dapat dilihat pada Tabel 4.15 di bawah ini :

Tabel 4.14. Distribusi Responen Berdasarkan Skor Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

No.	Kriteria	Interval Skor	Banyaknya Responden	Persentase (%)
1.	Sangat rendah	18 - 29,5	-	0
2.	Rendah	30 – 41,5	3	4,4
3.	Tinggi	42 - 53,5	41	60,29
4.	Sangat Tinggi	54 - 64	24	35,29
Jumlah			68	100
Rata-rata				51,77

Sumber: Analisis data

Pada Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa sebesar 60,29 %, responden memberikan nilai variabel kemandirian kelompok (Y_2) pada kriteria tinggi. Demikian pula dengan rata-rata variabel faktor kemandirian kelompok (Y_2) yaitu berada pada kisaran 51,77 termasuk dalam kriteria tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa responden cenderung berpendapat atau menilai bahwa kemandirian kelompok yang selama ini telah dilaksanakan adalah tinggi.

Tabel 4.15. Distribusi Responden Berdasarkan Skor Sub Variabel Kemandirian Kelompok (Y_2)

No	Variabel Penelitian	Interval Skor	Kriteria	Rata-rata
1	Rutinitas Pertemuan ($Y_{2.1}$)	2 -3,9 4 - 5,9 6 - 7,9 8 - 9,5	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	5,33 (R)
2	Kebersamaan Melaksanakan Kegiatan ($Y_{2.2}$)	3 - 4,9 5 - 6,9 7 - 8,9 9 - 12	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	9,99 (T)
3	Kepemilikan Norma ($Y_{2.3}$)	2 -3,9 4 - 5,9 6 - 7,9 8 - 9	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	7,31 (T)
4	Kepemilikan Catatan Administrasi ($Y_{2.4}$)	2 -3,9 4 - 5,9 6 - 7,9 8 - 10	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	7,66 (T)
5	Fasilitasi Kelompok ($Y_{2.5}$)	2 -3,9 4 - 5,9 6 - 7,9 8 - 10	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	3,11 (SR)
6	Fasilitasi Pelayanan Informasi ($Y_{2.6}$)	2 -3,9 4 - 5,9 6 - 7,9 8 - 10	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	5,88 (R)
7	Jalinan Kerjasama	4- 5,9 6 - 7,9	Sangat rendah Rendah	6,19

	(Y _{2.7})	8 - 9,9 10 - 12	Tinggi Sangat Tinggi	(R)
8	Pemupukan Modal (Y _{2.8})	2 -3,9 4 - 5,9 6 - 7,9 8 - 10	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	6,07 (T)

Sumber : Analisis Data

Pada Tabel 4.15 dapat dilihat bahwa responden penelitian cenderung memberikan penilaian tinggi terhadap empat sub variabel yaitu kebersamaan melaksanakan kegiatan (Y_{2.2}) dengan nilai rata-rata 9,99, sub variabel kepemilikan norma (Y_{2.3}) dengan rata-rata 7,31, kepemilikan catatan administrasi (Y_{2.4}) dengan nilai rata-rata 7,66 dan sub variabel pemupukan modal (Y_{2.8}) nilai rata-rata 6,07. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menilai tinggi terhadap kemandirian yang dihasilkan dari adanya program yang sudah dilaksanakan.

C. Prasyarat Analisis

Mengeacu pada Bab III sebelumnya bahwa data dianalisis menggunakan statistik analisis jalur, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis. Uji prasyarat analisis tersebut terdiri atas uji normalitas data, uji homogenitas variansi, uji linieritas dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas data yang terdiri dari uji normalitas data variabel (1) dinamika kelompok (X₁), (2) karakteristik program (X₂), (3) dukungan stakeholders (X₃), (4) partisipasi kelompok (Y₁) dan (4) kemandirian kelompok (Y₂), selengkapnya ditampilkan pada Lampiran 9. Adapun daftar hasil perhitungan secara ringkas dan keputusannya tertera pada Tabel 4.16.

commit to user

Tabel 4.16. Daftar Hasil Perhitungan Uji Normalitas

No.	Variabel	Kolmogoro v-Smirnov	Sig.	α	Keputusan ¹⁾
1.	Dinamika Kelompok (X_1)	0,215	0,000	0,05	Distribusi normal
2.	Karakteristik Program (X_2)	0,105	0,043	0,05	Distribusi normal
3.	Dukungan Stakeholders (X_3)	0,191	0,000	0,05	Distribusi normal
4.	Partisipasi Kelompok (Y_1)	0,092	0,200	0,05	Distribusi normal
5.	Kemandirian Kelompok (Y_2)	0,176	0,000	0,05	Distribusi normal

Sumber: Hasil analisis statistik pada Lampiran 9.

Tabel 4.16 memperlihatkan bahwa data penelitian untuk variabel X_1 , X_2 , X_3 , Y_1 dan Y_2 seluruhnya berdistribusi normal karena masing-masing nilai kolmogorov-smirnov tidak berada pada wilayah H_1 diterima yang dibuktikan dengan nilai sign hasil perhitungan lebih besar dari pada α , tetapi sebagian berada pada wilayah H_1 diterima. Hasil uji yang menyatakan bahwa data berdistribusi normal tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan uji parametrik yang pada penelitian ini adalah analisis jalur.

b. Uji Homogenitas

Hasil uji homogenitas variansi pengembangan dinamika kelompok (X_1), karakteristk program (X_2), dukungan stakeholders (X_3), partisipasi kelompok (Y_1) dan kemandirian kelompok tani (Y_2), selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. Adapun daftar hasil perhitungan secara ringkas dan keputusannya tertera pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17. Hasil Uji Homogenitas

F_{hitung}	F_{tabel}	Hasil Perbandingan	Keputusan ¹⁾
23,999	1,482	$F_{hitung} > F_{tabel}$	H_1 diterima

Sumber: Hasil analisis statistik pada Lampiran 10.

Keterangan:

¹⁾ H_1 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

H_1 ditolak jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa data penelitian memiliki variansi yang sama atau homogen karena nilai F_{hitung} berada pada wilayah H_1 diterima yaitu lebih

commit to user

besar dari pada F_{tabel} . Dengan demikian syarat bahwa data memiliki variansi yang homogen untuk dilakukannya uji statistik parametrik dapat terpenuhi.

c. Uji Linearitas

Pengujian linearitas dilakukan dengan statistik uji F menggunakan program SPSS yang menghasilkan nilai F_{hitung} dan nilai sign. Pengujian dilakukan pada taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$) menunjukkan dan keputusannya untuk model 1 maupun model 2 seperti tertera pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18. Daftar Hasil Perhitungan Uji Linearitas

No.	Uraian	F hitung	Sig.	α	Keputusan ¹⁾
1.	Model 1 ²⁾	9,396	0,000	0,05	Linear
2.	Model 2 ³⁾	23,897	0,000	0,05	Linear

Sumber: Hasil analisis statistik pada Lampiran 11

Keterangan:

- 1) Terdapat hubungan linear bila nilai sign $\leq \alpha$
Tidak terdapat hubungan linear bila nilai sign $> \alpha$
- 2) Pengaruh Dinamika Kelompok, Karakteristik Program, dan Dukungan Stakeholders terhadap Partisipasi Kelompok
- 3) Pengaruh Dinamika Kelompok, Karakteristik Program, Dukungan Stakeholders, Partisipasi Kelompok terhadap Kemandirian Kelompok

Tabel 4.18 memperlihatkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat baik untuk model 1 maupun model 2. Terjadinya hubungan yang linear ini memenuhi syarat dilakukannya uji analisis jalur sebagaimana yang disyaratkan Sudjana (2003).

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan statistik uji d (Durbin-Watson) menggunakan program SPSS yang menghasilkan nilai d. Pengujian dilakukan pada taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$) menunjukkan dan keputusannya untuk model 1 maupun model 2 tertera pada Tabel 4.19

Tabel 4.19. Daftar Hasil Perhitungan Uji Autokorelasi

No.	Uraian	Nilai d	Daerah tidak terjadi Autokorelasi	Keputusan
1.	Model 1 ¹⁾	1,962	1,57 sampai.dengan 2,67	Tidak ada Auto korelasi
2.	Model 2 ²⁾	2,083	1,61 sampai.dengan 2,70	Tidak ada Auto korelasi

Sumber: Hasil analisis statistik pada Lampiran 12.

Keterangan:

- 1) Pengaruh Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program, (X_2) dan Dukungan Stakeholders (X_3) terhadap Partisipasi Petani (Y_1)
- 2) Pengaruh Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2), Dukungan Stakeholders (X_3) dan Partisipasi Petani (Y_1) terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik untuk model 1 maupun model 2. Tidak terjadinya autokorelasi disebabkan oleh dilai d (Durbin-Watson) berada pada daerah H_0 diterima yaitu beradara pada $d_v < d < 4 - d_L$. Tidak terjadinya autokorelasi ini memenuhi syarat dilakukannya uji analisis jalur sebagaimana yang disyaratkan Sudjana (2003).

Berdasarkan uji prasyarat analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas dan uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh adalah:

1. Data berdistribusi normal untuk semua variabel,
2. Variansi data secara keseluruhan adalah homogen,
3. Terjadi hubungan linearitas antar variabel baik pada model 1 (pengaruh dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders terhadap partisipasi kelompok) maupun model 2 (dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok terhadap kemandirian kelompok tani), dan

4. Tidak terjadi autokorelasi baik pada model 1 maupun model 2 Berdasarkan penjelasan diatas memenuhi syarat untuk dilakukannya analisis jalur dapat terpenuhi.

D. Uji Analisis Jalur

A. Model 1. Pengaruh Dinamika Kelompok, Karakteristik Program dan Dukungan Stakeholders terhadap Partisipasi Kelompok.

1. Pengaruh Gabungan Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2) dan Dukunga Stakeholders (X_3) Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)

Persamaan strukturalnya:

$$Y_1 = \beta_{Y_1X_1}X_1 + \beta_{Y_1X_2}X_2 + \beta_{Y_1X_3}X_3 + \epsilon_1$$

Dimana :

Y_1 = Partisipasi kelompok

X_1 = Dinamika kelompok

X_2 = Karakteristik Program

X_3 = Dukungan stakeholders

Untuk melihat pengaruh variabel dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders secara gabungan terhadap partisipasi kelompok, maka dilakukan perhitungan menggunakan SPSS untuk mendapatkan nilai R^2 (R square). Untuk mengetahui apakah besarnya nilai R^2 dan nilai koefisien dapat diterima secara statistik, dilakukan uji melalui uji F.

Pengujian linearitas dilakukan dengan statistik uji F menggunakan program SPSS yang menghasilkan nilai F_{hitung} dan nilai sign. Pengujian dilakukan pada taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria pengujian:

- H_1 diterima atau terdapat hubungan linier jika nilai F penelitian $>$ F tabel
- H_1 ditolak atau tidak terdapat hubungan linier jika nilai F penelitian $<$ F tabel

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS (lampiran 14) diperoleh nilai F hitung, nilai sign dan keputusannya tertera pada Tabel 4.20.



Tabel 4.20. Daftar Hasil Perhitungan Uji Linearitas Model 1

Uraian	R ²	F hitung	Sig.	α	Keputusan ¹⁾
Model 1 ²⁾	0,301	9,396	0,000	0,05	Linear

Keterangan:

- 1) Terdapat hubungan linear bila nilai sign $\leq \alpha$
Tidak terdapat hubungan linear bila nilai sign $> \alpha$
- 2) Pengaruh Dinamika Kelompok, Karakteristik Program, dan Dukungan Stakeholders terhadap Partisipasi Kelompok

Besarnya angka R square adalah 0,306. Angka ini menyatakan besarnya pengaruh dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders secara gabungan terhadap partisipasi kelompok dengan menghitung koefisien (KD) dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 KD &= (r^2) \times 100 \% \\
 &= 0,306 \times 100 \% \\
 &= 30,6 \%
 \end{aligned}$$

Nilai yang diperoleh sebesar 30,6 % mempunyai arti bahwa pengaruh dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders terhadap partisipasi kelompok secara gabungan adalah 30,6 %, sedangkan sisanya 69,4 % dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, variabilitas partisipasi kelompok yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders adalah sebesar 30,6 % sedangkan pengaruh sebesar 69,4% disebabkan oleh variabel-variabel di luar model ini.

Pengujian hipotesis juga dilakukan dengan membandingkan besarnya angka F penelitian dengan F tabel. Dari hasil perhitungan didapatkan angka F penelitian sebesar $9,936 > 1,482$ sehingga H1 diterima. Artinya, ada hubungan linear antara dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders dengan partisipasi kelompok. Dengan demikian berarti dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders secara gabungan mempengaruhi partisipasi

kelompok. Besarnya pengaruh adalah 30,6%. Besarnya pengaruh variabel lain di luar model regresi tersebut dihitung dengan rumus: $1 - r^2$ atau sebesar 69,4% .

2. Pengaruh Partial Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program(X_2) dan Dukungan Stakeholders (X_3) Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders terhadap partisipasi kelompok secara sendiri-sendiri/partial, digunakan uji t, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh digunakan angka Beta atau Standardized Coefficient sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 17 (Lampiran 14), diperoleh nilai regresi, t hitung dan nilai sign yang tertera pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21. Hasil Uji Analisis Jalur Faktor Dinamika kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2) dan Dukungan Stakeholders (X_3) Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)

Variabel	Koefisien jalur	t	Sign	Keputusan ¹⁾
Dinamika Kelompok (X_1)	0,150	1,374	0,174	H1 ditolak
Karakteristik Program (X_2)	0,413*	2,622	0,011	H1 diterima
Dukungan Stakeholders (X_3)	0,116	0,716	0,477	H1 ditolak

Tabel 4.21 menunjukkan bahwa hasil analisis menyatakan bahwa faktor dinamika kelompok (X_1) dan faktor dukungan stakeholders (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi kelompok (Y_1) yang dibuktikan dengan ditolaknya H_1 karena nilai sign $> \alpha$. Besarnya pengaruh langsung faktor dinamika kelompok (X_1) terhadap partisipasi kelompok (Y_1) ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,171 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan faktor dinamika kelompok (X_1) terhadap partisipasi kelompok (Y_1) karena hanya memberi pengaruh sebesar 2,25 % ($0,150^2 \times 100$ %), sedangkan koefisien jalur (P_{43}) sebesar 0,116 yang berarti bahwa terdapat pengaruh langsung yang signifikan faktor

dukungan stakeholders (X_3) terhadap partisipasi kelompok (Y_1) sebesar 1,35 % ($0,116^2 \times 100$ %).

Besarnya pengaruh langsung faktor karakteristik program (X_2) terhadap partisipasi kelompok (Y_1) ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur (P_{42}). Nilai P_{42} pada Tabel 4.14 sebesar 0,413 yang berarti bahwa terdapat pengaruh langsung yang signifikan faktor karakteristik program (X_2) terhadap partisipasi kelompok (Y_1) sebesar 17,05 % ($0,413^2 \times 100$ %).

a. Pengaruh Sub Variabel Dinamika Kelompok (X_1) Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)

Untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing sub variabel X_1 terhadap partisipasi kelompok (Y_1) seperti yang tertera Tabel 4.22 di bawah ini.

Tabel 4.22. Hasil Uji Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Dinamika Kelompok (X_1) Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)

Variabel	Koefisien jalur	t	Sign	Keputusan ¹⁾
Tujuan Kelompok (X_{11})	0,103	-0.099	0.770	H1 ditolak
Struktur Kelompok (X_{12})	-0,137	0.411	0.591	H1 ditolak
Fungsi dan Tugas (X_{13})	0,668	-0.432	0.029	H1 diterima
Pemeliharaan Kelompok (X_{14})	-0,296	0.002	0.381	H1 ditolak
Kekompakan Kelompok (X_{15})	-0.099	-0.141	0.805	H1 ditolak
Iklim Kelompok (X_{16})	0.411	-0.099	0.254	H1 ditolak
Tekanan pada Kelompok (X_{17})	-0.432	0.411	0.038	H1 diterima
Efektifitas Kelompok (X_{18})	0.002	-0.432	0.995	H1 ditolak
Agenda Terselubung (X_{19})	-0.141	0.002	0.353	H1 ditolak

Pada Tabel 4.22. Hasil analisis menunjukkan bahwa sub variabel dari faktor dinamika kelompok yaitu fungsi dan tugas (X_{13}) dan tekanan pada kelompok (X_{17}) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi kelompok (Y_1) meskipun secara bersama variabel dinamika kelompok tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi kelompok.

b. Pengaruh Sub Variabel Karakteristik Program (X_2) Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)

Untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing sub variabel X_2 terhadap partisipasi kelompok (Y_1) seperti yang tertera Tabel 4.23 di bawah ini.

Tabel 4.23. Hasil Uji Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Karakteristik Program (X_2) Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)

Variabel	Koefisien jalur	t	Sign	Keputusan ¹⁾
Kejelasan Program (X_{21})	0,338	2.722	0,008	H1 diterima
Kesesuaian Jadwal (X_{22})	0,257	2.068	0,043	H1 diterima

Pada Tabel 4.23 hasil analisis dari sub variabel karakteristik program (X_2) menunjukkan bahwa seluruh sub variabel berpengaruh signifikan terhadap partisipasi kelompok (Y_1) yang ditunjukkan dengan nilai sign $< \alpha$.

c. Pengaruh Sub Variabel Dukungan Stakeholders (X_3) Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)

Untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing sub variabel X_2 terhadap partisipasi kelompok (Y_1) seperti yang tertera Tabel 4.24 di bawah ini.

Tabel 4.24. Hasil Uji Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Dukungan Stakeholders (X_3) Terhadap Partisipasi Kelompok (Y_1)

Variabel	Koefisien jalur	t	Sign	Keputusan ¹⁾
Kemampuan Fasilitator (X_{31})	0,367	2.225	0,030	H1 diterima
Efektifitas Pembinaan (X_{32})	0,356	1.890	0,063	H1 ditolak
Peranan Pemimpin (X_{33})	-0,170	-0.848	0,400	H1 ditolak

Pada Tabel 4.24 hasil analisis menunjukkan bahwa sub variabel kemampuan fasilitator (X_{31}) berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi kelompok (Y_1), sedangkan sub variabel efektifitas pembinaan (X_{32}) memiliki kecenderungan signifikan terhadap partisipasi kelompok tetapi pada taraf sign

commit to user

0,063, meskipun secara bersama variabel dukungan stakeholders (X_3) memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap partisipasi kelompok.

3. Korelasi antara Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2), Dukungan Stakeholders (X_3) dan Partisipasi Kelompok (Y_1)

H_1 : Terdapat korelasi antara faktor dinamika kelompok (X_1), karakteristik program (X_2), dukungan stakeholders (X_3) dan partisipasi kelompok (Y_1)

H_0 : Tidak terdapat korelasi antara faktor dinamika kelompok (X_1), karakteristik program (X_2), dukungan stakeholders (X_3) dan partisipasi kelompok (Y_1)

H_1 : $r \neq 0$, H_0 : $r = 0$

Pengujian dilakukan dengan statistik menggunakan program SPSS 17 yang menghasilkan nilai r_{14} , r_{24} , r_{34} , r_{13} , r_{23} , r_{12} dan nilai sign. Pengujian dilakukan pada taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria pengujian:

- H_1 diterima jika nilai sign $< \alpha$
- H_1 ditolak jika nilai sign $\geq \alpha$

Hasil perhitungan menggunakan SPSS 17 (Lampiran 14), diperoleh nilai r_{12} , r_{13} , r_{14} , r_{23} , r_{24} , r_{34} dan nilai sign serta keputusannya tertera pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25. Hasil Uji Korelasi Antar Variabel Model 1

No	Uraian	Nilai r	Sign	α	Keputusan
1.	Korelasi X_1 dengan Y_1 (r_{14})	0,240	0,049	0,05	H_1 diterima
	Korelasi X_{11} dengan Y_1	0,274	0,024	0,05	H_1 diterima
	Korelasi X_{12} dengan Y_1	0,218	0,073	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{13} dengan Y_1	0,301	0,013	0,05	H_1 diterima
	Korelasi X_{14} dengan Y_1	0,179	0,143	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{15} dengan Y_1	0,225	0,066	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{16} dengan Y_1	0,215	0,079	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{17} dengan Y_1	0,049	0,690	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{18} dengan Y_1	0,229	0,061	0,05	H_1 ditolak
2.	Korelasi X_2 dengan Y_1 (r_{24})	0,522	0,000	0,05	H_1 diterima
	Korelasi X_{21} dengan Y_1^{**}	0,474	0,000	0,05	H_1 diterima
	Korelasi X_{22} dengan Y_1^{**}	0,435	0,000	0,05	H_1 diterima
3.	Korelasi X_3 dengan Y_1 (r_{34})	0,467	0,000	0,05	H_1 diterima
	Korelasi X_{31} dengan Y_1	0,491	0,000	0,05	H_1 diterima
	Korelasi X_{32} dengan Y_1	0,477	0,000	0,05	H_1 diterima
	Korelasi X_{33} dengan Y_1	0,394	0,001	0,05	H_1 diterima

4.	Korelasi X_1 dengan X_3 (r_{13})	0,275	0,000	0,05	H_1 diterima
5.	Korelasi X_2 dengan X_3 (r_{23})	0,748	0,000	0,05	H_1 diterima
6.	Korelasi X_1 dengan X_2 (r_{12})	0,142	0,249	0,05	H_1 ditolak

Sumber: Hasil analisis statistik pada lampiran 13.

Berdasarkan uji statistik yang tertera pada Tabel 4.25 diperoleh hasil bahwa dari seluruh sub variabel X_1 terdapat dua sub variabel yaitu X_{11} dan X_{13} berkorelasi secara signifikan terhadap partisipasi kelompok (Y_1), sedangkan untuk faktor karakteristik program (X_2) dan dukungan stakeholders (X_3) seluruh sub variabel baik X_{21} dan X_{22} , X_{31} , X_{32} , X_{33} terjadi korelasi yang signifikan. Keputusan ini dibuktikan dengan diterimanya H_1 yang disebabkan oleh nilai sign lebih kecil dari pada α . Begitu juga dengan korelasi antar variabel X_1 dengan X_3 , X_2 dengan X_3 juga berkorelasi signifikan, sedangkan X_1 tidak berkorelasi dengan X_2 .

B. Model 2. Pengaruh Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2), Dukungan Stakeholders (X_3), Partisipasi Kelompok (Y_1) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

- 1) Pengaruh Gabungan Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2), Dukungan Stakeholders (X_3) dan Partisipasi Kelompok (Y_1) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

Persamaan strukturalnya:

$$Y_2 = \beta_{Y_2X_1}X_1 + \beta_{Y_2X_2}X_2 + \beta_{Y_2X_3}X_3 + \beta_{Y_2Y_1}Y_1 + \epsilon$$

Dimana : Y_2 = Kemandirian Kelompok

X_1 = Dinamika Kelompok

X_2 = Karakteristik Program

X_3 = Dukungan Stakeholders

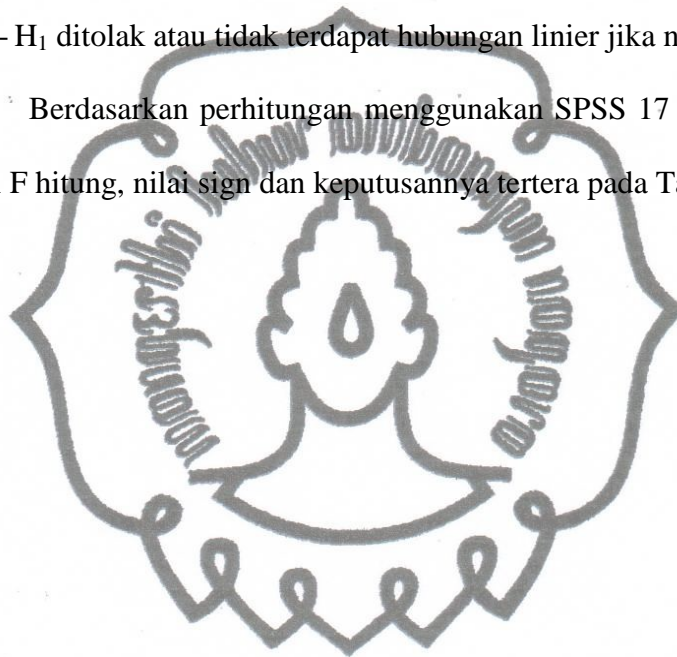
Untuk melihat pengaruh Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2), Dukungan Stakeholders (X_3) dan Partisipasi Kelompok (Y_1) secara gabungan terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2), dilakukan perhitungan menggunakan SPSS untuk mendapatkan nilai R^2 (R square). Untuk mengetahui

apakah besarnya nilai R^2 dan nilai koefisien dapat diterima secara statistik, dilakukan uji melalui uji F.

Pengujian linearitas dilakukan dengan statistik uji F menggunakan program SPSS 17 yang menghasilkan nilai F_{hitung} dan nilai sign. Pengujian dilakukan pada taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria pengujian:

- H_1 diterima atau terdapat hubungan linier jika nilai sign $\leq \alpha$
- H_1 ditolak atau tidak terdapat hubungan linier jika nilai sign $> \alpha$

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 17 (Lampiran 14), diperoleh nilai F hitung, nilai sign dan keputusannya tertera pada Tabel 4.26.



Tabel 4.26. Daftar Hasil Perhitungan Uji Linearitas Model 2

Uraian	R ²	F hitung	Sig.	α	Keputusan ¹⁾
Model 1 ²⁾	0,603	23,897	0,000	0,05	Linear

Sumber: Hasil analisis statistik pada lampiran 14.

Keterangan:

¹⁾ Terdapat hubungan linear bila nilai sign $\leq \alpha$

Tidak terdapat hubungan linear bila nilai sign $> \alpha$

²⁾ Pengaruh Dinamika Kelompok, Karakteristik Program, dan Dukungan Stakeholders dan Partisipasi Kelompok Terhadap Kemandirian Kelompok

Tabel 4.26 memperlihatkan bahwa uji linearitas model 2 menghasilkan keputusan bahwa H₁ diterima atau terdapat hubungan linier antara dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders secara gabungan dengan kemandirian kelompok karena nilai sign $< \alpha$.

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 17, diperoleh besarnya angka R squar (R²) adalah 0,603. Angka tersebut untuk melihat besarnya pengaruh dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok terhadap kemandirian kelompok dengan menghitung koefisien determinasi (KD) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 KD &= (r^2) \times 100 \% \\
 &= 0,603 \times 100 \% \\
 &= 60,3 \%
 \end{aligned}$$

Nilai yang diperoleh sebesar 60,3 % mempunyai arti bahwa pengaruh dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok secara gabungan terhadap kemandirian kelompok adalah 60,3 % sedangkan sisanya 39,7 % dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan kata lain, variabilitas kemandirian kelompok yang dapat diterangkan dengan menggunakan variabel dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok adalah sebesar 60,3 % sedangkan pengaruh sebesar 39,7 %

disebabkan oleh variabel-variabel di luar model ini yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

2. Pengaruh Partial Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2), Dukungan Stakeholders (X_3) dan Partisipasi Kelompok (Y_1) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

Untuk melihat besarnya pengaruh dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok terhadap kemandirian kelompok secara parsial/sendiri-sendiri, digunakan uji T, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh, digunakan angka Beta atau standardized coefficient di bawah ini :

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS 17 (lampiran 14), diperoleh regresi, nilai t hitung, nilai sign dan keputusannya tertera pada Tabel 4.27

Tabel 4.27. Hasil Uji Analisis Jalur Faktor Dinamika kelompok (X_1) Karakteristik Program (X_2), Dukungan Stakeholders (X_3) dan Partisipasi Kelompok (Y_1) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

Variabel	Koefisien jalur	t	Sign	Keputusan ¹⁾
Dinamika Kelompok (X_1)	0,015	0,173	0,863	H1 ditolak
Karakteristik Program (X_2)	0,054	0,422	0,671	H1 ditolak
Dukungan Stakeholders (X_3)	0,053	0,423	0,677	H1 ditolak
Kemandirian Kelompok (Y_1)	0,715*	7,505	0,000	H1 diterima

Tabel 4.27 hasil analisis menunjukkan bahwa faktor dinamika kelompok (X_1), faktor karakteristik program (X_2) dan faktor dukungan stakeholders (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian kelompok (Y_1) yang dibuktikan dengan ditolaknya H_1 karena nilai sign $> \alpha$. Besarnya pengaruh langsung faktor dinamika kelompok (X_1) terhadap kemandirian kelompok (Y_2) ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur (P_{51}) sebesar 0,015 yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan faktor dinamika kelompok (X_1)

terhadap kemandirian kelompok (Y_2) karena pengaruh yang diberikan sangat kecil yaitu hanya 0,0225 % ($0,015^2 \times 100$ %).

Besarnya pengaruh langsung faktor karakteristik program (X_2) terhadap kemandirian kelompok (Y_2) ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur (P_{52}) sebesar 0,054 yang berarti bahwa pengaruh yang diberikan sangat kecil yaitu hanya 0,0292 % ($0,054^2 \times 100$ %), sedangkan besarnya pengaruh langsung faktor dukungan stakeholders (X_1) terhadap kemandirian kelompok (Y_2) ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur (P_{53}) sebesar 0,053 yang berarti faktor karakteristik program (X_2) terhadap kemandirian kelompok (Y_2) memberikan pengaruh yang sangat kecil yaitu hanya 0,028 % ($0,053^2 \times 100$ %).

Tabel 4.27 hasil analisis menunjukkan bahwa faktor partisipasi kelompok (Y_1) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian kelompok (Y_2) yang dibuktikan diterimanya H_1 karena nilai $\text{sign} < \alpha$. Besarnya pengaruh langsung faktor partisipasi kelompok (X_1) terhadap kemandirian kelompok (Y_2) ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur (P_{54}) sebesar 0,715 yang berarti bahwa pengaruh yang diberikan faktor partisipasi kelompok (Y_1) terhadap kemandirian kelompok (Y_2) sangat besar yaitu 51,12 % ($0,715^2 \times 100$ %).

a. Pengaruh Sub Variabel Dinamika Kelompok (X_1) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

Untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing sub variabel X_1 terhadap kemandirian kelompok (Y_2) seperti yang tertera Tabel 4.28 di bawah ini.

Tabel 4.28. Hasil Uji Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Dinamika kelompok (X_1) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

Variabel	Koefisien jalur	t	Sign	Keputusan ¹⁾
Tujuan Kelompok ($X_{1,1}$)	0.266	0.756	0.452	H1 ditolak
Struktur Kelompok ($X_{1,2}$)	-0.417	-1.633	0.108	H1 ditolak

Fungsi dan Tugas ($X_{1.3}$)	0.488	1.630	0.108	H1 ditolak
Pemeliharaan Kelompok ($X_{1.4}$)	-0.329	-0.974	0.334	H1 ditolak
Kekompakan Kelompok ($X_{1.5}$)	-0.490	-1.217	0.229	H1 ditolak
Iklim Kelompok ($X_{1.6}$)	0.879	2.452	0.017	H1 diterima
Tekanan pada Kelompok ($X_{1.7}$)	-0.221	-1.081	0.284	H1 ditolak
Efektifitas Kelompok ($X_{1.8}$)	-0.017	-0.065	0.948	H1 ditolak
Agenda Terselubung ($X_{1.9}$)	0.017	0.111	0.912	H1 ditolak

Pada Tabel 4.28 hasil analisis menunjukkan bahwa ada satu sub variabel dari faktor dinamika kelompok yaitu iklim kelompok ($X_{1.6}$) yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian kelompok (Y_2), sedangkan sub variabel yang lain tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian kelompok.

b. Pengaruh Sub Variabel Karakteristik Program (X_2) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

Untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing sub variabel X_2 terhadap kemandirian kelompok (Y_2) seperti yang tertera Tabel 4.29 di bawah ini.

Tabel 4.29. Hasil Uji Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Karakteristik Program (X_2) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

Variabel	Koefisien jalur	t	Sign	Keputusan ¹⁾
Kejelasan Program ($X_{2.1}$)	.428	3.357	.001	H1 diterima
Kesesuaian Jadwal ($X_{2.2}$)	.093	.726	.470	H1 ditolak

Pada Tabel 4.29 Hasil analisis bahwa satu dari dua sub variabel karakteristik program (X_2) yaitu kejelasan program ($X_{2.1}$) berpengaruh signifikan terhadap kemandirian kelompok (Y_2), sedangkan sub variabel kesesuaian jadwal ($X_{2.2}$) berpengaruh tidak signifikan terhadap kemandirian kelompok (Y_2), yang ditunjukkan dengan nilai sign $< \alpha$.

c. Pengaruh Sub Variabel Dukungan Stakeholders (X_3) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

Untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing sub variabel X_2 terhadap kemandirian kelompok (Y_2) seperti yang tertera Tabel 4.30 di bawah ini.

Tabel 4.30. Hasil Uji Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Dukungan Stakeholders (X_3) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

Variabel	Koefisien jalur	t	Sign	Keputusan ¹⁾
Kemampuan Fasilitator ($X_{3.1}$)	.171	.971	.335	H1 ditolak
Efektifitas Pembinaan ($X_{3.2}$)	.017	.086	.931	H1 ditolak
Peranan Pemimpin ($X_{3.3}$)	.274	1.280	.205	H1 ditolak

Pada Tabel 4.30 hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh sub variabel dukungan stakeholders tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kemandirian kelompok (Y_2).

d. Pengaruh Sub Variabel Partisipasi Kelompok (Y_1) Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

Untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing sub variabel Y_1 terhadap kemandirian kelompok (Y_2) seperti yang tertera Tabel 4.31 di bawah ini.

Tabel 4.31. Hasil Uji Analisis Jalur Faktor Sub Variabel Partisipasi Kelompok (Y_1), Terhadap Kemandirian Kelompok (Y_2)

Variabel	Koefisien jalur	t	Sign	Keputusan ¹⁾
Derajat Kesukarelaan ($Y_{1.1}$)	0.205	1.984	0.052	H1 diterima
Lingkup Keterlibatan ($Y_{1.2}$)	-0.167	-1.059	0.294	H1 ditolak
Frekuensi Kehadiran ($Y_{1.3}$)	0.154	0.996	0.323	H1 ditolak
Bentuk Kontribusi ($Y_{1.4}$)	0.465	4.681	0.000	H1 diterima
Kualitas Partisipasi ($Y_{1.5}$)	0.377	3.660	0.001	H1 diterima

Pada Tabel 4.31 hasil analisis menunjukkan bahwa tiga dari lima sub variabel partisipasi kelompok yaitu $Y_{1.1}$, $Y_{1.4}$ dan $Y_{1.5}$ berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian kelompok (Y_2) dan dua yang tidak signifikan terhadap kemandirian kelompok yaitu $Y_{1.2}$ dan $Y_{1.3}$

3. Korelasi antara Dinamika Kelompok (X_1), Karakteristik Program (X_2), Dukungan Stakeholders (X_3), Partisipasi Kelompok (Y_1) dan Kemandirian Kelompok (Y_2)

H_1 : Terdapat korelasi antara faktor dinamika kelompok (X_1), karakteristik program (X_2), dukungan stakeholders (X_3), partisipasi kelompok (Y_1) dan kemandirian kelompok (Y_2)

H_0 : Tidak terdapat korelasi antara faktor dinamika kelompok (X_1), karakteristik program (X_2), dukungan stakeholders (X_3), partisipasi kelompok (Y_1) dan kemandirian kelompok (Y_2)

$H_1 : r \neq 0$

$H_0 : r = 0$

Pengujian dilakukan dengan statistik menggunakan program SPSS 17 yang menghasilkan nilai r_{15} , r_{25} , r_{35} , r_{45} , r_{34} , r_{32} , r_{31} , r_{24} , r_{23} , r_{21} dan nilai sign. Pengujian dilakukan pada taraf nyata 5% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria pengujian:

- H_1 diterima jika nilai sign $< \alpha$

- H_1 ditolak jika nilai sign $\geq \alpha$

Hasil perhitungan menggunakan SPSS 17 (Lampiran 14), diperoleh nilai r_{y25} , r_{3y2} , r_{y1y2} , r_{3y1} , r_{32} , r_{31} , r_{2y1} , r_{23} , r_{21} dan nilai sign serta keputusannya tertera pada

Tabel 4.32

Tabel 4.32. Hasil Uji Korelasi Antar Variabel Model 2

No	Uraian	Nilai r	Sign	α	Keputusan
1.	Korelasi X_1 dengan Y_2 (r_{1y2})	0,208	0,088	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{11} dengan Y_2	0,230	0,060	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{12} dengan Y_2	0,128	0,297	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{13} dengan Y_2	0,218	0,074	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{14} dengan Y_2	0,155	0,206	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{15} dengan Y_2	0,177	0,149	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{16} dengan Y_2	0,248	0,042	0,05	H_1 diterima
	Korelasi X_{17} dengan Y_2	0,088	0,476	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{18} dengan Y_2	0,192	0,117	0,05	H_1 ditolak
	Korelasi X_{19} dengan Y_2	0,125	0,309	0,05	H_1 ditolak
2.	Korelasi X_2 dengan Y_2 (r_{2y2})	0,468	0,000	0,05	H_1 diterima

	Korelasi $X_{2,1}$ dengan Y_2	0,477**	0,000	0,05	H_1 diterima
	Korelasi $X_{2,2}$ dengan Y_2	0,318**	0,008	0,05	H_1 diterima
3.	Korelasi X_3 dengan Y_2 (r_{3y2})	0,431	0,000	0,05	H_1 diterima
	Korelasi $X_{3,1}$ dengan Y_2	0,388	0,001	0,05	H_1 diterima
	Korelasi $X_{3,2}$ dengan Y_2	0,361	0,003	0,05	H_1 diterima
	Korelasi $X_{3,3}$ dengan Y_2	0,416	0,000	0,05	H_1 diterima
4.	Korelasi Y_1 dengan Y_2 (r_{y1y2})	0,771	0,000	0,05	H_1 diterima
	Korelasi $Y_{1,1}$ dengan Y_2	0,569**	0,000	0,05	H_1 diterima
	Korelasi $Y_{1,2}$ dengan Y_2	0,619**	0,000	0,05	H_1 diterima
	Korelasi $Y_{1,3}$ dengan Y_2	0,669**	0,000	0,05	H_1 diterima
	Korelasi $Y_{1,4}$ dengan Y_2	0,671**	0,000	0,05	H_1 diterima
	Korelasi $Y_{1,5}$ dengan Y_2	0,616**	0,000	0,05	H_1 diterima
5.	Korelasi X_3 dengan Y_1 (r_{3y1})	0,467	0,000	0,05	H_1 diterima
6.	Korelasi X_3 dengan X_2 (r_{32})	0,748	0,000	0,05	H_1 diterima
7.	Korelasi X_3 dengan X_1 (r_{31})	0,275	0,023	0,05	H_1 diterima
8.	Korelasi X_2 dengan Y_1 (r_{2y1})	0,522	0,000	0,05	H_1 diterima
9.	Korelasi X_2 dengan X_3 (r_{23})	0,748	0,000	0,05	H_1 diterima
10.	Korelasi X_2 dengan X_1 (r_{21})	0,142	0,249	0,05	H_1 ditolak

Sumber: Hasil analisis statistik pada Lampiran 14 dan Lampiran 20.

Keterangan : ** signifikan pada taraf α . 0,01

Berdasarkan uji statistik menggunakan SPSS 17 seperti yang tertera pada Tabel 4.32, diperoleh hasil bahwa variabel-variabel pada model 2, umumnya semua variabel saling berhubungan atau terjadi korelasi yang signifikan, tetapi terdapat beberapa hubungan yang tidak signifikan dibuktikan dengan ditolaknya H_1 yang disebabkan oleh nilai sign lebih besar dari pada α . Keputusan ini dibuktikan dengan diterimanya H_1 yang disebabkan oleh nilai sign lebih kecil dari pada α .

Dari hasil uji analisis jalur yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) dan koefisien error ($P_3\epsilon_1$ dan $P_4\epsilon_2$) sebagai berikut:

$$- R_1^2 (\text{Koefisien determinasi untuk model 1}) = 0,306$$

$$- R_2^2 (\text{Koefisien determinasi untuk model 2}) = 0,603$$

Dengan demikian koefisien errornya:

$$- P_4\epsilon_1 (\text{Koefisien error untuk model 1}) = \sqrt{1 - R_1^2} = \sqrt{1 - 0,306} = 0,694$$

$$- P_5\epsilon_2 (\text{Koefisien error untuk model 2}) = \sqrt{1 - R_2^2} = \sqrt{1 - 0,603} = 0,397$$

Selanjutnya koefisien jalur (P) dan nilai koefisien korelasi (r) secara ringkas ditampilkan pada Tabel 4.33 berikut ini.

Tabel 4.33. Daftar Nilai Koefisien Jalur dan Koefisien Regresi

No.	Uraian	Koefisien jalur	Koefisien korelasi
1.	X ₁ dengan X ₂	-	r ₁₂ = 0,142
2.	X ₁ dengan X ₃	-	r ₁₃ = 0,275
3.	X ₁ dengan Y ₁	P ₄₁ = 0,150	r ₁₄ = 0,240
4.	X ₁ dengan Y ₂	P ₄₁ = 0,015	r ₁₄ = 0,208
5.	X ₂ dengan X ₃	-	r ₂₃ = 0,748
6.	X ₂ dengan Y ₁	P ₄₂ = 0,413	r ₂₄ = 0,522
7.	X ₂ dengan Y ₂	P ₅₂ = 0,054	r ₂₅ = 0,468
8.	X ₃ dengan Y ₁	P ₄₃ = 0,116	r ₃₄ = 0,467
9.	X ₃ dengan Y ₂	P ₅₃ = 0,053	r ₃₅ = 0,431
10.	Y ₁ dengan Y ₂	P ₅₄ = 0,715	r ₄₅ = 0,771

Sumber: Hasil analisis statistik pada lampiran 13,14

Dengan melihat Tabel 4.33 (daftar nilai koefisien jalur dan koefisien regresi)

maka dilakukan pengujian terhadap seberapa jauh kuatnya pengaruh-langsung dibanding dengan pengaruh tak-langsung, dihitung dengan membandingkan antara besarnya nilai β dengan $r - \beta$.

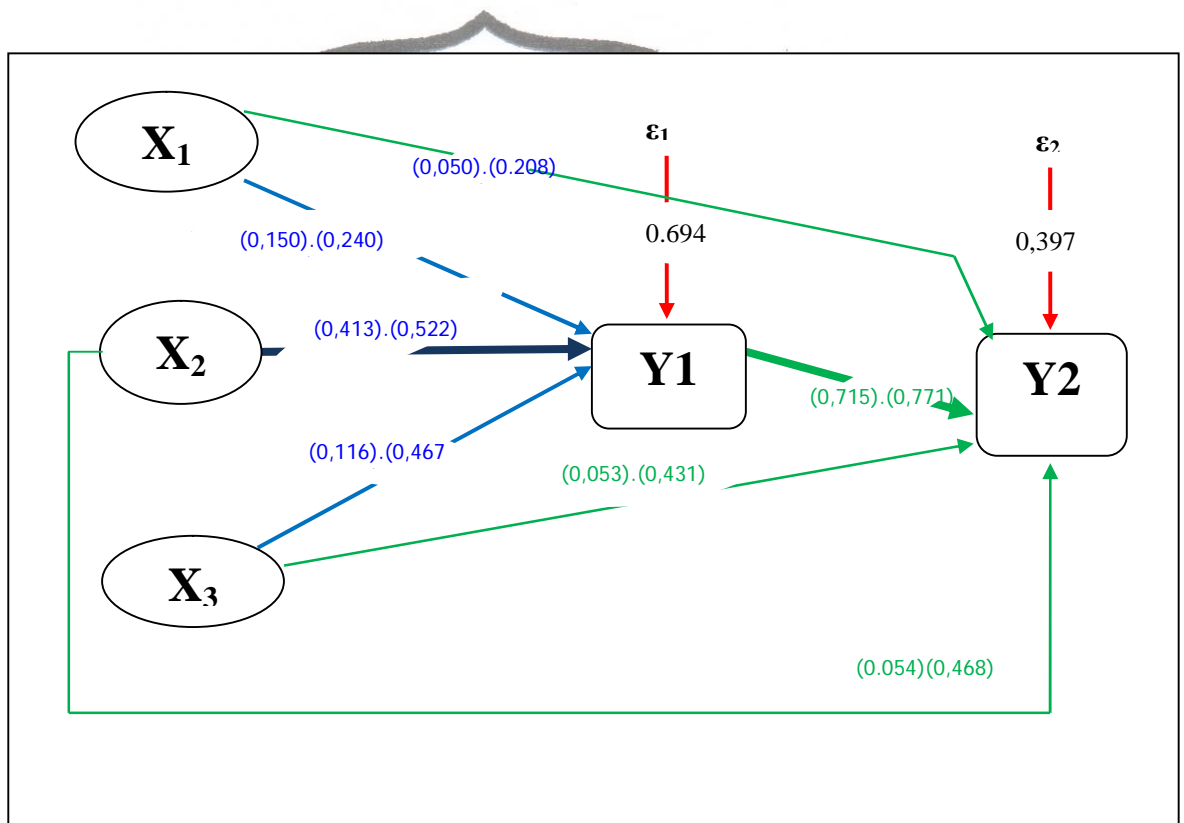
- Jika $\beta > (r - \beta)$, maka variabel-bebas benar-benar memiliki pengaruh langsung terhadap variabel-tergantungnya.
- Jika $\beta < (r - \beta)$, maka variabel-bebas tidak memiliki pengaruh langsung terhadap variabel-tergantung, dan pengaruhnya lebih ditentukan oleh pengaruh variabel lainnya terhadap variabel-tergantungnya.

Tabel 4.34. Kuatnya Pengaruh Langsung dibanding Pengaruh Tidak Langsung

No.	Uraian	β	r	(r - β)	$\beta > (r - \beta)$ / $\beta < (r - \beta)$
1.	X ₁ terhadap Y ₁	0,150	0,240	0,90	0,150 < 0,90
2.	X ₂ terhadap Y ₁	0,413	0,522	0,109	0,413 > 0,109
3.	X ₃ terhadap Y ₁	0,116	0,467	0,351	0,116 < 0,351
4.	X ₁ terhadap Y ₂	0,015	0,208	0,193	0,015 < 0,193
5.	X ₂ terhadap Y ₂	0,054	0,468	0,414	0,054 < 0,414
6.	X ₃ terhadap Y ₂	0,053	0,431	0,378	0,053 < 0,378
7.	Y ₁ terhadap Y ₂	0,715	0,771	0,056	0,715 > 0,056

Tabel 4.34 di atas menjelaskan bahwa variabel bebas benar-benar memiliki pengaruh langsung terhadap variabel terikat dibandingkan pengaruh tidak langsungnya hal tersebut ditunjukkan pada jalur X₂ terhadap Y₁ dan jalur Y₁

terhadap Y_2 jalur. Sedangkan pada jalur lainya variabel-bebas tidak memiliki pengaruh langsung terhadap variabel-terikat dan pengaruhnya lebih ditentukan oleh pengaruh variabel lainnya terhadap variabel-tergantungnya. Berdasarkan nilai-nilai koefisien jalur, koefisien korelasi dan koefisien error, maka ditampilkan diagram jalur seperti pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Diagram Jalur Hasil Analisis Statistik

E. Pembahasan

1. Penilaian Responden Penelitian Terhadap Dinamika Kelompok, Karakteristik Program, Dukungan Stakeholder, Partisipasi Kelompok Dan Kemandirian Kelompok

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, diperoleh data penilaian responden terhadap variabel dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholder, partisipasi kelompok dan kemandirian kelompok yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori skor yaitu sangat rendah (SR), rendah (R), tinggi (T) dan sangat tinggi (ST) secara lengkap tertera pada Tabel 4.35

Tabel 4.35. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Dinamika Kelompok, Karakteristik Program, Dukungan Stakeholder, Partisipasi Kelompok dan Kemandirian Kelompok

No	Variabel Penelitian	Interval Skor	Kategori Skor	Rata-rata
1	Dinamika Kelompok (X ₁)	80-103,5 104 -127,5 128 -151,5 152 -170	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	148,13 (T)
2	Karakteristik Program (X ₂)	37- 42,7 43 - 48,75 49 - 54,75 55 - 60	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	50,63 (T)
3	Dukungan Stakeholder (Y ₃)	62,5 - 78 78,5 -93,5 94 - 109 109,5-124,5	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	86,7 (T)
4	Partisipasi Kelompok (Y ₁)	23,5 - 32 32,5- 41 41,5 - 50 50,5 -58	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat tinggi	42,16 (T)
5	Kemandirian Kelompok (Y ₂)	39 - 46 46,5 - 53 53,5 - 60 60 - 68	Sangat rendah Rendah Tinggi Sangat Tinggi	51,77 (ST)

Sumber : Analisis Data

Dari table 4.35 dapat disimpulkan bahwa secara umum penilaian masyarakat terhadap P2KP sudah baik terlihat dari persentase penilaian yang diberikan responden pada setiap aspek terdapat pada kriteria tinggi dan sangat tinggi. Secara rinci dapat

dilihat dari penilaian responden terhadap dinamika kelompok (X_1) terdapat pada kriteria sangat tinggi sebesar (148,13 karakteristik program (X_2) pada kriteria tinggi (50,63) dukungan stakeholder (X_3) pada kriteria sangat rendah (86,7) partisipasi kelompok (Y_1) pada kriteria rendah (42,16) dan kemandirian kelompok (Y_2) pada kriteria rendah (51,77).

Penilaian tinggi responden terhadap dinamika kelompok disebabkan bahwa kehadiran P2KP di Kelurahan Kampung Baru sejak tahun 2007 menjadi peluang masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. P2KP merupakan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat berfokus pada pemberdayaan secara kelompok dan bukan pemberdayaan secara perorangan atau personal. Melalui P2KP ini bertujuan membangun lembaga masyarakat yang mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya dan meningkatkan akses bagi warga masyarakat miskin ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal) dan mengedepankan peran pemerintah daerah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin.

Kondisi dinamika kelompok swadaya masyarakat (KSM) di Kelurahan Kampung Baru tergolong dinamis, meskipun di beberapa kelompok terlihat kurangnya interaksi dan koordinasi antar anggota kelompok sehingga pola kerjasama dan solidaritas antar anggota kelompok kurang terbina dengan baik. Mengingat pembentukan kelompok mereka bersifat dadakan dan paksaan karena untuk mendapatkan modal usaha, bantuan sosial maupun bantuan lainnya mereka harus bergabung dalam suatu kelompok karena sesuai dengan tujuan program P2KP sebagai program pemberdayaan kelompok bukan pemberdayaan perseorangan. Berdasarkan

keharusan untuk bergabung dalam suatu kelompok swadaya masyarakat membuat mereka bergabung tanpa didasari kesadaran sendiri dan dorongan hati nurani tetapi alasan untuk mendapatkan bantuan.

Selain fakta kondisi kelompok diatas, fakta yang terlihat kondisi kelompok saat ini bantuan modal usaha yang digulirkan dikelola secara sendiri atau individu tetapi pertanggungjawaban tetap ada di tangan ketua kelompok, namun ada beberapa kelompok di kelurahan ini yang sangat kondusif dan terus berkembang seperti KSM di lingkungan III sebab umumnya anggota kelompok memiliki kesadaran yang tinggi, tanggung jawab dan juga koordinasi yang tinggi serta rasa tanggungjawab atas kelompoknya sehingga kelompok ini sampai saat penelitian berjalan masih eksis. Kondisi seperti ini didukung oleh pengurus yang mempunyai sifat peduli terhadap anggota dan koordinasi dilakukan antar pengurus dan anggota kelompok.

Penilaian masyarakat yang sangat tinggi terhadap karakteristik program disebabkan adanya penilaian positif dari masyarakat Kelurahan Kampung Baru terhadap realisasi pelaksanaan program khususnya masyarakat miskin dengan melihat bukti nyata bantuan yang diberikan kepada masyarakat lebih nyata dan bermanfaat bagi mereka dengan membandingkan berbagai program pengentasan kemiskinan serupa yang sudah pernah diterima di wilayah ini. Selain itu fakta lain yang mendukung tingginya penilaian terhadap karakteristik program yaitu keterlibatan partisipasi masyarakat secara langsung dalam program ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi, sehingga dalam pengelolaan penyaluran bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat tepat sasaran.

Masyarakat menilai dan menyadari bahwa program pengentasan kemiskinan di perkotaan (P2KP) ini berbeda dengan program-program sebelumnya yang pernah

mereka terima. Masyarakat lebih dilibatkan secara nyata dan aktif dalam berbagai tahapan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi. Selain itu masyarakat ikut berpartisipasi secara langsung menggali potensi yang ada diwilayahnya dengan melaksanakan pemetaan potensi wilayah mulai dari pemetaan angka keluarga miskin, pemetaan sarana dan prasarana lingkungan fisik dan pemetaan sumber daya manusia yang dilaksanakan bersama-sama dengan fasilitator dan juga pihak BKM, sehingga masyarakat benar-benar merasa bagian dari program ini dan bukan hanya sebagai objek proyek. Hal inilah yang membuat masyarakat menilai tinggi terhadap partisipasi kelompok.

Keterlibatan stakeholder dalam program pengentasan kemiskinan di wilayah ini disambut baik oleh masyarakat juga pengurus BKM maupun dari pihak pemerintah mengingat sudah banyak bantuan yang telah diberikan oleh pihak stakeholder khususnya kepada masyarakat miskin. Hal ini yang mendorong masyarakat memberikan penilaian tinggi terhadap stakeholder ini. Terkait dengan angka populasi keluarga miskin di wilayah ini yang cukup tinggi, sehingga bantuan yang diberikan oleh stakeholder kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat miskin belum memberikan perubahan yang berarti secara luas bagi masyarakat. Hal ini disebabkan bantuan sosial yang diberikan oleh pihak stakeholder baik dalam bantuan modal maupun bantuan lain jumlahnya sangat terbatas, sementara disisi lain angka kemiskinan di wilayah ini sangat tinggi sehingga masyarakat tidak dapat merasakan manfaat yang berarti secara menyeluruh bagi perbaikan kehidupan masyarakat Kampung Baru khususnya masyarakat miskin.

Beberapa pihak stakeholder yang telah menjalin kerjasama dan berpartisipasi dalam rangka pengentasan kemiskinan khususnya bagi masyarakat miskin di

Kelurahan Kampung Baru seperti PT. Pertamina, PT. Tricom, PT. Cemara Asri dan Departemen Sosial. Bantuan yang diberikan guna mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat direalisasikan dalam berbagai bentuk bantuan seperti bantuan gizi balita melalui posyandu dengan memberikan bantuan makanan tambahan kepada balita, diharapkan kegiatan ini dapat memperbaiki kondisi gizi balita terutama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ini merupakan wujud dukungan stakeholder PT. Pertamina bekerjasama dengan pihak BKM Mandiri Sejahtera. Selain itu PT. Tricom juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan computer bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga dengan adanya pelatihan/kursus komputer ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan menambah skill bagi anak-anak sekolah. Departemen Sosial berupa santunan dana sosial bagi orang tua jompo, anak yatim. Semua bantuan yang diberikan oleh para stakeholder ini jumlahnya masih sedikit dan masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari mereka sehingga dapat dikatakan bantuan ini belum memberikan perubahan yang besar terhadap perbaikan kehidupan mereka. Hal ini yang membuat masyarakat memberikan penilaian yang rendah terhadap dukungan stakeholder.

Partisipasi masyarakat Kelurahan Kampung Baru dalam Program P2KP dapat dikategorikan cukup aktif. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan BKM Mandiri Sejahtera mencatatkan diri sebagai BKM terbaik di Kota Medan dan telah berhasil membangun kantor sekretariat sendiri dari hasil pengelolaan dana melalui program P2KP tersebut. Peran masyarakat khususnya warga Kelurahan Kampung Baru yang tergolong pada keluarga kurang mampu sangat antusias merespon program-program yang direncanakan BKM, terutama dalam mengajukan usulan kredit sebagai modal

usaha. Kadar partisipasi masyarakat di Kelurahan Kampung Baru dalam pelaksanaan program P2KP bisa dibilang cukup tinggi, walaupun hanya untuk mengikuti pelaksanaan program saja sedang pada tahap perencanaan dan pengamanan keberlangsungan program masih belum nampak. Hal ini mengandung makna bahwa dalam keterlibatan masyarakat dalam program P2KP hanya terbatas pada saat pelaksanaan program saja.

Kendala yang dialami dalam meningkatkan partisipasi atau peran serta masyarakat penerima manfaat proyek P2KP sering terganggu oleh adanya kondisi yang dialaminya. Seperti halnya bagi para anggota KSM yang terpaksa tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kondisi tersebut terjadi seperti pada saat awal tahun ajaran baru, menjelang hari raya, ataupun saat-saat yang mengharuskan masyarakat memprioritaskannya. Selain dari yang dikemukakan di atas, faktor rongrongan dari oknum yang memberikan informasi yang tidak benar tentang P2KP, sangat menyulitkan pihak BKM guna mengharapkan partisipasi dari warga masyarakatnya. Informasi bahwa P2KP tidak ubahnya seperti program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) lainnya yang karena sesuatu dan lain hal banyak mengalami kegagalan. Banyak anggota KSM pada awalnya yang memperoleh informasi bahwa bantuan kredit P2KP tidak perlu dikembalikan, karena dana itu memang untuk orang miskin jadi tidak perlu dikembalikan dan lebih ironis lagi adanya informasi pemutihan bagi kredit yang sudah digulirkan. Sehingga pihak pengurus BKM pada mulanya agak kerepotan menghadapi rongrongan dari para “provokator” agar masyarakat yang menerima bantuan kredit kembali percaya bahwa dana P2KP ini memang milik dan diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh warga masyarakat Kelurahan Kampung Baru. Oleh karena itu

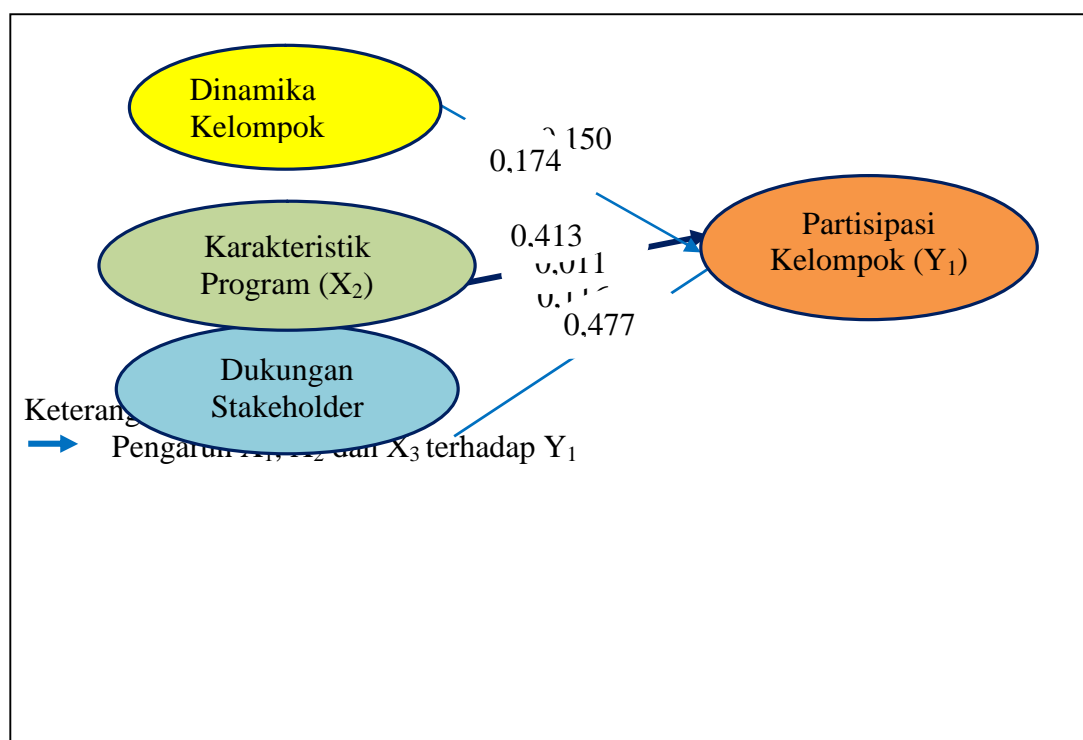
commit to user

justru masyarakat jugalah yang seharusnya mengembangkan dan sekaligus mengamankannya untuk kepentingan bersama.

2. Pengaruh Dinamika Kelompok, Karakteristik Program dan Dukungan Stakeholder Terhadap Partisipasi Kelompok.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian melalui teknik analisis jalur yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholder secara bersama-sama berpengaruh terhadap partisipasi kelompok. Adanya pengaruh secara gabungan tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) yang signifikan pada p value 0,000 lebih kecil dibanding $\alpha = 0,05$. Hasil analisis koefisien determinasi mendapatkan nilai R^2 sebesar 0,306. Nilai yang diperoleh sebesar 30,6 % mempunyai arti bahwa pengaruh dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholder terhadap partisipasi kelompok secara gabungan adalah 30,6 %, sedangkan sisanya 69,4 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel yaitu dinamika kelompok (X_1), karakteristik program (X_2) dan dukungan stakeholder (X_3) terhadap variabel partisipasi kelompok (Y_1) dapat di lihat pada gambar 5 dibawah ini.



Gambar 5. Model Pengaruh Faktor Dinamika Kelompok, Karakteristik Program dan Dukungan Stakeholder Terhadap Tingkat Partisipasi Kelompok

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor karakteristik program (X_2) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi kelompok (Y_1). Hal ini dibuktikan dengan angka *standardized coefficients* Beta sebesar 0,413 artinya pengaruh karakteristik program terhadap peningkatan partisipasi kelompok sebesar 41,3 % sedangkan pengaruh faktor lain yaitu dinamika kelompok 0,150 atau 15,0 % dan faktor dukungan stakeholder 0,116 atau 11,6 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh karakteristik program terhadap peningkatan partisipasi lebih besar bila dibandingkan dengan pengaruh faktor lain.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa faktor dinamika kelompok memberikan pengaruh terhadap partisipasi. Sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Madrie (Metylia 2007) bahwa faktor penentu partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor dari dalam diri individu masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu bentuk rasa pertanggungjawaban masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh proses komunikasi dan interaksi antar individu dalam masyarakat.

Seperti halnya dalam P2KP ini, masyarakat tidak hanya dituntut untuk ikut mensukseskan penyelenggaraan program, namun lebih jauh lagi yakni sebagai aktor tingkat lokal. Partisipasi masyarakat di Kelurahan Kampung Baru memang sudah cukup baik, namun akan lebih baik lagi apabila seluruh komponen masyarakat (tidak hanya masyarakat miskin yang dijadikan sasaran) turut bahu membahu menumbuhkan rasa saling peduli terhadap kondisi sosial di lingkungannya. Pendek kata bahwa partisipasi masyarakat seharusnya tidak hanya dituntut bagi yang berperan sebagai

objek, tetapi yang paling penting justru harus ditujukan bagi yang berperan sebagai objek pembangunan.

Partisipasi masyarakat tersebut bukan sesuatu yang dianggap sudah wajar adanya, sebab seseorang untuk mengajukan suatu usulan kredit (dalam P2KP) disyaratkan untuk terlebih dahulu membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta membuat/mengisi formulir atau proposal yang menyangkut kebutuhan modal usaha. Mengingat tingkat pengetahuan dari warga masyarakat yang tergolong kurang mampu relatif masih rendah, maka keharusan membuat usulan atau yang diistilahkan dengan proposal membuat masyarakat berupaya masyarakat lebih keras lagi seperti misalnya berkonsultasi dengan pengurus BKM atau dengan Fasilitator Kelurahan (FASKEL).

Berdasarkan langkah-langkahnya, program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) adanya kelompok-kelompok keluarga miskin yang selanjutnya tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM). Diharapkan kelompok swadaya masyarakat ini merupakan kelompok swadaya masyarakat yang benar-benar mengerti pentingnya berkelompok juga paham dan sadar untuk bergabung dengan kelompok swadaya masyarakat membentuk komunitas yang lebih besar melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Zubaedi (2007) bahwa langkah pertama dalam pengembangan masyarakat adalah terbentuknya Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Melalui kelompok, masing-masing individu belajar, menumbuhkan kesadaran dan menggali kepentingan bersama. Langkah berikutnya adalah membangkitkan partisipasi masyarakat, memupuk dan mengembangkan mekanisme musyawarah dan membangun jaringan lokal sebagai mitra kerja.

Melalui Program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP) ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin di perkotaan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan struktural dan kemiskinan yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk dana yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan memacu kegiatan ekonomi produktif. Dengan suntikan dana masyarakat dapat memunculkan aspirasi usaha melalui berbagai bidang usaha yang sesuai. Bentuk bantuan meliputi dana hibah dan pinjaman yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan usaha dipertanian. Bentuk-bentuk kegiatan yang diwujudkan dalam program ini yaitu pemberdayaan Tri daya yang mencakup pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial dan fisik/ lingkungan serta pendekatan yang bersifat bottom-up yang digunakan untuk menggali aspirasi masyarakat sehingga pelaksanaan program yang dilaksanakan benar-benar merupakan hasil kesepakatan bersama dan sesuai dengan kebutuhan mereka sebagai bagian pelaksana program dan bukan lagi sebagai objek proyek. Pendekatan sesuai dengan yang disampaikan oleh Sulekale, (2003) bahwa pendekatan pembangunan yang dipandang lebih relevan dalam melakukan pembangunan di Indonesia adalah pendekatan campuran atau model campuran (*mix model*) antara pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah. Bentuk otentik dari pendekatan ini adalah bahwa konsep umum program pembangunan telah dibuat oleh *decision maker*.

Sebagai solusi peningkatan partisipasi, hasil pengujian model menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi kelompok dapat melalui usaha peningkatan dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholder yang semakin jelas. Diantara ketiganya, pengaruh karakteristik memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap partisipasi kelompok. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya hubungan

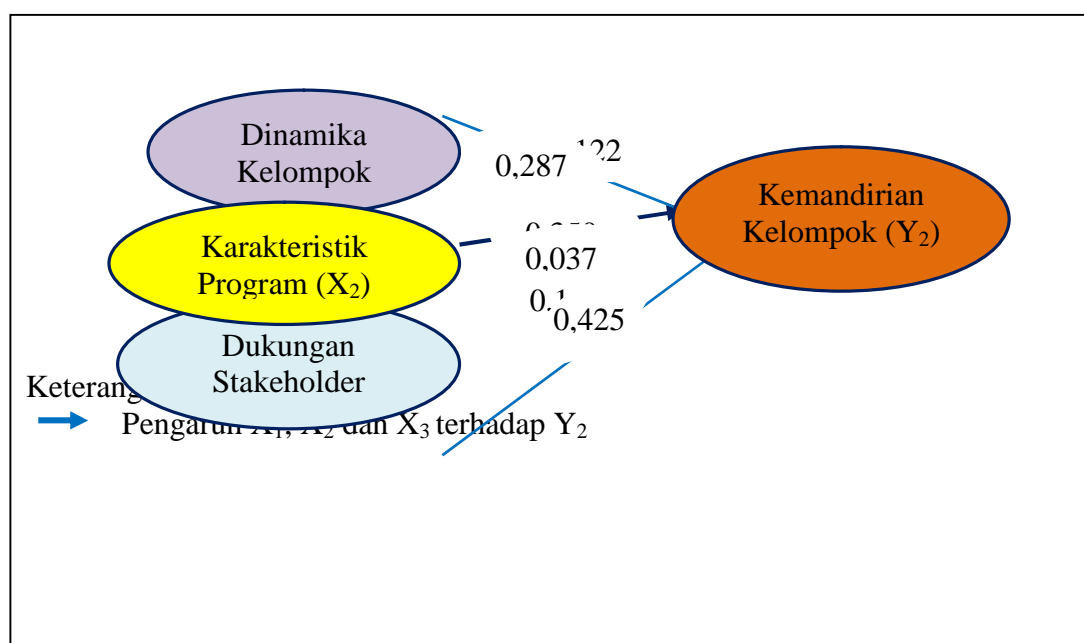
commit to user

karakteristik program dengan partisipasi kelompok memberikan pengaruh secara langsung. Dengan demikian pada model pengaruh karakteristik program terhadap partisipasi kelompok berpengaruh dominan.

3. Pengaruh Dinamika Kelompok, Karakteristik Program dan Dukungan Stakeholder Terhadap Kemandirian Kelompok.

Berdasarkan hasil analisis data penelitian melalui teknik analisis jalur yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholder secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian kelompok. Adanya pengaruh secara gabungan tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) yang signifikan pada p value 0,000 lebih kecil dibanding $\alpha = 0,05$. Hasil analisis koefisien determinasi mendapatkan nilai R^2 sebesar 0,248. Nilai yang diperoleh sebesar 24,8 % mempunyai arti bahwa pengaruh dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholder terhadap kemandirian kelompok secara gabungan adalah 24,8 %, sedangkan sisanya 75,2 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel yaitu dinamika kelompok (X_1), karakteristik program (X_2) dan dukungan stakeholder (X_3) terhadap variabel partisipasi kelompok (Y_1) dapat di lihat pada gambar 6 dibawah ini.



Gambar 6. Model Pengaruh Faktor Dinamika Kelompok, Karakteristik Program dan Dukungan Stakeholder Terhadap Tingkat Kemandirian Kelompok

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa faktor karakteristik program (X_2) memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap peningkatan kemandirian kelompok (Y_2). Hal ini dibuktikan dengan angka standardized coefficients Beta sebesar 0,350 artinya pengaruh karakteristik program terhadap peningkatan partisipasi kelompok sebesar 35,0% sedangkan pengaruh faktor lain yaitu dinamika kelompok 0,122 atau 12,2 % dan faktor dukungan stakeholder 0,136 atau 13,6 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh ketiga faktor tersebut yaitu dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholder memberikan pengaruh yang tidak nyata terhadap peningkatan kemandirian kelompok. Hasil ini bermakna bahwa peningkatan dinamika kelompok, karakteristi program dan dukungan stakeholder tidak diiringi dengan meningkatnya kemandirian kelompok secara nyata karena pengaruhnya sangat kecil.

Terkait dengan program pemberdayaan, responden penelitian ini adalah peserta Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang merupakan terintegrasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholder selaras dengan Ife (2002:58) yang mengemukakan pentingnya kekuatan kelembagaan. Ife (2002:58) menyebutkan jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat salah satunya adalah kekuatan kelembagaan. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:124) yang menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan masyarakat. Dalam penelitian ini penguatan kelembagaan tercermin pada pengembangan kelompok

swadaya masyarakat (KSM) dan badan keswadayaan masyarakat (BKM). Kelompok swadaya masyarakat dan BKM merupakan lembaga masyarakat yang sudah dibentuk berdasarkan aspirasi dan kesepakatan masyarakat dalam rangka turut melaksanakan program P2KP sehingga penekanan penguatan kelembagaan pada masyarakat miskin kota akan berada pada kelompok swadaya masyarakat dan badan keswadayaan masyarakat. Selanjutnya penekanan pada dua lembaga tersebut menjadi lebih bermakna dengan adanya pengaruh pengembangan dua lembaga tersebut terhadap partisipasi kelompok. Hikmat (2006:3) mengemukakan bahwa konsep pemberdayaan dalam wacana pengembangan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep partisipasi. Partisipasi inilah yang menurut Kuper dan Jessica (2000:149) berguna menanggulangi berbagai masalah seputar kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan adalah menekankan pada pembangkitan kesadaran dan daya kreasi penduduk setempat sehingga mereka mau dan mampu mencari cara-cara untuk memecahkan persoalan mereka sendiri.

Menyikapi kondisi di atas, Sumarjo dalam Slamet, 2003 menyatakan bahwa kelompok yang kurang efektif memenuhi kebutuhan anggotanya juga ditandai adanya keragaman anggota yang rendah (pendidikan rendah, lokalit dan kurang percaya diri), tetapi nepotisme dalam rekrutmen keanggotaan tinggi, sehingga masyarakat di luar anggota pun menjadi kurang simpati. Rekrutmen kepemimpinan dan kepengurusan nepotisme semacam itu menyebabkan orang-orang yang terdaftar sebagai anggota relatif menjadi apatis terhadap dinamika kelompok. Dominannya intervensi pembina (luar) dalam pengembangan kelompok menyebabkan rendahnya kreativitas/inisiatif anggota untuk mengembangkan alternatif pemecahan masalah kelompok secara mandiri.

Kelompok semacam itu biasanya terbentuk bukan atas dasar kesadaran untuk mengembangkan dinamika internal masyarakat yang mengarah pada kepentingan internal, tetapi lebih didominasi oleh motivasi masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dan oleh motivasi oleh pembina atas terselenggaranya secara administratif proyek-proyek pembangunan yang sangat sektoral. Akibatnya, dinamika kelompok sangat tergantung pada intervensi pemerintah dan intensitas interaksi dengan aparat/pembina proyek. Kelompok yang terbentuk dengan pola semacam itu lebih tampil sebagai kelompok papan nama, tanpa aktivitas anggota yang berarti dan kurang tampak greget menjadi media mewujudkan kepentingan masyarakat miskin. Sebaliknya, kelompok cenderung lebih berfungsi sebagai alat pemerintah untuk memenuhi kepentingan pemerintah.

Implementasi keberhasilan dari program P2KP juga tidak terlepas dari peran fasilitator atau Faskel sebagai pendamping. Peran pendamping sangat penting dalam memperlancar proses dialog antara individu dalam kelompok karena proses pemberdayaan mementingkan pematangan dari relasi subjek dan objek, maka pendamping tidak berfungsi sebagai orang yang mengajari, atau mengkurui individu dalam kelompok, tetapi ikut berfungsi sebagai stimulator atau pemicu diskusi. Ia harus bersikap netral dan tidak berhak mencampuri keputusan dari hasil diskusi (Moeljarto dalam Priyono dan Pranaka, 1996).

Peranan dari fasilitator sebagai agent perubahan dalam suatu program sesuai dengan yang dikemukakan oleh Nasution (1995) memegang peranan yang sangat penting untuk menunjang keberhasilan program yaitu seorang fasilitator berfungsi sebagai penggerak, perantara dan pencapai hasil. Sebagai penggerak fasilitator membangkitkan atau memprakarsai hal-hal baru yang berkembang dan keinginan

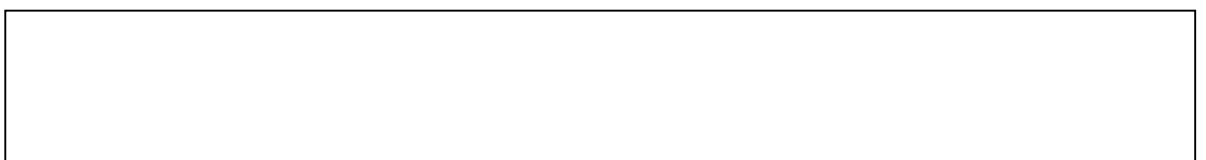
commit to user

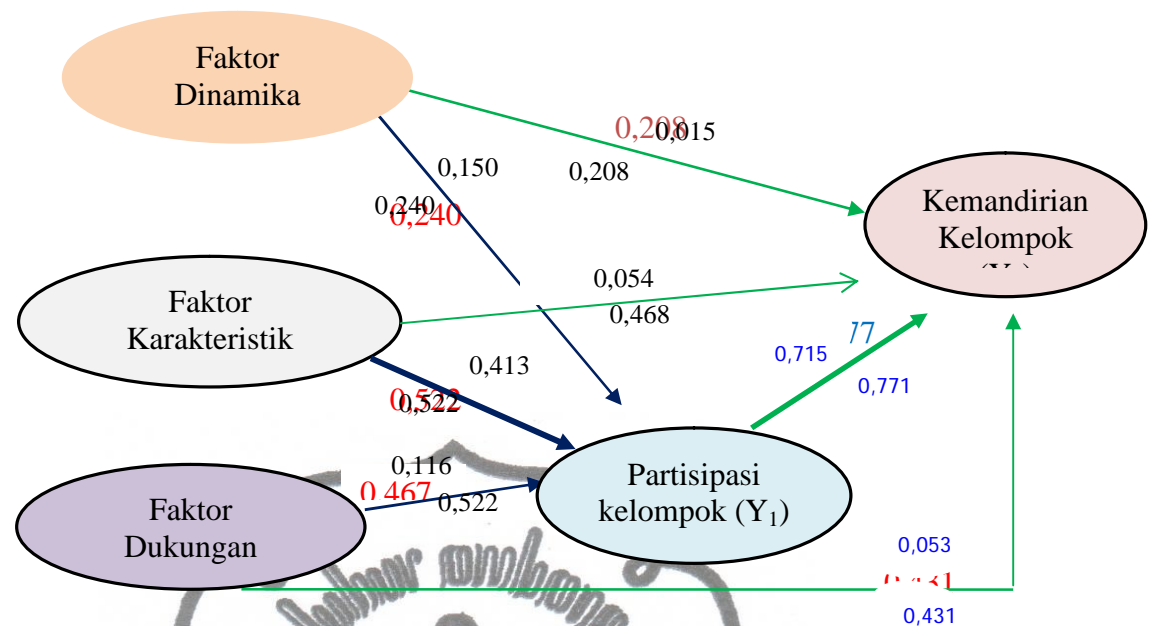
masyarakat sehingga masyarakat mau bergerak dan terpengaruh melalui petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh fasilitator. Fasilitator sebagai penganalisa melalui identifikasi atas alternative-alternatif yang dikemukakan oleh masyarakat atau pemberi masukan (input) bagi tenaga ahli dalam menganalisa sedangkan sebagai pengembang kepemimpinan, seorang agen perubahan berfungsi melakukan identifikasi, melatih, mengorganisir, serta meningkatkan kemampuan pemimpin-pemimpin setempat, mengokohkan status mereka di tengah masyarakat, sebagai suatu usaha untuk membina kesinambungan dalam proses pembangunan..

4. Pengaruh Dinamika Kelompok, Karakteristik Program, Dukungan Stakeholder dan Partisipasi Kelompok Terhadap Tingkat Kemandirian Kelompok

Berdasarkan hasil analisis data penelitian melalui teknik analisis jalur yang telah disajikan pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholder dan partisipasi kelompok secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian kelompok. Adanya pengaruh secara gabungan tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) yang signifikan pada p value 0,000 lebih kecil dibanding $\alpha = 0,05$. Hasil analisis koefisien determinasi mendapatkan nilai R^2 adalah sebesar 0,737. Nilai yang diperoleh sebesar 73,7 % mempunyai arti bahwa pengaruh dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholder dan partisipasi kelompok secara gabungan terhadap kemandirian kelompok adalah 73,7 %, sedangkan sisanya 26,3 % dipengaruhi oleh faktor lain.

Untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu dinamika kelompok (X_1), karakteristik program (X_2) dan dukungan stakeholder (X_3) dan partisipasi kelompok (Y_1) terhadap kemandirian kelompok (Y_2) dapat di lihat pada gambar 7 dibawah ini. *commit to user*





Keterangan :

➡ Pengaruh yang sign terhadap Y₁

➡ Pengaruh yang sign terhadap Y₂

Pengaruh tidak langsung X₁ terhadap Y₂ melalui Y₁ = 0,015 x 0,240 = 0,036

Pengaruh tidak langsung X₂ terhadap Y₂ melalui Y₁ = 0,054 x 0,522 = 0,028

Pengaruh tidak langsung X₃ terhadap Y₂ melalui Y₁ = 0,715 x 0,431 = 0,308

Gambar 7. Model Pengaruh Faktor Dinamika Kelompok, Karakteristik Program, Dukungan Stakeholder dan Partisipasi Kelompok Terhadap Tingkat Kemandirian Kelompok

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dinamika kelompok (X₁), faktor karakteristik program (X₂) dan dukungan stakeholder (X₃) memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap peningkatan kemandirian kelompok (Y₂), sedangkan partisipasi kelompok memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian kelompok (Y₂) Hal ini dibuktikan dengan angka standardized coefficients Beta sebesar 0,054 artinya pengaruh dinamika kelompok terhadap kemandirian kelompok sebesar 0,015 atau 1,5 %, karakteristik program 0,054 atau 5,4 % dan dukungan stakeholder 0,053 atau 5,3 %. Pengaruh tidak langsung faktor dinamika kelompok (X₁) terhadap kemandirian kelompok (Y₂) lebih besar melalui Y₁

dibandingkan dengan pengaruh secara langsung, begitu juga dengan variabel dukungan stakeholder (X_3), berbeda dengan variabel karakteristik program (X_2) pengaruh langsung lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung melalui partisipasi kelompok (Y_1)

Berbeda dengan faktor partisipasi kelompok memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemandirian kelompok dilihat dari angka standardized coefficients Beta sebesar 0,715 atau 71,5 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh partisipasi kelompok lebih besar dibandingkan dengan besar ketiga faktor lain. Hasil ini bermakna bahwa peningkatan partisipasi kelompok diiringi dengan meningkatnya kemandirian kelompok.

Kemandirian yang dijumpai di masyarakat Kampung Baru setelah adanya Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) ini dilihat berdasarkan adanya perubahan pola kehidupan terutama keluarga miskin di wilayah ini. Bantuan sosial dan bantuan modal usaha dan juga bantuan sarana dan prasarana fisik yang diterima oleh masyarakat memberikan manfaat yang besar bagi perbaikan kehidupan mereka karena selama ini masyarakat miskin khususnya tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang menetap untuk menghidupi keluarga mereka karena pekerjaan mereka sebagian besar hanya sebagai kuli bangunan, pembantu di rumah tangga, tukang beca dan sebagainya yang upah kerjanya sangat minim dan tidak mencukupi untuk menutupi kehidupan keluarganya, tetapi setelah adanya program ini dengan bantuan modal usaha dapat menjalankan usaha ekonomi produktif terlebih-lebih adanya pembekalan keterampilan dari program ini sehingga kehidupan mereka lebih membaik.

Hasil penelitian ini yang memperlihatkan adanya pengaruh partisipasi kelompok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kemandirian kelompok

swadaya masyarakat (KSM), memperkuat pernyataan Menurut Robert Havighurst (1972) bahwa kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu :

- e. Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang lain,
- f. Ekonomi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain,
- g. Intelektual, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dan kemampuan mengembangkan daya kreasi dan inovasi.
- h. Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak menunggu aksi dari orang lain.

Kemandirian menjadi kata kunci yang penting dalam pemberdayaan masyarakat seperti yang dikemukakan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:148) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi karena sasaran utamanya adalah kemandirian masyarakat. Demikian juga Hikmat (2006:3) mengemukakan bahwa orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. Pentingnya kemandirian dalam program pemberdayaan ini memicu untuk dicari variabel-variabel yang dapat mempengaruhinya. Hasil penelitian ini mampu menghadirkan beberapa variabel tersebut yang dapat mempengaruhi kemandirian kelompok. Variabel-variabel tersebut adalah dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholder dan

partisipasi kelompok yang nyata berpengaruh terhadap kemandirian kelompok tani sebesar 73,7 %.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pelaksana proyek P2KP tentunya BKM banyak mengalami hambatan dan kendala. Kendala tersebut bisa datang dari luar tubuh BKM sebagai faktor eksternal, bisa pula berasal dari dalam tubuh BKM sendiri sebagai faktor internal. Kedua faktor tersebut sangat dirasakan pengaruhnya terhadap kelancaran pelaksanaan tugas BKM secara komprehensif.

Hambatan yang datang dari unsur luar tubuh BKM dapat berasal dari para KSM sebagai kelompok sasaran. Berawal dari proses pembentukannya, yang kebanyakan hanya bergabung sebagai kelompok karena merupakan prasyarat untuk memperoleh bantuan kredit, maka solidaritas kelompok masih sangat kurang. Bertolak dari pernyataan di atas, diketahui bahwa pemberdayaan kelompok yang dirancang untuk program P2KP belum berjalan seperti yang diharapkan. Padahal berdasarkan manual proyek P2KP ditegaskan bahwa pemberdayaan komunitas (*community empowerment*) melalui KSM dipandang sebagai suatu keunggulan dari P2KP. Namun karena proses pembentukan kelompok tersebut terjadi secara instant, maka keunggulan dinamika kelompok untuk menggalang sinergi dan potensi yang dimiliki para anggotanya tidak terjadi. Hal ini sangat mungkin terjadi bagi kelompok yang kurang siap menjadi suatu komunitas yang bersatu secara kohesif.

Intinya adalah bahwa suatu program pembangunan harus dipahami dulu oleh masyarakat sebagai target groups, jika ingin mendapatkan dukungan yang spontan dari masyarakat. Dengan demikian pembangunan yang diselenggarakan akan berhasil jika didukung oleh partisipasi masyarakat yang bersangkutan seperti yang dikemukakan oleh Kartasmita (1977) menyatakan bahwa studi empirik banyak menunjukkan *commit to user*

kegagalan pembangunan ataupun pembangunan tidak dapat memenuhi sasarannya akibat kurangnya partisipasi masyarakat.

Kenyataan yang terjadi selama ini dimana program pembangunan seperti P2KP merupakan program yang diperuntukkan kepada masyarakat khususnya dalam menanggulangi kemiskinan. Program yang demikian itu masih menggunakan konsep pembangunan untuk masyarakat dan bukan program yang berpusat pada masyarakat. Sebagaimana Korten (1988) yang disinyalir oleh Supriatna (2000), menyatakan bahwa pendekatan dalam kegiatan pembangunan yang masih berorientasi pada masyarakat (people oriented) harus dirubah pendekatan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (*people centered*). Artinya partisipasi masyarakat bukan sebagai faktor ikutan (*nurlurent factors*) melainkan sebagai faktor utama (*main factors*) dalam setiap program pembangunan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P2KP tinggi, walaupun hanya pada tahapan untuk mengikuti pelaksanaan program saja sedang pada tahapan pelaksanaan dan pengamanan terhadap keberlangsungan program masih belum nampak. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti program P2KP di Kelurahan Kampung Baru sangat tinggi, walaupun kemampuan BKM untuk memenuhi keinginan para KSM relatif terbatas. Ini terlihat dari antrian proposal yang sudah masuk di BKM, namun sampai penelitian dilaksanakan masih banyak yang belum teralisasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa walaupun terdapat hambatan yang dirasakan oleh masyarakat, namun pada akhirnya mereka bersedia berpartisipasi untuk mengikuti program yang disediakan oleh proyek. Dengan demikian masyarakat akan aktif berperan dalam suatu program pembangunan, apabila mereka dapat merasakan sendiri dan terbukti bisa menguntungkan dirinya.

commit to user

Kalau dikaji berdasarkan bentuknya, partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat penerima program menurut Cohen dan Uphoff (1977) terdiri dari (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (2) implementasi, (3) pemanfaatan, dan (4) dalam evaluasi program. Oleh karena itu maka bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Kampung Baru masuk dalam bentuk partisipasi implementasi dan partisipasi pemanfaatan program. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Nordholt, 1986 (Supriatna, 2000) juga membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbatas pada pelaksanaan pembangunan (*implementation of development program*).

Hal yang lain yang membuat masyarakat mau ikut terlibat apabila program pembangunan tersebut bisa menguntungkan dirinya dan keluarganya, sehingga bukan merupakan kesadaran diri untuk ikut terlibat dalam suatu program pembangunan. Berkaitan dengan hal itu bila dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Korten (1984) sebagai berikut : “walaupun dalam tahap pertama usaha pembangunan dengan titik berat pada pembangunan dana dan daya orang kebanyakan bersedia menerima pengambilan keputusan yang terpusat, pada suatu titik ia menghendaki diikut sertakan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi perikehidupannya dan perikehidupan anggota keluarganya”. Menurut Verhangen dalam Mardikanto (1994) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada hakikatnya sangat ditentukan oleh adanya kesadaran warga masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan Slamet (1985) menyatakan bahwa tumbuhnya partisipasi sebagai suatu tindakan yang nyata diperlukan adanya tiga prasyarat yang menyangkut kemauan, kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi. Dalam implementasi program P2KP ini masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi terutama dalam merencanakan, melaksanakan

commit to user

dan mengevaluasi program, sehingga masyarakat Kampung Baru merasa bagian dari program itu sehingga program itu berkelanjutan.

Keberhasilan tersebut tidak akan pernah diraih oleh BKM Mandiri Sejahtera Kelurahan Kampung Baru, apabila kerja keras pengurus tidak didukung oleh adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dimaksud adalah berupa peran aktif masyarakat dalam mewujudkan atau membentuk kelembagaan BKM sebagai syarat utama penetapan lokasi menjadi kelurahan target penerima bantuan P2KP. Hanya dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama seluruh komponen masyarakat berhasil membentuk kepengurusan BKM, dalam suatu musyawarah warga Kelurahan Kampung Baru membentuk kepengurusan BKM Mandiri Sejahtera.

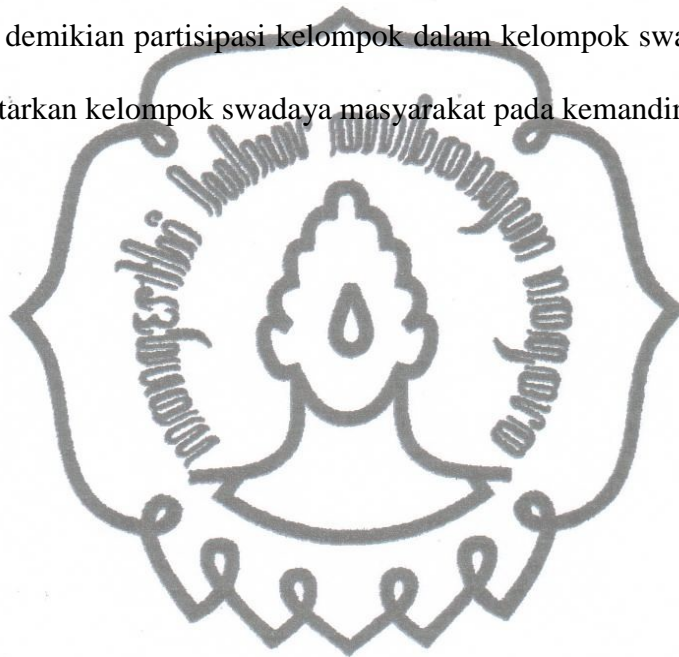
Selain dari yang dikemukakan di atas, KSM sebagai kelompok masyarakat yang tergolong kurang mampu, maka anggota KSM memiliki kelemahan baik fisik maupun mental. Kelemahan tersebut dapat berupa aspek pendidikan dan pengetahuannya yang masih rendah, kemampuan dan keterampilan bekerja/berusaha yang masih kurang, tidak stabilnya kondisi ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi BKM untuk mengharapkan partisipasi anggota KSM guna ikut terlibat dalam program P2KP. Sebagai ilustrasi, seseorang yang dapat diberi bantuan kredit ekonomi produktif harus mengajukan proposal dan telah mempunyai modal usaha (swadaya). Oleh karena pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah, maka mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menyusun proposal bantuan kredit, sehingga BKM harus memberikan perhatian yang lebih guna membantu mereka membuat usulan kredit. Ketika harus menyebutkan dan rincian modal awal yang dimiliki dalam proposal, mereka merasa kebingungan karena pada dasarnya memang

belum mempunyai modal usaha sebagai syarat dikabulkannya permohonan bantuan dana.

Hikmat (2006:3) menyatakan bahwa partisipasi merupakan komponen penting sebagai pembangkitan kemandirian dalam proses pemberdayaan. Hasil penelitian ini juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin . Pemerintah dalam rangka penguatan kelompok swadaya masyarakat menjadi organisasi masyarakat yang kuat dan mandiri yang ditunjukkan dengan adanya (1) Adanya pertemuan/rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan secara berkala dan berkesinambungan; (2) Disusunannya rencana kerja kelompok secara bersama dan dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipasi; (3) Memiliki aturan/norma yang disepakati dan ditaati bersama; (4) Memiliki pencatatan/pengadministrasian organisasi yang rapih; (5) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir; (6) Memfasilitasi usaha tani secara komersial dan berorientasi pasar; (7) Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan anggota kelompok tani khususnya; (8) Adanya jalinan kerja sama antara kelompok tani dengan pihak lain; dan (9) Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok.

Adanya pengaruh partisipasi kelompok swadaya masyarakat terhadap kemandirian kelompok swadaya masyarakat tidak lepas partisipasi itu sendiri yang menurut Pali et.al. (2005:98) merupakan alat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ini menempatkan orang sebagai pusat yang menggambarkan kapasitas masyarakat lokal terhadap pentingnya teknologi.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa partisipasi merupakan kegiatan internal masyarakat sebagai apresiasi sebagai alat pemberdayaan dalam hal inisiatif, pengendalian dan koreksi kegiatan, efektifitas pembiayaan, kegiatan lebih akurat dan relevan. Melalui partisipasi dalam kelompok swadaya masyarakat menurut Ofuoku and Isife (2009:48) muncul rasa saling memahami diantara anggota kelompok yang berorientasi pada fokus kepentingan ekonomi dan menjaga nilai, budaya dan kekuatan kelompok. Dengan demikian partisipasi kelompok dalam kelompok swadaya masyarakat mampu mengantarkan kelompok swadaya masyarakat pada kemandiriannya.



BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum program pengentasan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di Kelurahan Kampung Baru tergolong berhasil dilihat dari rata-rata penilaian responden terhadap semua variabel dimana nilai rata-rata dinamika kelompok (X_1) sebesar 148,13 pada kriteria tinggi, karakteristik program (X_2) dengan rata-rata 50,62 pada kriteria sangat tinggi, dukungan stakeholder (X_3) rata-rata sebesar 86,7 pada kriteria tinggi, partisipasi kelompok (Y_1) dengan rata-rata 42,16 terdapat pada kriteria tinggi dan kemandirian kelompok (Y_2) dengan nilai rata-rata 51,77 terdapat pada kriteria sangat tinggi. Artinya bahwa masyarakat telah memahami dengan jelas tentang program P2KP baik dari segi peesepsi terhadap program itu sendiri maupun pelaksanaan program tersebut dan program P2KP ini telah menjadikan mereka lebih mandiri.
2. Kajian terhadap kemandirian kelompok (Y_2) pada program pengentasan kemiskinan di perkotaan (P2KP) menunjukkan rata-rata penilaian responden sebesar 51,77 berada pada kriteria sangat tinggi. Artinya bahwa masyarakat sudah merasakan kemandirian cukup berarti secara umum dengan adanya bantuan yang diberikan dalam program (P2KP) ini meskipun masih ada masyarakat yang belum merasakan perubahan dan manfaat yang sangat berarti bagi perubahan kehidupan mereka.
3. Analisis hubungan antar variabel menunjukkan bahwa terdapat beberapa hubungan yang tidak signifikan antara dinamika kelompok (X_1) tidak berkorelasi secara

signifikan dengan karakteristik program (X_2) dan juga tidak berkorelasi terhadap kemandirian kelompok (Y_2).

4. Analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara karakteristik program (X_2) dengan partisipasi kelompok (Y_1) dan hubungan partisipasi kelompok dengan kemandirian kelompok (Y_2) dilihat berdasarkan besarnya nilai regresi karakteristik program sebesar 0,413 dan partisipasi kelompok sebesar 0,715.
5. Pengaruh variabel bebas (dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders) lebih kecil pengaruhnya secara langsung terhadap kemandirian kelompok dilihat berdasarkan besarnya nilai regresi sebesar 0,248 bila dibandingkan pengaruh gabungan (dinamika kelompok, karakteristik program, dukungan stakeholders dan partisipasi kelompok) mempunyai nilai regresi sebesar 0,715.

B. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Elemen pendukung partisipasi kelompok dipengaruhi oleh karakteristik program. Oleh karenanya perlu kejelasan yang lebih detail dari program tersebut dan didukung adanya sosialisasi dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat merasa bagian yang penting dari kegiatan tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat dalam program ini akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara langsung karena berdasarkan pengalaman apabila suatu program jelas dan lebih transparan kegiatannya baik perencanaannya, pelaksanaannya dan hasilnya, maka secara

signifikan akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam karakteristik perlu meningkatkan sub variabel kejelasan program dan kesesuaian jadwal karena secara langsung akan mempengaruhi tingkat partisipasi kelompok dalam implementasi program pengentasan kemiskinan perkotaan.

2. Karakteristik dari suatu program akan mempengaruhi secara signifikan terhadap dukungan dari berbagai stakeholders yang ikut berpartisipasi untuk mensukseskan program pengentasan kemiskinan khususnya di perkotaan. Peran stakeholders dalam desain program, perencanaan program didasarkan pada profil program secara jelas dan teliti sehingga mereka dalam membantu pengentasan kemiskinan mencapai sasaran yang tepat dan untuk mengoptimalkan partisipasi kelompok perlu dukungan yang lebih luas dari stakeholders.
3. Kemandirian kelompok dipengaruhi langsung oleh partisipasi kelompok. Pengaruh partisipasi kelompok lebih besar dibandingkan pengaruh langsung dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders terhadap kemandirian kelompok. Oleh karenanya untuk meningkatkan kemandirian kelompok harus diikuti dengan peningkatan partisipasi kelompok, namun untuk meningkatkan partisipasi kelompok dalam program pengentasan kemiskinan perkotaan dapat dilakukan dengan meningkatkan karakteristik program, sehingga untuk mencapai kemandirian kelompok perlu dilakukan optimalisasi terhadap kedua variabel yaitu karakteristik program dan partisipasi kelompok.

C. Saran

1. Perlu pengembangan penelitian sejenis, yaitu penelitian dengan variabel yang lebih luas dan mendalam mengingat dari penelitian ini ditemukan pengaruh variabel lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini yang mempengaruhi partisipasi kelompok maupun kemandirian kelompok swadaya masyarakat.
2. Perlu kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi kelompok melalui peningkatan dinamika kelompok, karakteristik program dan dukungan stakeholders, karena dengan peningkatan kedinamisan suatu kelompok juga diikuti dengan pemberian pemahaman atau sosialisasi tentang suatu program secara jelas dan transparan kepada semua pihak yang terlibat dalam melaksanakan program tersebut, sehingga mampu meningkatkan partisipasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan tersebut akan mencapai sasaran yang tepat.
3. Perlu dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya seperti akademisi Perguruan Tinggi, LSM dan swasta lainnya untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat. Mengingat P2KP ini merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin, sehingga diharapkan dukungan yang lebih luas dari pemerintah daerah sehingga wilayah yang belum pernah mendapatkan kesempatan program sejenis ini sehingga masyarakat yang lain juga akan ikut mendapat kesempatan program pemberdayaan.